



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 512 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan pola hubungan kerja antar unit organisasi yang efektif dan efisien serta bersinergi sesuai tugas fungsi dan kewenangannya;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 326-HUK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 408-HUK/2020, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;
- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
  - b. analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
  - c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
  - d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses; dan
  - e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut kedalam Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud- 3 -diktum KETIGA memuat alur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran utama sesuai rencana strategis organisasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 326-HUK/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 060/Kep. 408-HUK/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

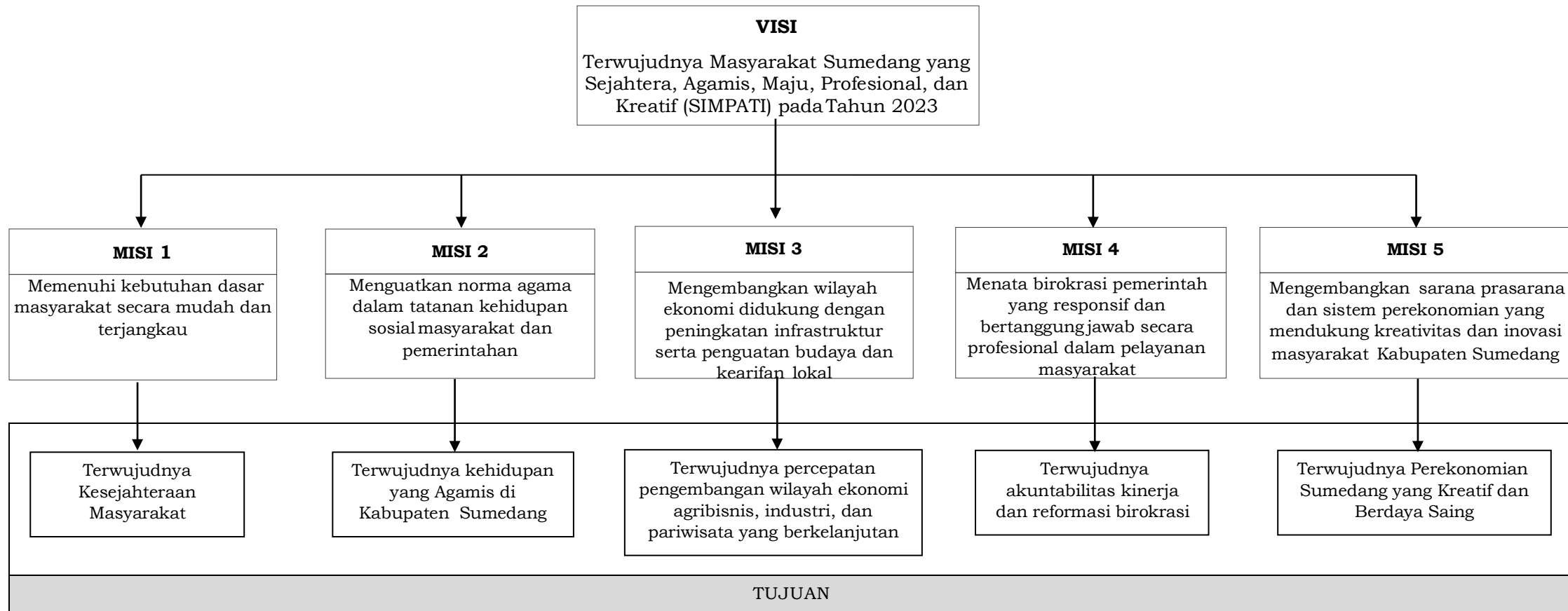
DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG.



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NI.19650129199831001

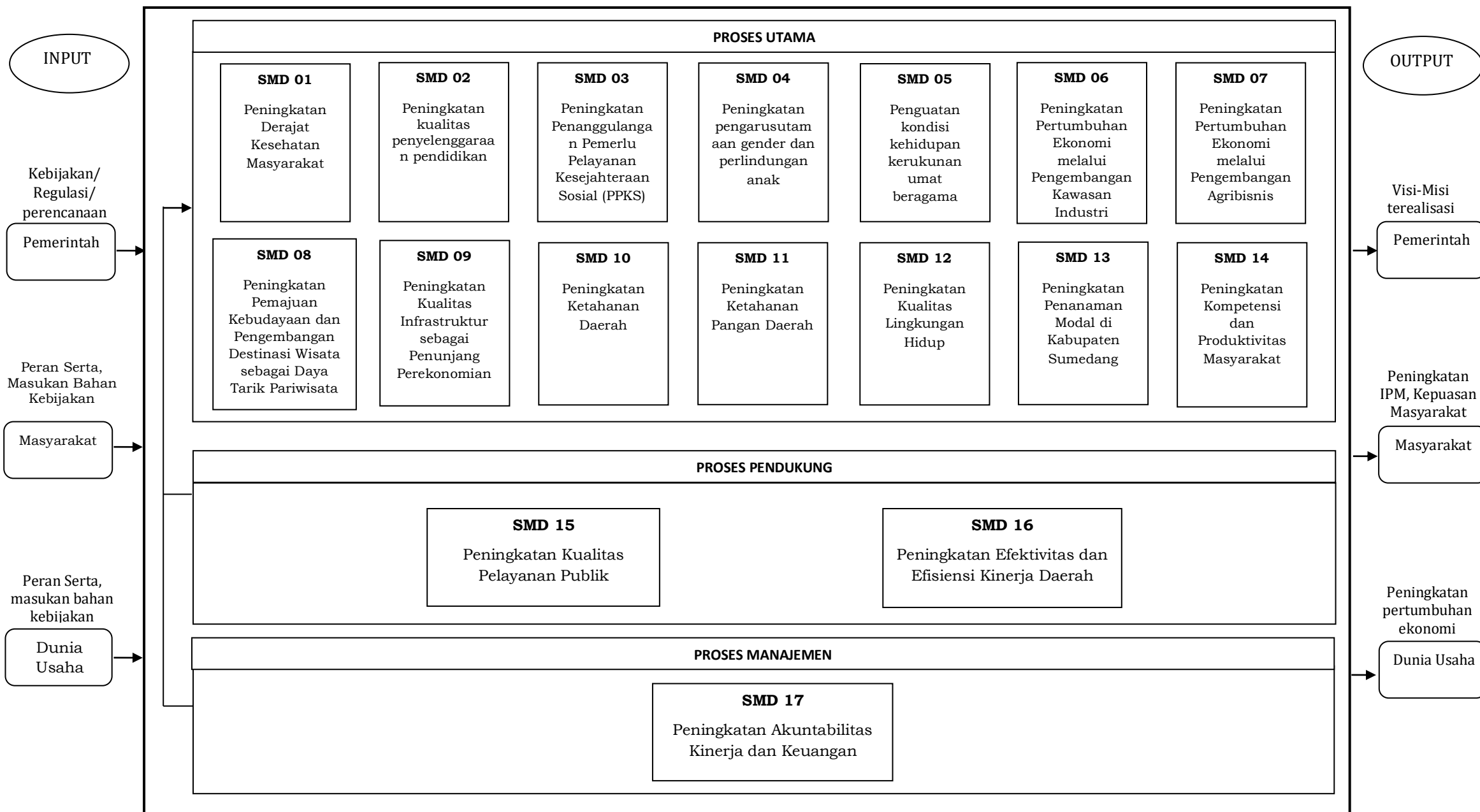
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 512 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



**TABEL IDENTIFIKASI PROSES  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2021-2023**

<b>NO</b>	<b>PROSES</b>	<b>JENIS PROSES</b>	<b>KODE SUB PROSES</b>
1	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	UTAMA	SMD 01
2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	UTAMA	SMD 02
3	Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	UTAMA	SMD 03
4	Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	UTAMA	SMD 04
5	Penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat beragama	UTAMA	SMD 05
6	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri	UTAMA	SMD 06
7	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis	UTAMA	SMD 07
8	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata	UTAMA	SMD 08
9	Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	UTAMA	SMD 09
10	Peningkatan Ketahanan Daerah	UTAMA	SMD 10
11	Peningkatan Ketahan Pangan Daerah	UTAMA	SMD 11
12	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	UTAMA	SMD 12
13	Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	UTAMA	SMD 13
14	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat	UTAMA	SMD 14
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PENDUKUNG	SMD 15
16	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	MANAJEMEN	SMD 16
17	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah	MANAJEMEN	SMD 17

### PETA PROSES BISNIS KABUPATEN SUMEDANG (LEVEL 0)

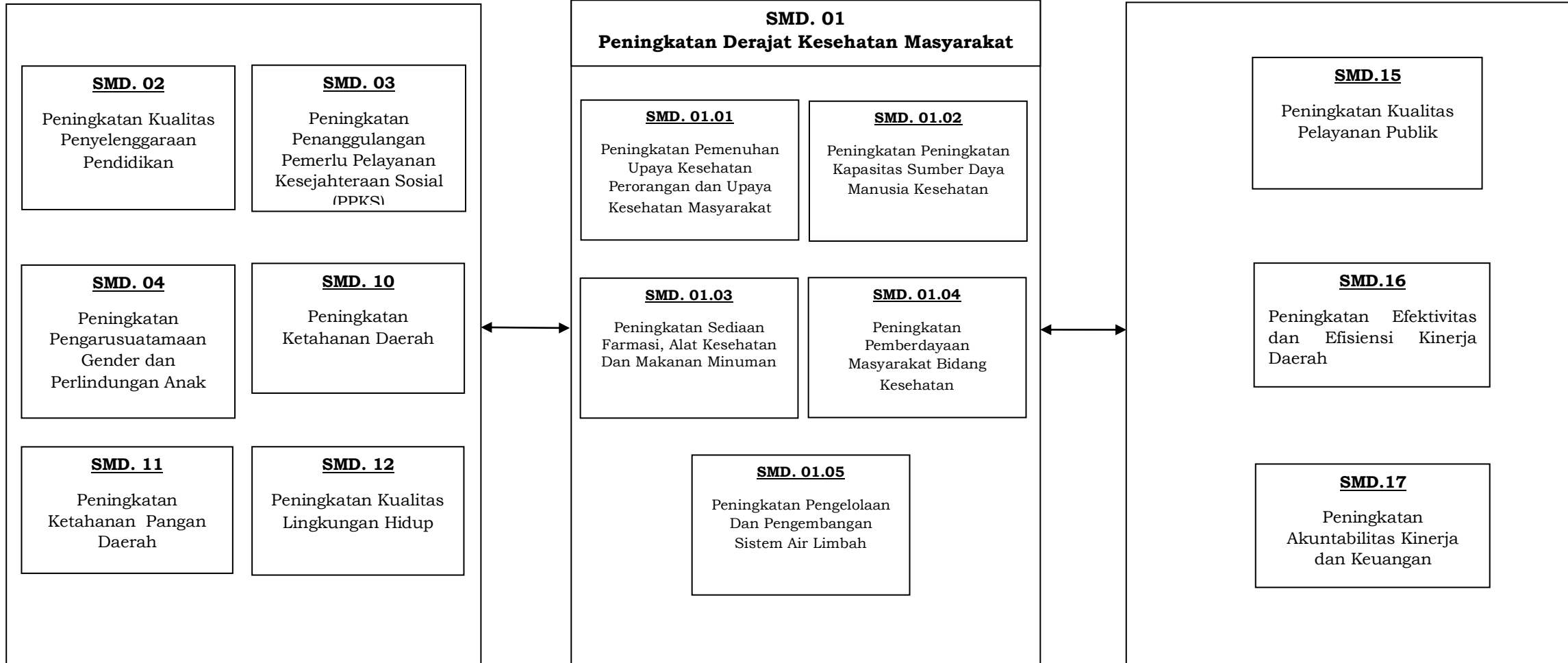


## PETA RELASI PROSES BISNIS KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021-2023

<p style="text-align: center;"><b>SMD.01</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DINKES</li> <li>• RSUD</li> <li>• DPUTR</li> <li>• DISDUKCAPIL</li> <li>• DISDIK</li> <li>• DINSOS</li> <li>• DISNAKERTRANS</li> <li>• DLHK</li> <li>• DPPKBP3A</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• BKPSDM</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• INSFEKTORAT</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.02</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DISDIK</li> <li>• DPUTR</li> <li>• DINSOS</li> <li>• SETDA</li> <li>• DISDUK</li> <li>• DPPP</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• BKPSDM</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.03</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DINSOS</li> <li>• DINKES</li> <li>• RSUD</li> <li>• DISDUKCAPIL</li> <li>• DISNAKERTRANS</li> <li>• DPMD</li> <li>• DKPP</li> <li>• DPPP</li> <li>• DPUTR</li> <li>• DPP</li> <li>• DPPKBP3A</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• SATPOLPP</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.04</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPPKBP3A</li> <li>• SETDA</li> <li>• SELURUH PD</li> <li>• KECAMATAN</li> <li>• KELURAHAN</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SMD.05</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Penguatan kondisi kehidupan kerukunan umat beragama</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BANBANKESBANGPOL</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• SETWAN</li> <li>• SATPOLPP</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.06</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPMPSTP</li> <li>• DKPP</li> <li>• DLHK</li> <li>• DISNAKERTRANS</li> <li>• DPUTR</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• DPP</li> <li>• DPP</li> <li>• SATPOLPP</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• BAPPENDA</li> <li>• INSFEKTORAT</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.07</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Agribisnis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPP</li> <li>• DPKHP</li> <li>• DKPP</li> <li>• DPUTR</li> <li>• SETDA</li> <li>• DLHK</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.08</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPKKO</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• DPMPSTP</li> <li>• DPTR</li> <li>• DKPP</li> <li>• BAPPENDA</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SMD.09</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPUTR</li> <li>• DPPP</li> <li>• DISHUB</li> <li>• DPPP</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• DINKES</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• SATPOLPP</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Ketahanan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BANBANKESBANGPOL</li> <li>• BPBD</li> <li>• SATPOLPP</li> <li>• DINAS SOSIAL</li> <li>• DPPP</li> <li>• DPP</li> <li>• DPP</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• SETDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• DISDUKCAPIL</li> <li>• DINKES</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPP</li> <li>• DPKHP</li> <li>• DKPP</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BAPPENDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• DINSOS</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DLHK</li> <li>• DINKES</li> <li>• DPUTR</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• SETDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• DPMPSTP</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SMD.13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPMPSTP</li> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• DPUTR</li> <li>• DKPP</li> <li>• DPKKO</li> <li>• DPP</li> <li>• DPP</li> <li>• DISNAKERTRANS</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• BKAD</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> <li>• DISNAKERTRANS</li> <li>• DPKKO</li> <li>• DISDIK</li> <li>• DISDUK</li> <li>• DINSOS</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• SETDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• KECAMATAN</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BKPSDM</li> <li>• DPMPSTP</li> <li>• DISDUKCAPIL</li> <li>• DINKES</li> <li>• BKAD</li> <li>• BKPSDM</li> <li>• DPMPSTP</li> <li>• DISDUKCAPIL</li> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• DINKES</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SMD.16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DISKOMINFO</li> <li>• SETDA</li> <li>• SELURUH PD</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SMD.17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SETDA</li> <li>• BAPPPEDA</li> <li>• BKAD</li> <li>• INSFEKTORAT</li> <li>• BAPPENDA</li> <li>• SELURUH PD</li> <li>• KECAMATAN</li> <li>• KELURAHAN</li> </ul>			



**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**





**Keterangan :**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

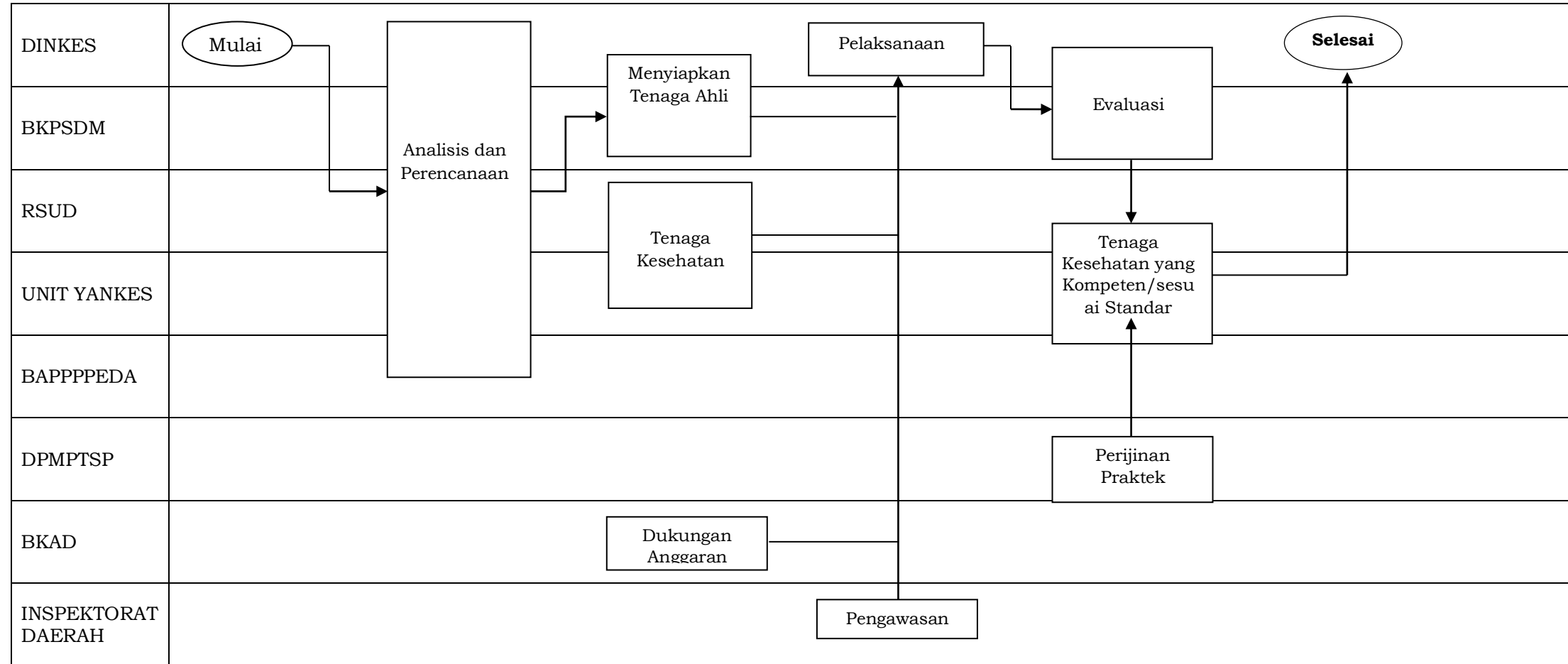
SMD – 01.01 Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	DINKES	Penanggung Jawab
4.	RSUD	Pemberian Layanan, Data Pasien, petugas kesehatan
5.	UNIT YANKES	Petugas Kesehatan, Pemberian pelayanan
6.	DINSOS	Data Jaminan Sosial Kesehatan
7.	DISDUKCAPIL	Data Kependudukan
8.	DPPKBP3A	Data Keluarga Berencana
9.	DLHK	Data Kesehatan Lingkungan, dan Pelaksana Peningkatan Kesehatan Lingkungan
10.	DISDIK	Program Pendidikan Kesehatan
11.	DPMPTSP	Perijinan Pelayanan Kesehatan
12.	DPUTR	Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kesehatan
13.	DISKOMINFO	Sistem Informasi Kesehatan
14.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
15.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SMD – 01.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



**Keterangan :**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

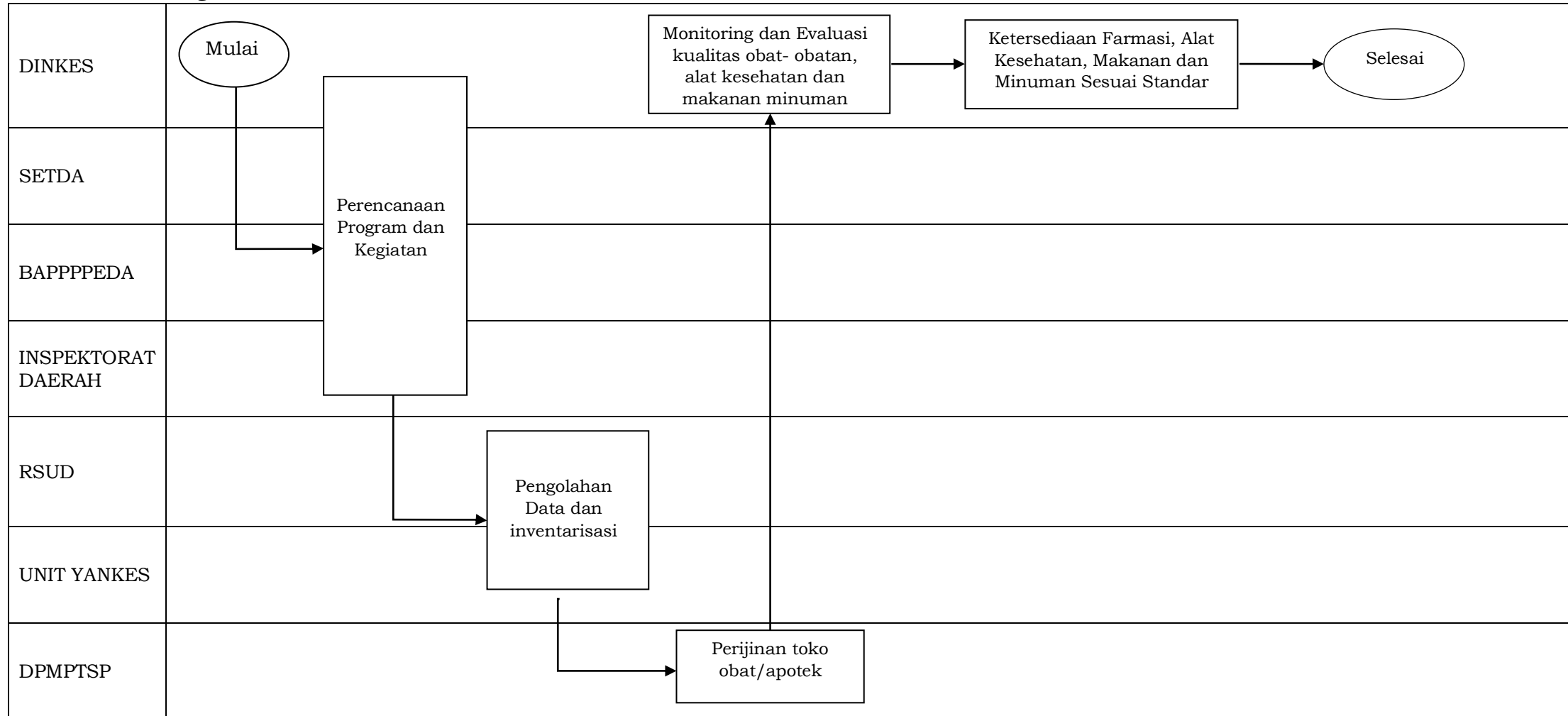
SMD – 01.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DINKES	Penanggung Jawab
2.	BKPSDM	Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan
3.	RSUD	Petugas Kesehatan
4.	UNIT YANKES	Petugas Kesehatan
5.	BAPPPEDA	Perencanaan
6.	DPMPTSP	Perijinan untuk Praktek
7.	BKAD	Dukungan Anggaran
8.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

**SMD – 01.03 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**



**Keterangan :**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

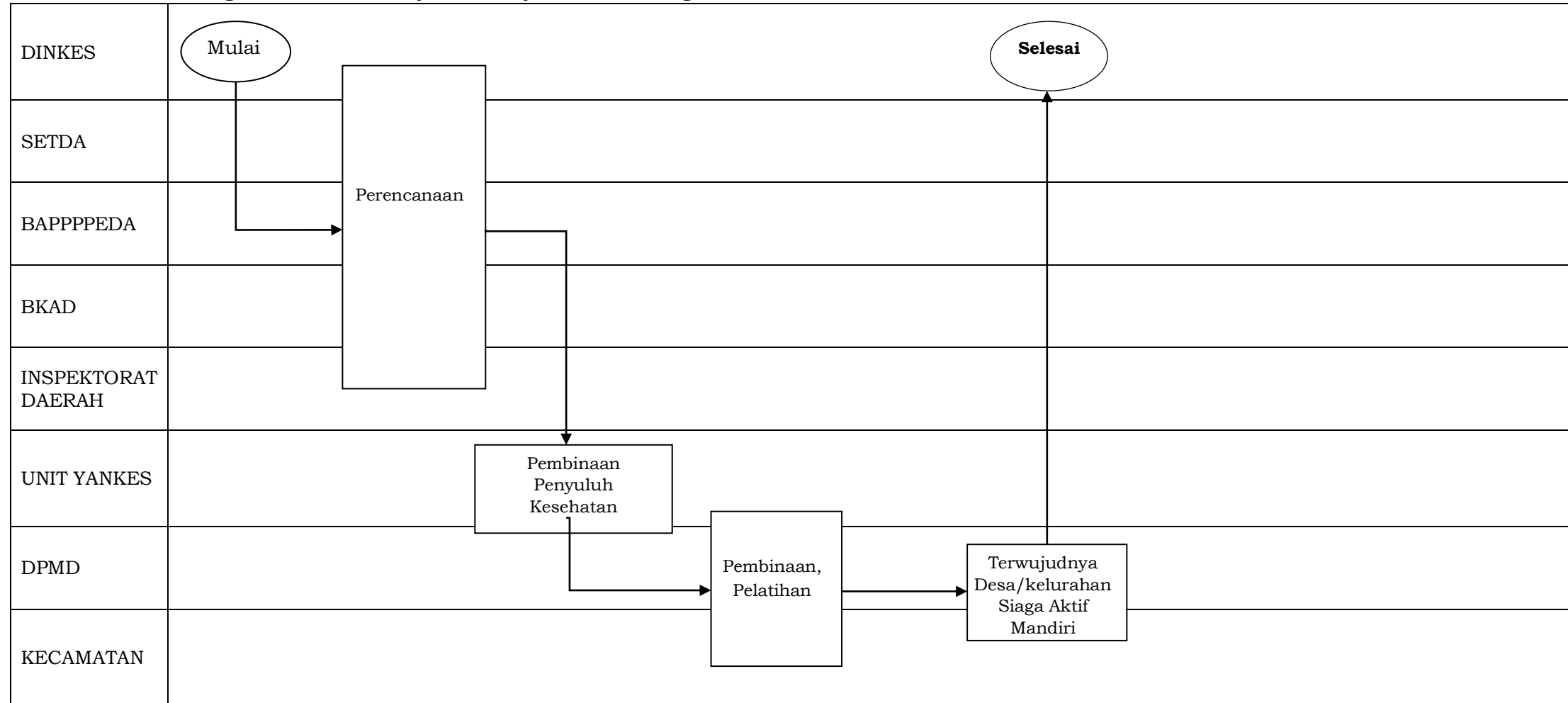
SMD – 01.03 Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DINKES	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi, evaluasi dan Pengawasan
5.	RSUD	Pelaksana Pelayanan Kesehatan
6.	UNIT YANKES	Pelaksana Pelayanan Kesehatan
7.	DPMPTSP	Penerbitan perijinan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SMD – 01.04 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan





**Keterangan :**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

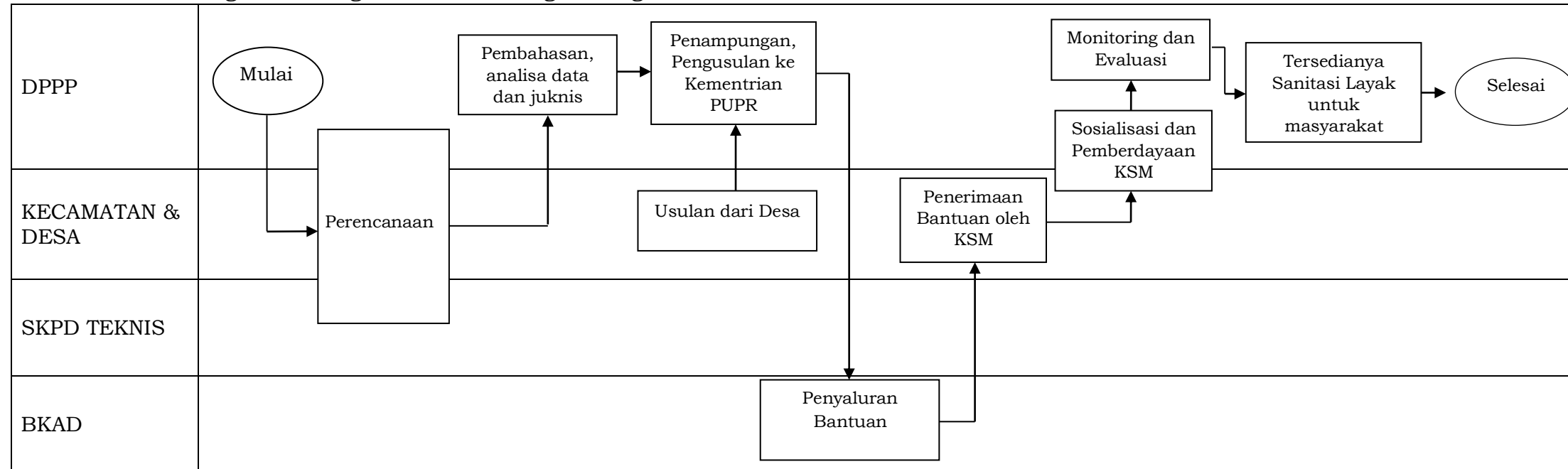
SMD – 01.04 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DINKES	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi, Evaluasi dan Pengawasan
6.	UNIT YANKES	Penyedia Tenaga Kesehatan
7.	DPMD	Penyedia Data Desa Mandiri
8.	KECAMATAN	Fasilitator desa

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SMD – 01.05 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



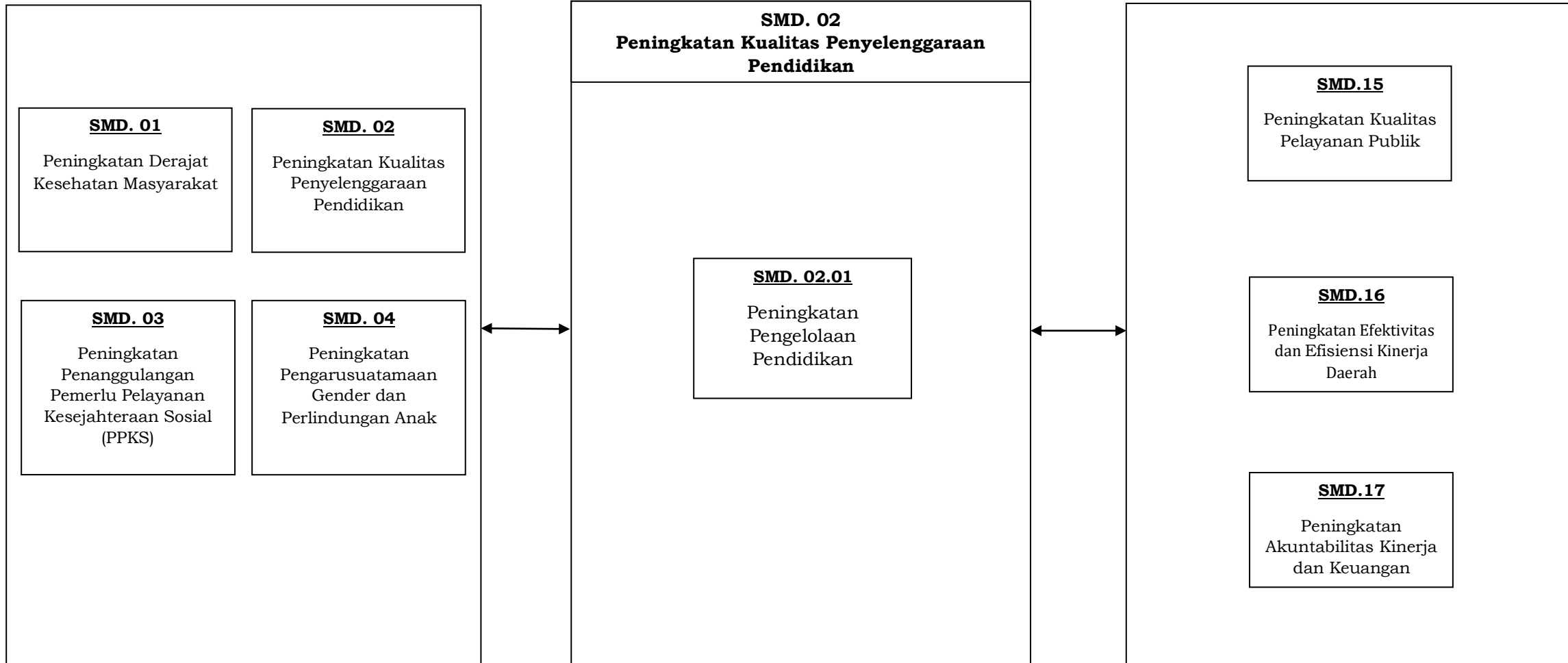
**Keterangan :**

**CFM 01 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

SMD – 01.05 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPP	Penanggung Jawab
2.	DESA	Pengusulan dan Penerima Hasil
3.	SKPD TEKNIS	Pokja AMPL
4.	BKAD	Fasilitasi Pencairan Bantuan

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**





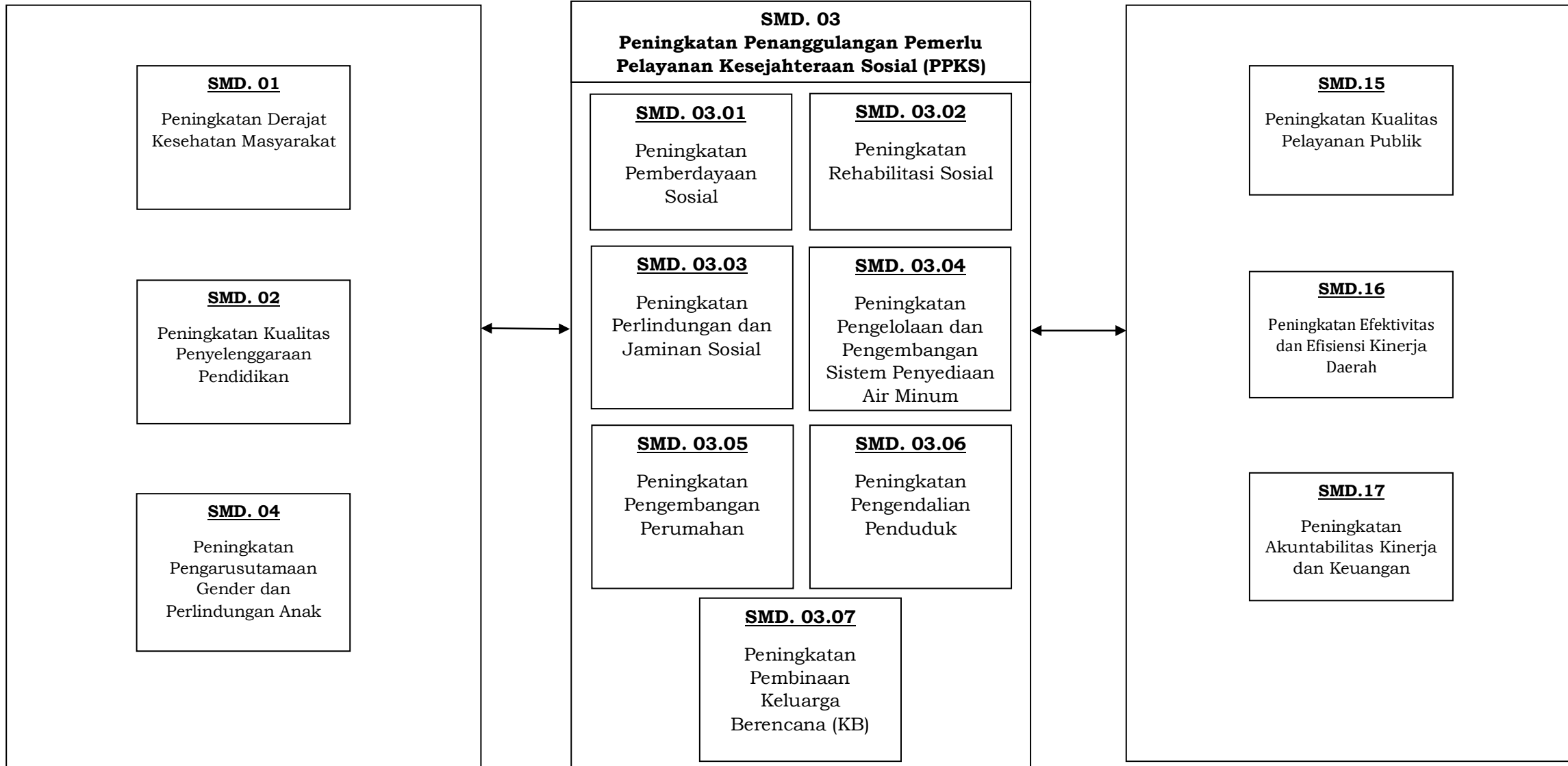
**Keterangan :**

**CFM 02 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan**

SMD – 02.01 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DISDIK	Penanggung Jawab
3.	DPPP	Peningkatan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	BKAD	Dukungan Anggaran
6.	KECAMATAN	Fasilitator Kewilayahan
7.	BKPSDM	Penyediaan Tenaga Pengajar Kompeten, Pelaksanaan Diklat Tenaga Pengajar
8.	DISKOMINFO	Dukungan Sistem Informasi
9.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**







**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

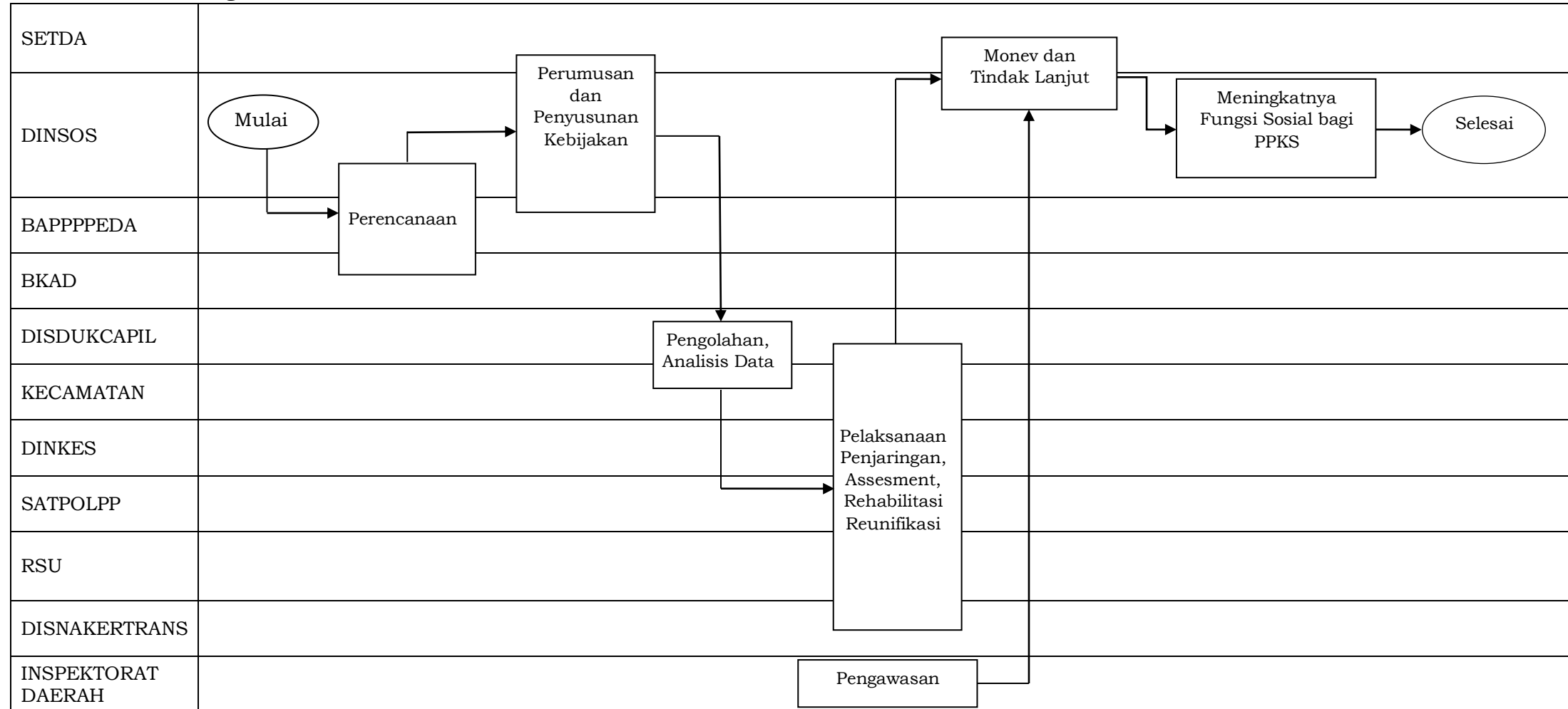
SMD – 03.01 Peningkatan Pemberdayaan Sosial

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DINSOS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	DPP	Data Kelompok
5.	DPP	Data Kelompok
6.	DPMPD	Data Desa Lokus Stunting
7.	DPPP	Data Rutilahu
8.	DKPP	Data UMKM
9.	DISDUKCAPIL	Data Penduduk
10.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah,
11	DINKES	Data Kesehatan
12	DISDIK	Data Pendidikan
13	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan, Pembinaan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.02 Peningkatan Rehabilitasi Sosial



**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.02 Peningkatan Rehabilitasi Sosial

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DINSOS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	DISDUKCAPIL	Data penduduk
6.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah
7.	DINKES	Dukungan Tenaga Medis
8.	SATPOLPP	Pelaksana Lapangan
9.	RSU	Penanganan Rehabilitasi
10.	DISNAKERTRANS	Dukungan Pelatihan peserta rehabilitasi
11.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan Pembinaan



**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

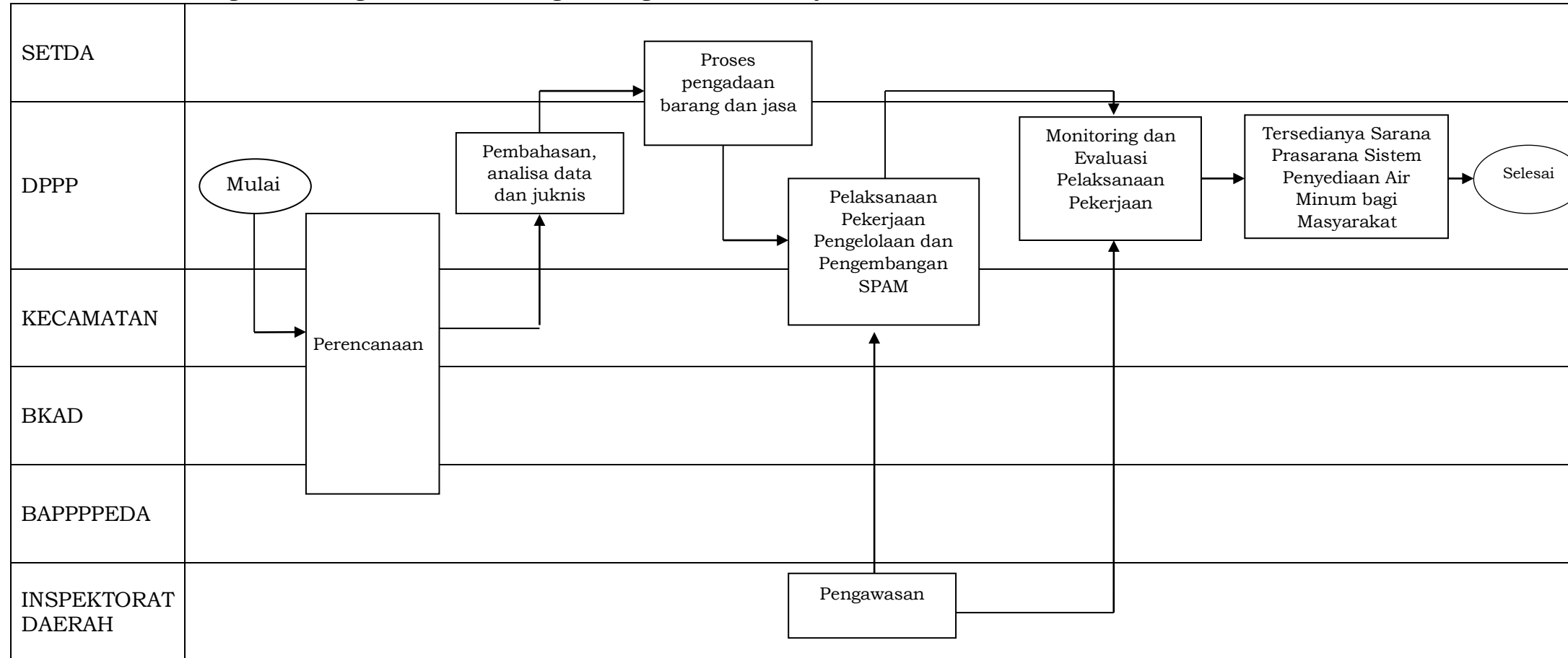
SMD – 03.03 Perlindungan Dan Jaminan Sosial

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DINSOS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	DISDUKCAPIL	Data penduduk
6.	KECAMATAN	Verifikasi usulan
7.	DPUTR	Pendampingan bidang infrastruktur
8.	DPPP	Pendampingan bidang Perumahan dan Pemukiman
9.	DINKES	Pendampingan bidang Kesehatan
10.	RSUD	Pendampingan bidang Kesehatan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.04 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

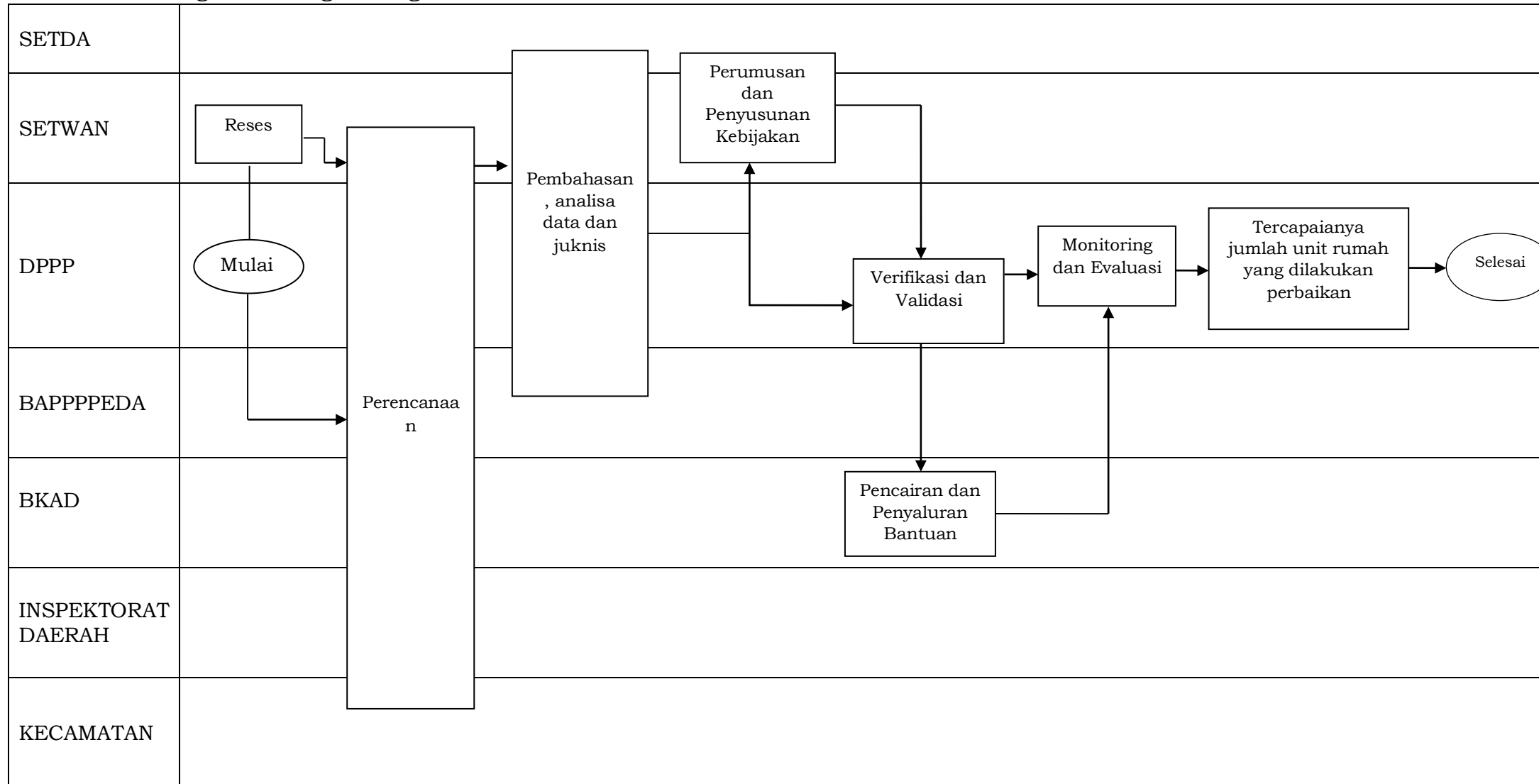
SMD – 03.04 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan Kebijakan
2.	DPPP	Penanggung Jawab
3.	KECAMATAN	Fasilitator Kewilayahan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	BAPPPEDA	Perencanaan
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.05 Peningkatan Pengembangan Perumahan





**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

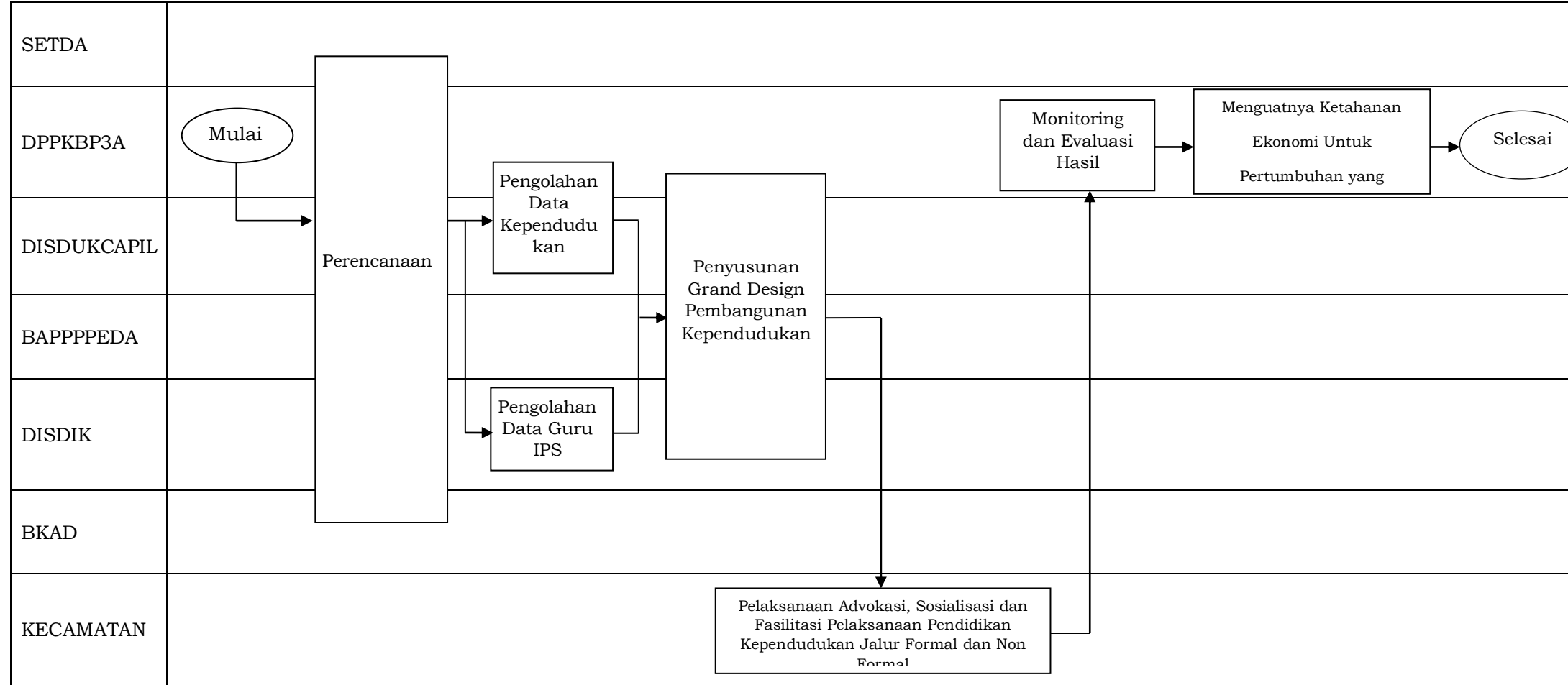
SMD – 03.05 Peningkatan Pengembangan Perumahan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	SETWAN	Reses dan Perencanaan
3.	DPPP	Penanggungjawab
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	BKAD	Dukungan Anggaran
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
7.	KECAMATAN	Fasilitator usulan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.06 Peningkatan Pengendalian Penduduk



**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.06 Peningkatan Pengendalian Penduduk

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
3.	DISDUKCAPIL	Data Kependudukan
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	DISDIK	Data Tenaga Kependidikan
6.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
7.	KECAMATAN	Fasilitator



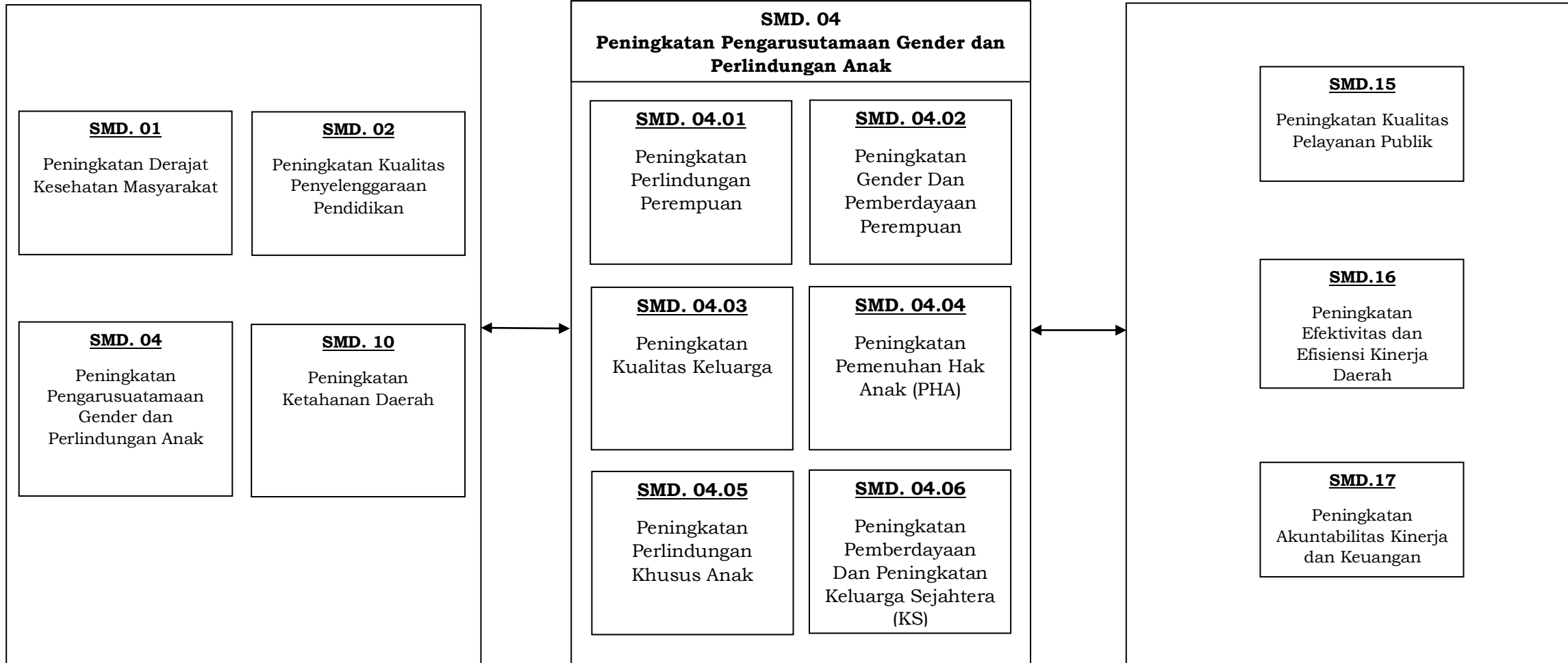
**Keterangan :**

**CFM 03 Peningkatan Penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

SMD – 03.07 Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
3.	KECAMATAN	Fasilitator
4.	DISKOMINFO	Dukungan Teknologi Informasi
5.	BAPPPEDA	Perencanaan
6.	BKAD	Fasilitasi Anggaran

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**





**Keterangan :**

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

SMD – 04.01 Peningkatan Perlindungan Perempuan

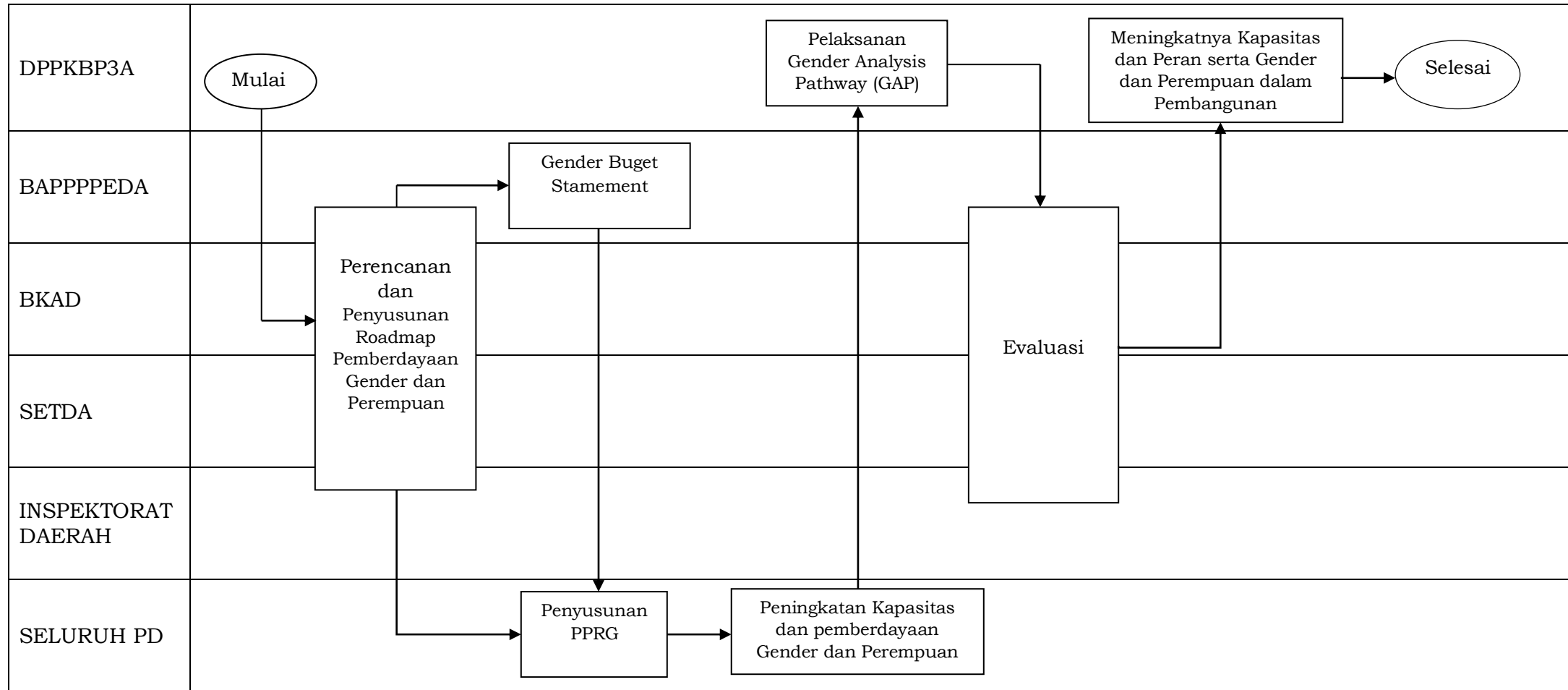
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	DINSOS	Data Sosial Kemasyarakatan
4.	KECAMATAN	Fasilitator dan Koordinator Wilayah
5.	BKAD	Perencanaan Anggaran
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi
7.	BAPPPEDA	Perencanaan



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

SMD – 04.02 Peningkatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



**Keterangan :**

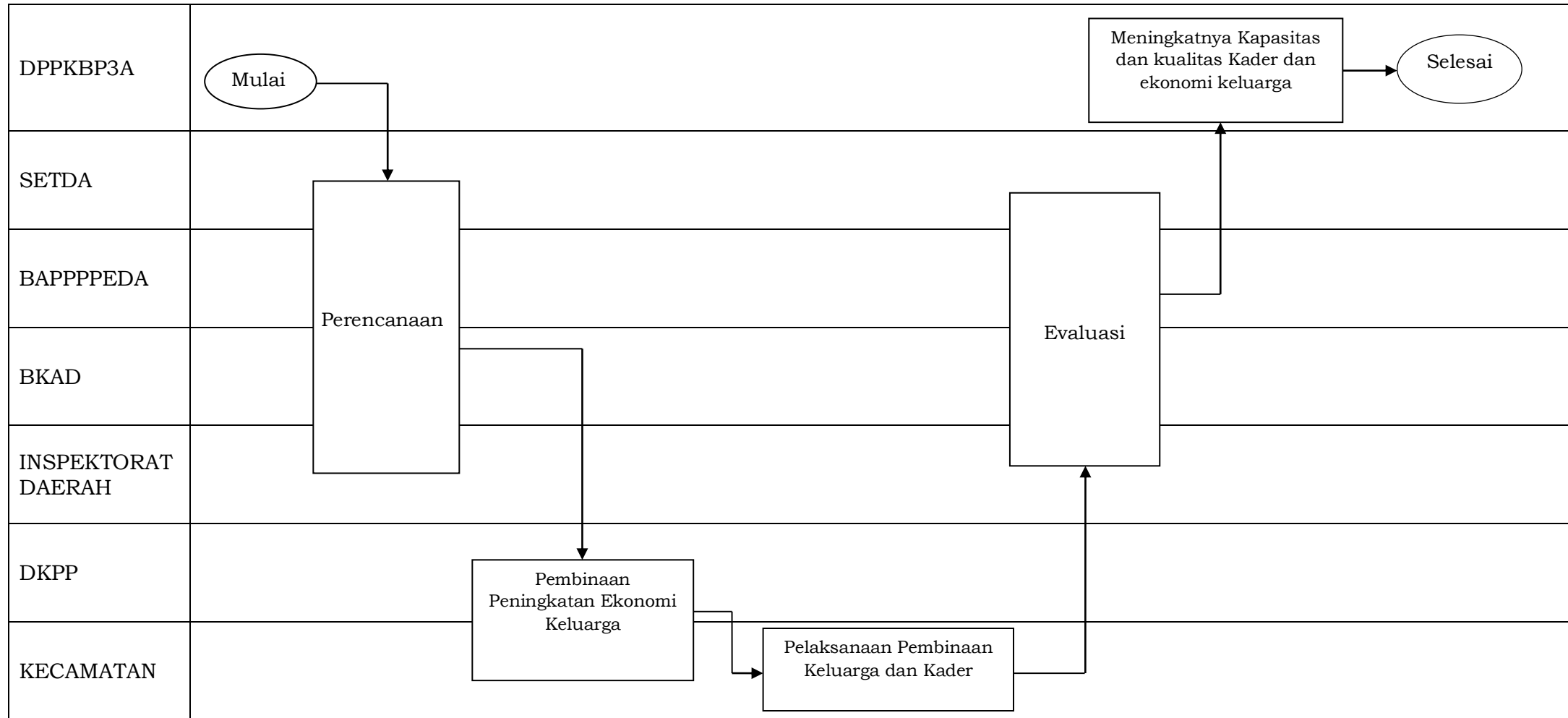
CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak  
SMD – 04.02 Peningkatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
4.	SETDA	Perumusan Kebijakan
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Evaluasi Pembangunan
6.	SELURUH PD	Pelaksana

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

SMD – 04.03 Peningkatan Kualitas Keluarga



**Keterangan :**

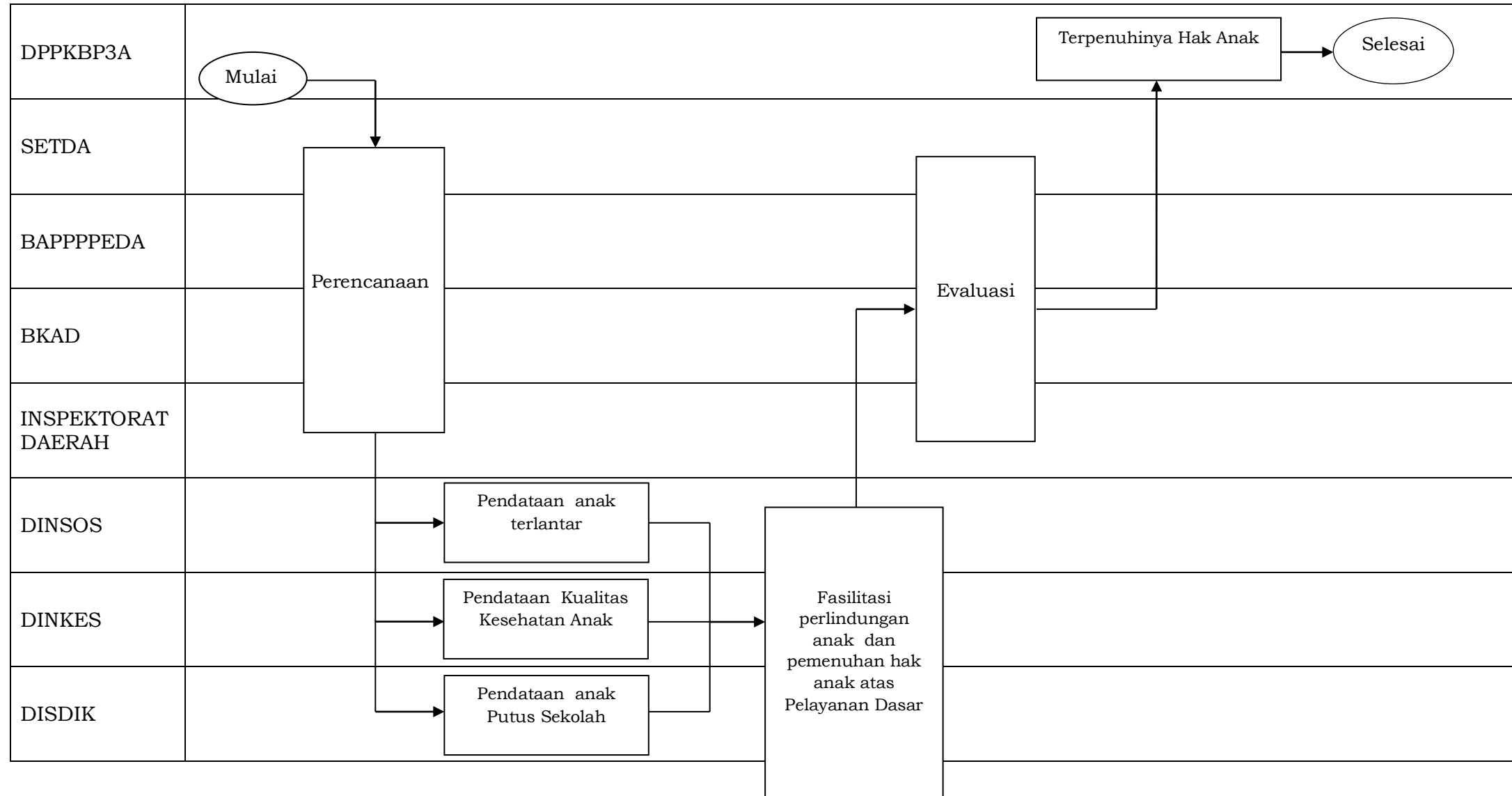
CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak  
SMD – 04.03 Peningkatan Kualitas Keluarga

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DKPP	Fasilitasi dan Pelaksanaan Pembinaan Ekonomi Keluarga melalui UMKM
7.	KECAMATAN	Fasilitasi Kader KB dan KS dan Pra KS

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak**

SMD – 04.04 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)



KECAMATAN	
-----------	--

**Keterangan :**

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak  
SMD – 04.04 Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DINSOS	Pendataan Anak Terlantar
7.	DINKES	Pendataan Kesehatan Anak
8.	DISDIK	Pendataan Anak Putus Sekolah
9.	KECAMATAN	Fasilitator Wilayah



**Keterangan :**

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak  
SMD – 04.05 Peningkatan Perlindungan Khusus Anak

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	DINSOS	Dukungan Data Sosial
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan





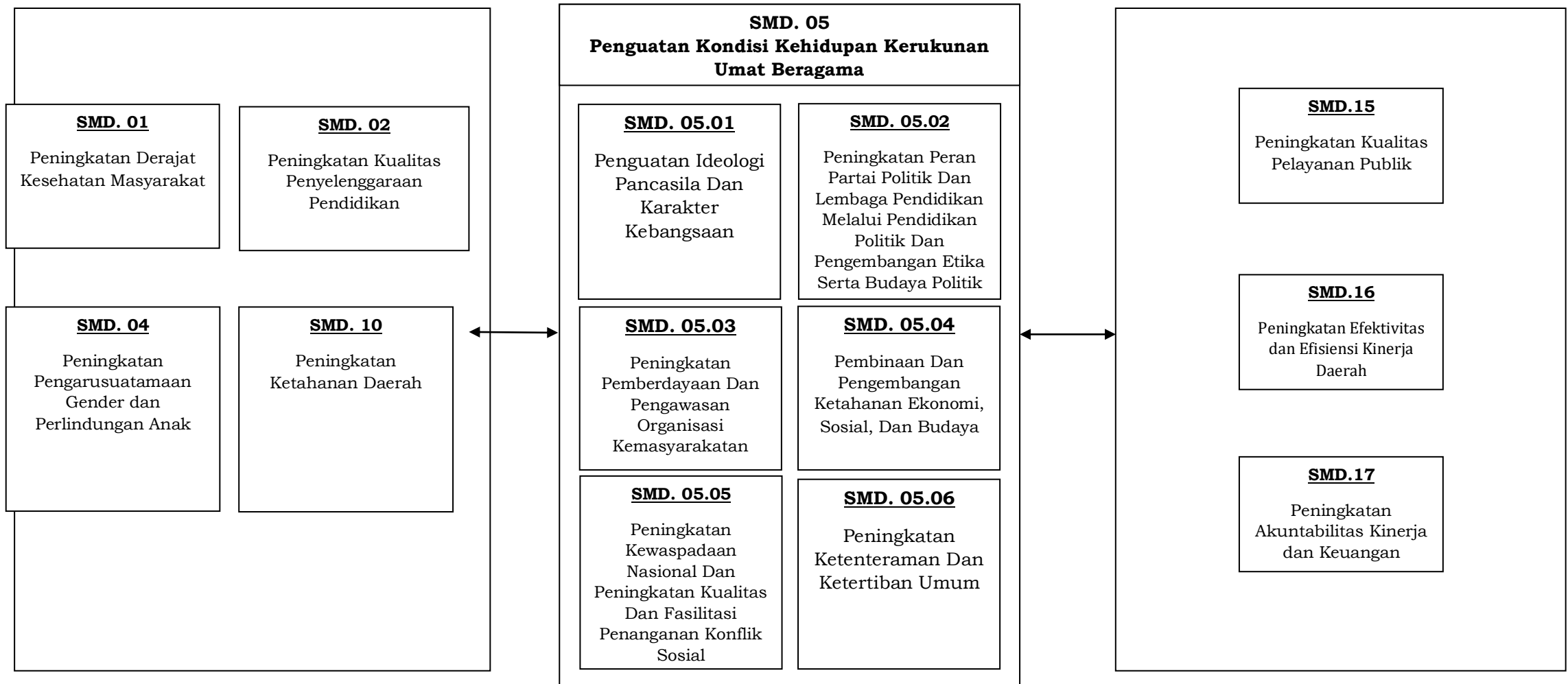
**Keterangan :**

CFM 04 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

SMD – 04.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

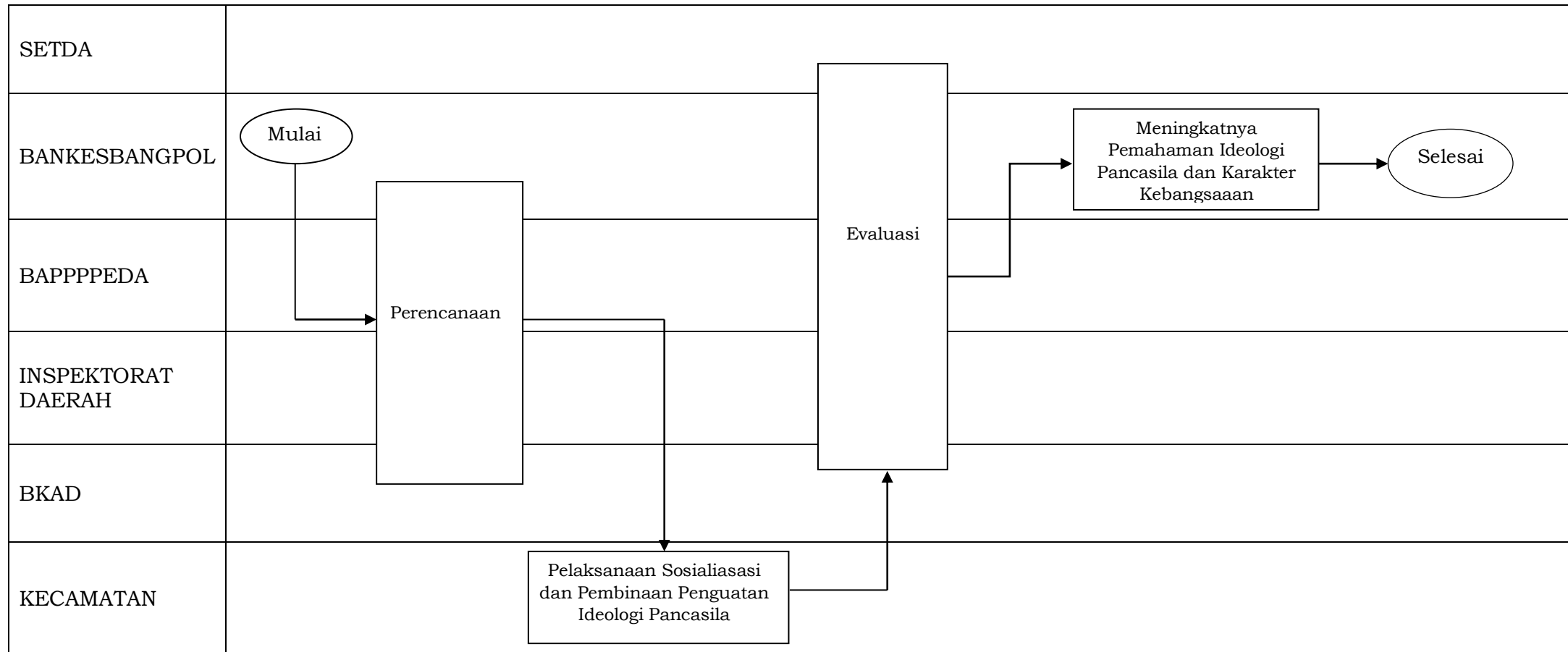
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPKBP3A	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	DINSOS	Dukungan Data Bantuan Sosial
4.	KECAMATAN	Fasilitasi Program
5.	BKAD	Perencanaan Anggaran
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
7.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama**  
SMD – 05.01 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan



**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama  
SMD – 05.01 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi Kinerja
2.	BANKESBANGPOL	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
5.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah
6.	DISKOMINFO	Dukungan Sistem Informasi
7.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja



**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama

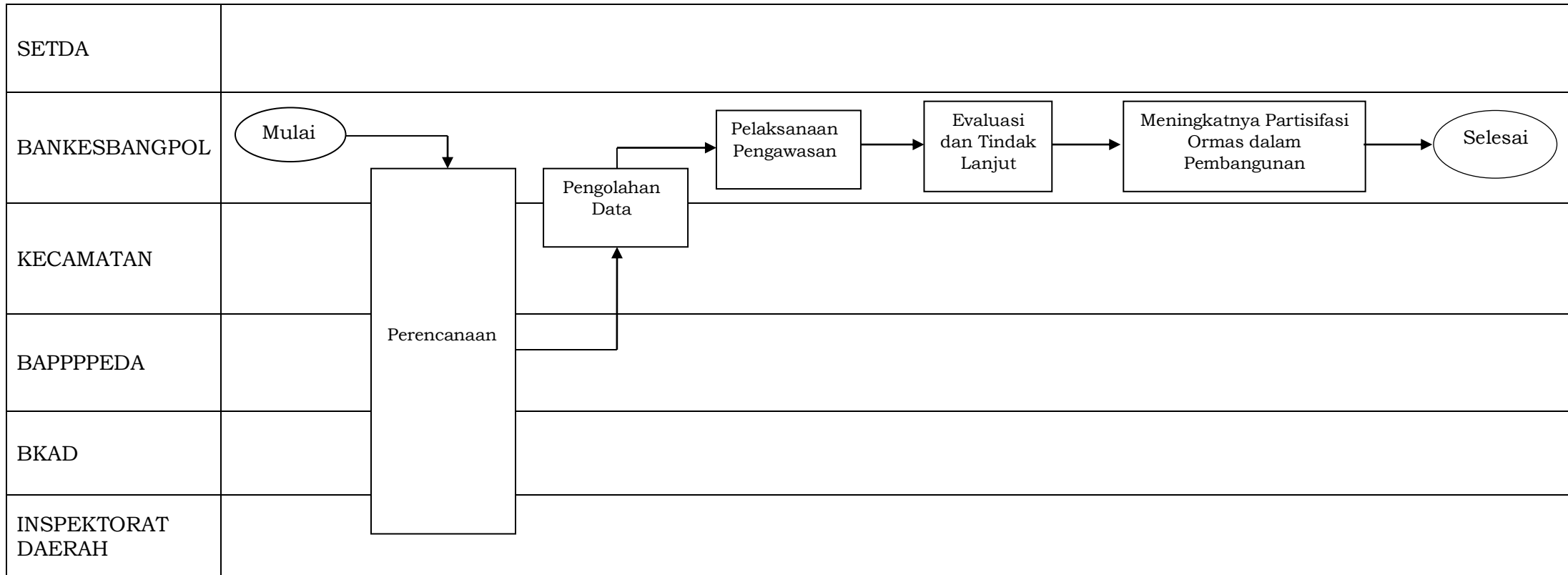
SMD – 05.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	BANKESBANGPOL	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi
4.	BKAD	Verifikasi Bantuan dan Dukungan Anggaran
5.	SETWAN	Data Anggota DPRD
6.	SETDA	Evaluasi Kinerja
7.	DISKOMINFO	Sistem Informasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama**

SMD – 05.03 Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan





**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama

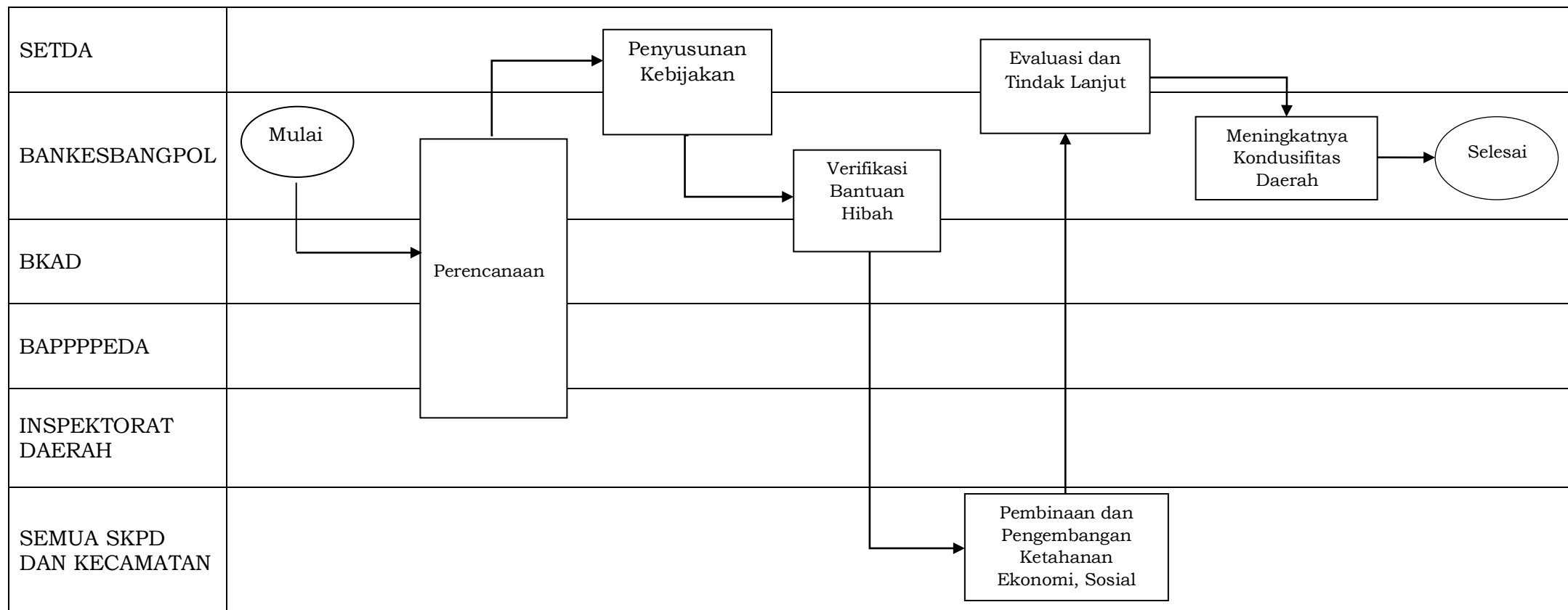
SMD – 05.03 Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi Kinerja
2.	BANKESBANGPOL	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
5.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Kinerja

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama**

SMD – 05.04 Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama

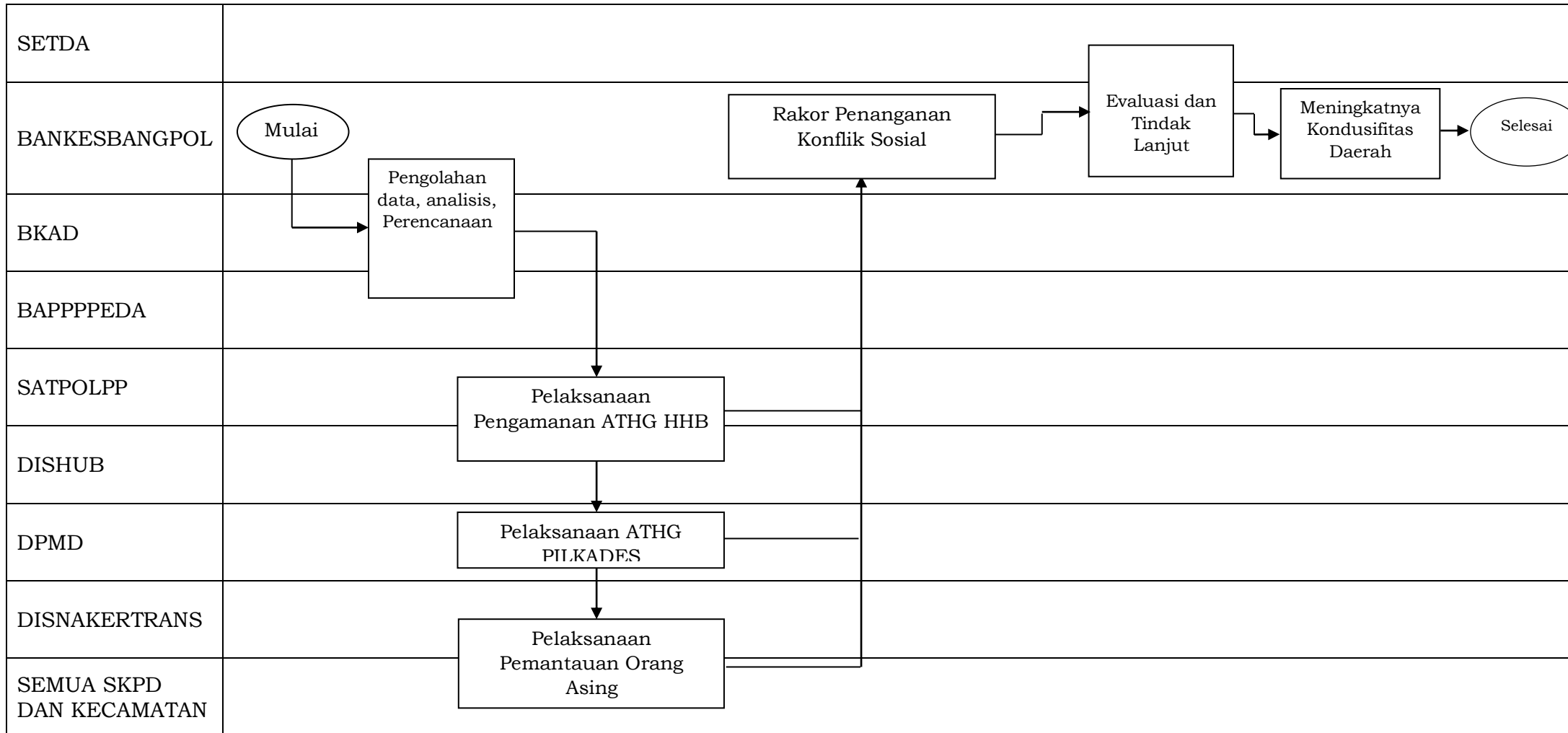
SMD – 05.04 Peningkatan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	BANKESBANGPOL	Penanggung Jawab
3.	BKAD	Virifikasi Bantuan Hibah
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	SEMUA SKPD DAN KECAMATAN	Peserta
6.	DISKOMINFO	Dkungan TI
7.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama**

SMD – 05.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial



**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama

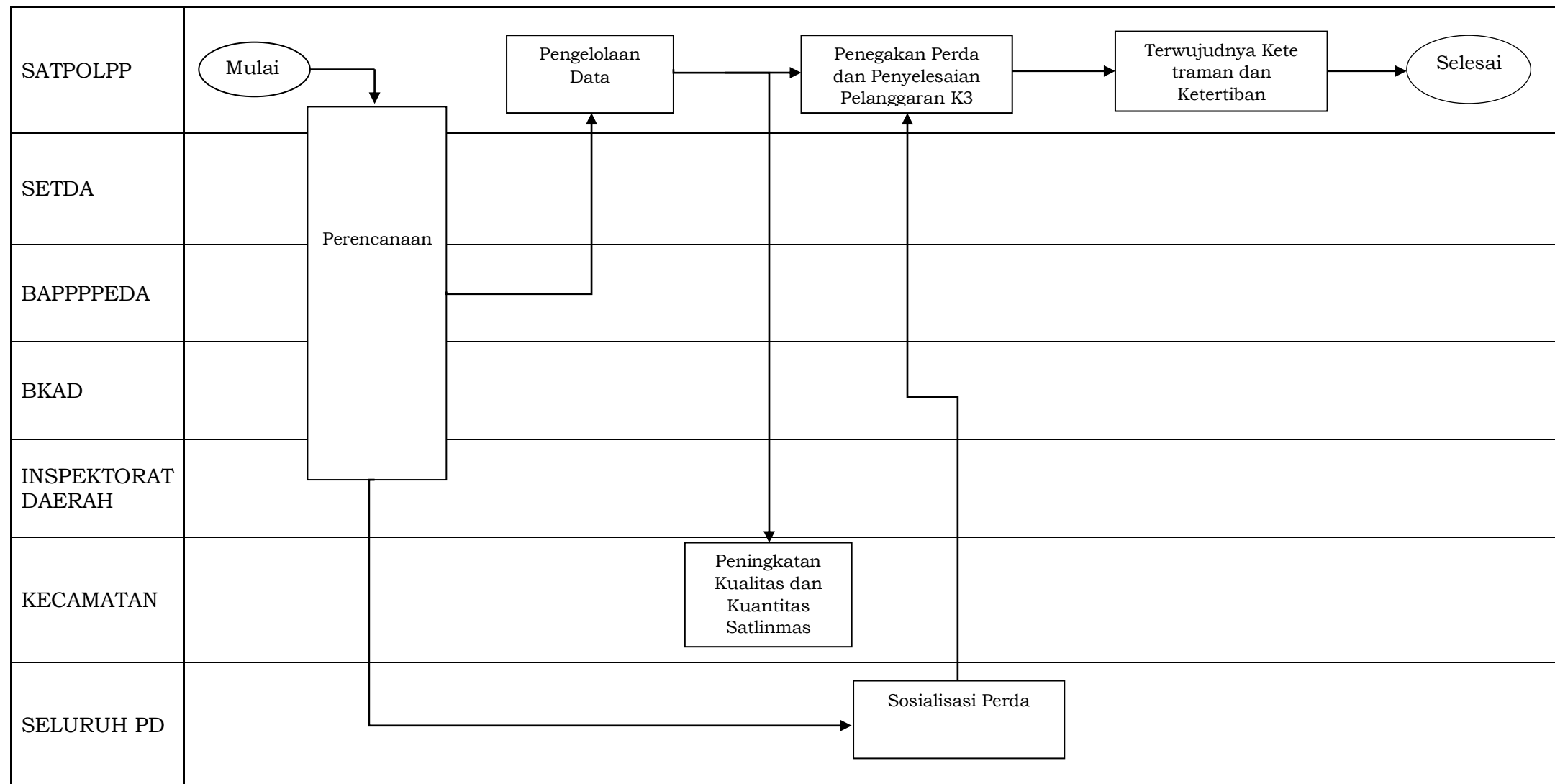
SMD – 05.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi
2.	BANKESBANGPOL	Penanggung Jawab
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	SATPOLPP	Pengamanan ATHG HHB
6.	DISHUB	Pengamanan ATHG HHB
7.	DPMD	Penyelenggaraan PILKADES
8.	DISNAKERTRANS	Pemantauan Orang Asing
9.	SEMUA SKPD DAN KECAMATAN	Pemantauan Orang Asing

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama**

SMD – 05.06 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum



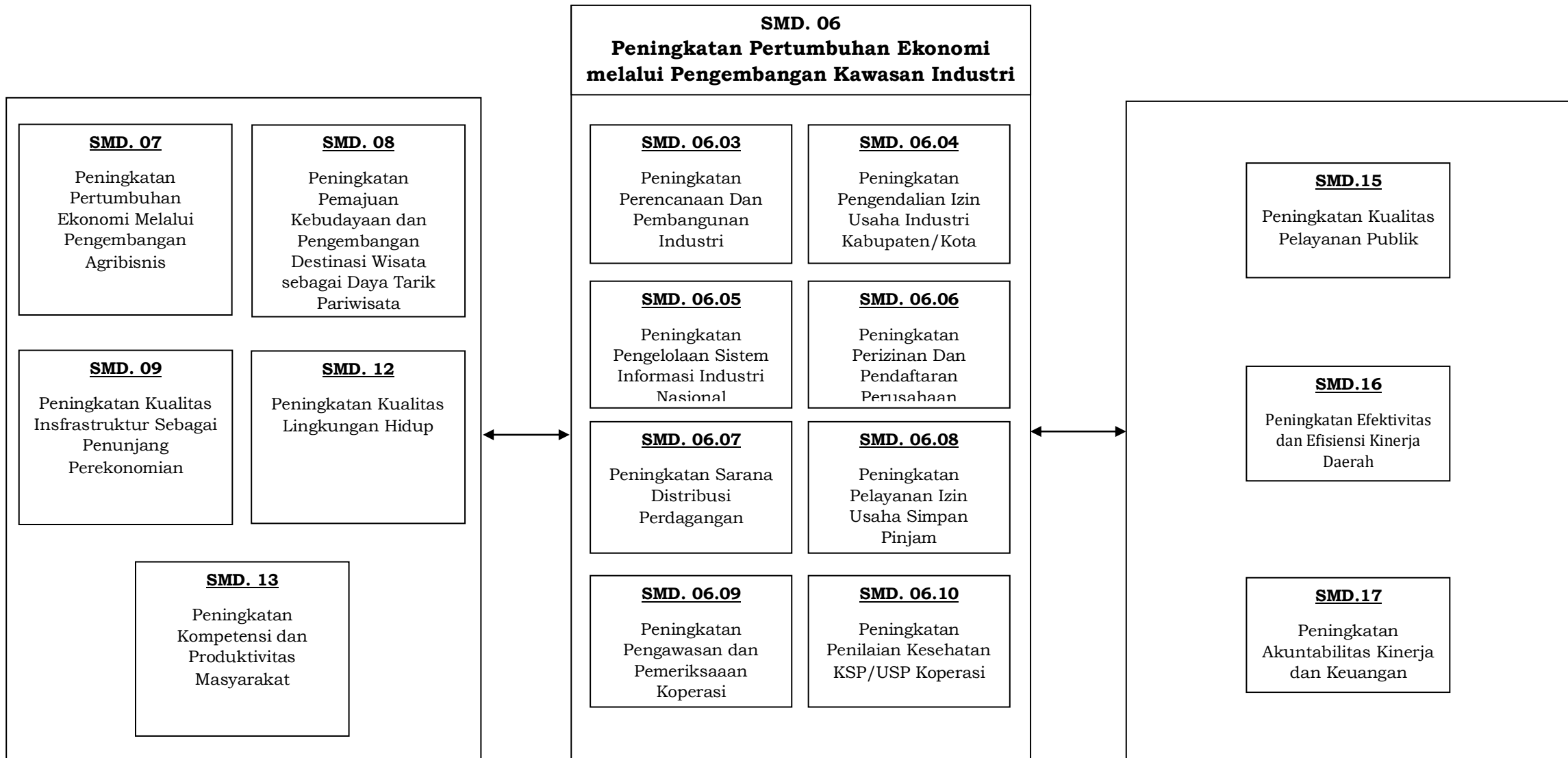
**Keterangan :**

CFM 05 Penguatan Kondisi Kehidupan Kerukunan Umat Beragama

SMD – 05.06 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SATPOLPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan dan Pengesahan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi Program
6.	KECAMATAN	Fasilitasi kewilayahan
7.	SELURUH PD	Peserta

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**

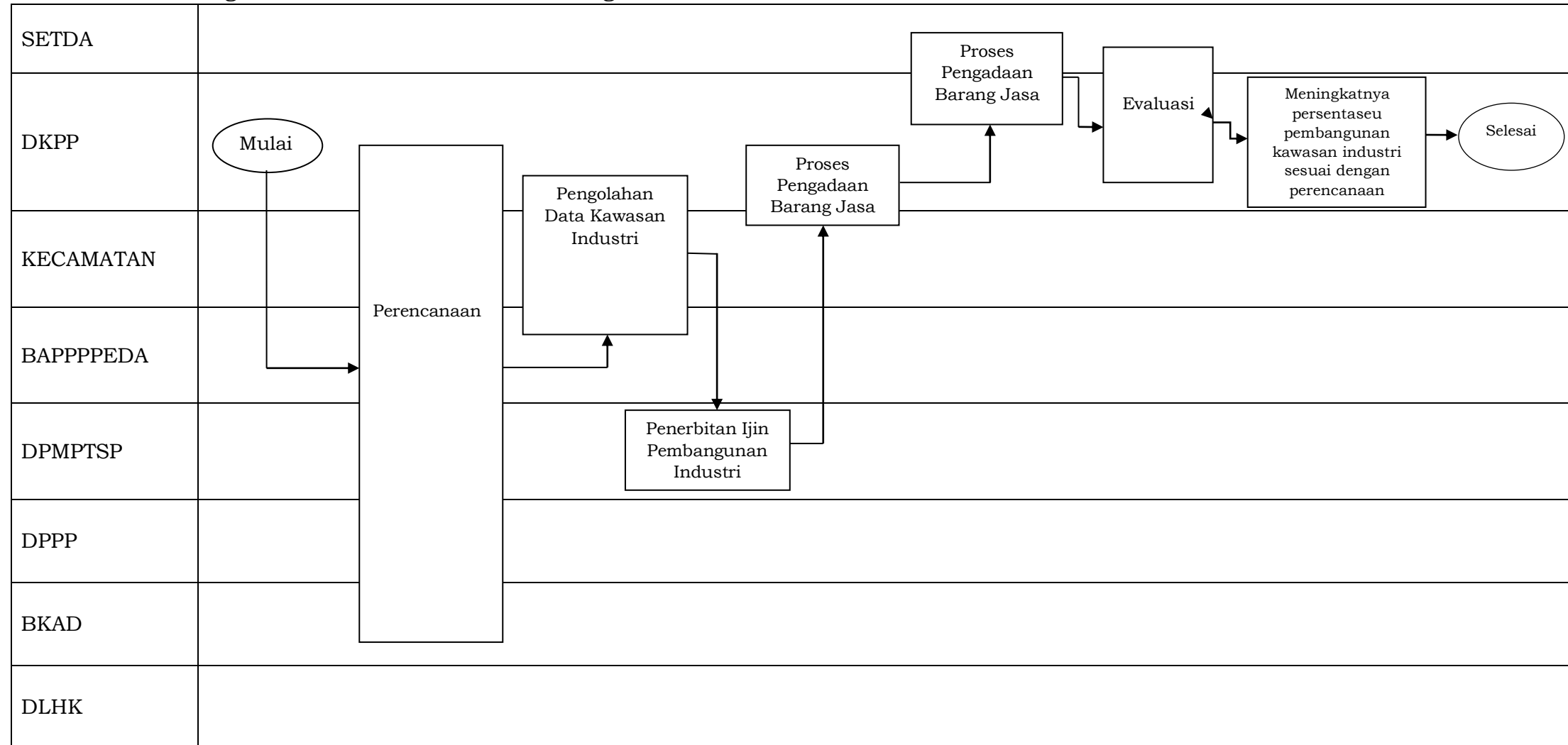




**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.01 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri



**Keterangan :**

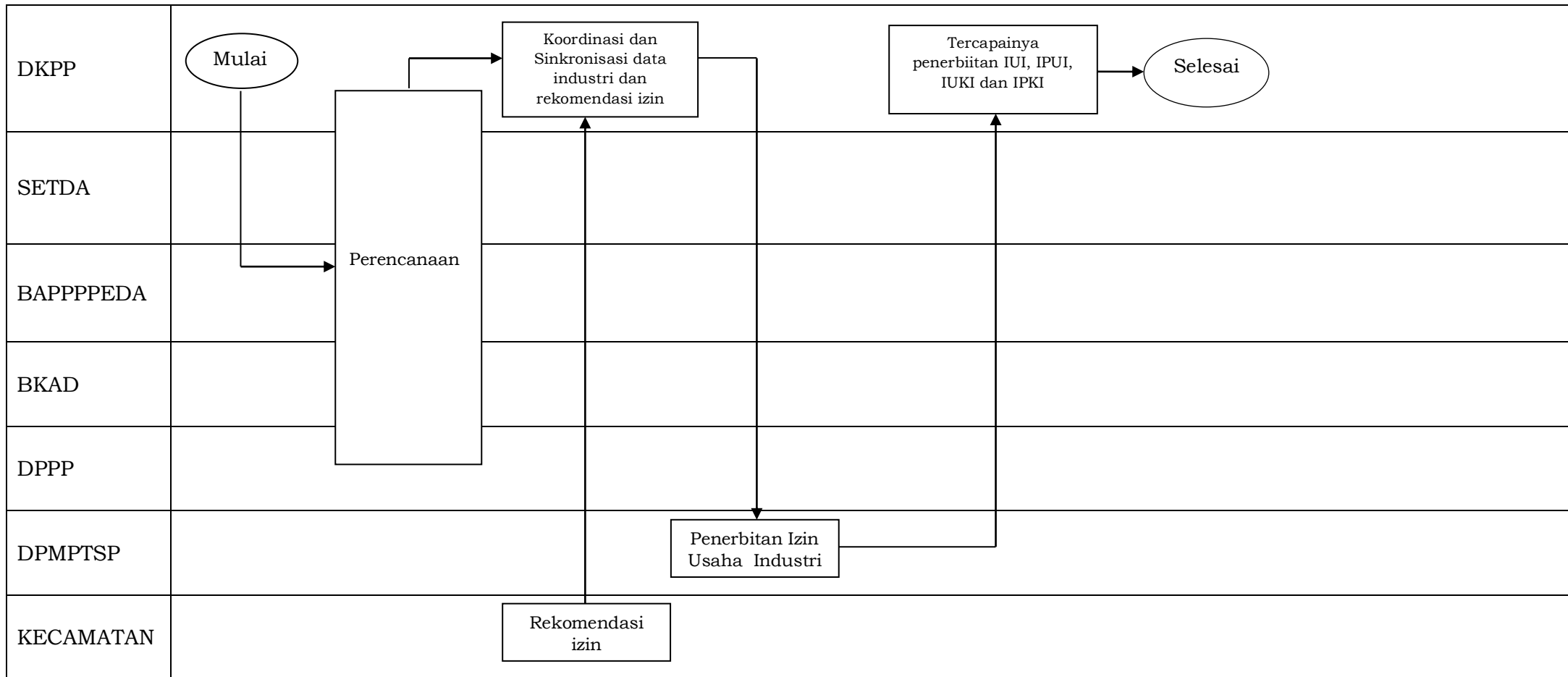
**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.01 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DKPP	Penanggung Jawab
3.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	DPMPTSP	Penerbitan Perizinan
6.	DPPP	Data Industri
7.	BKAD	Dukungan Anggaran
8.	DLHK	Data Lingkungan
9.	BKAD	Dukungan Anggaran

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**  
 SMD – 06.02 Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

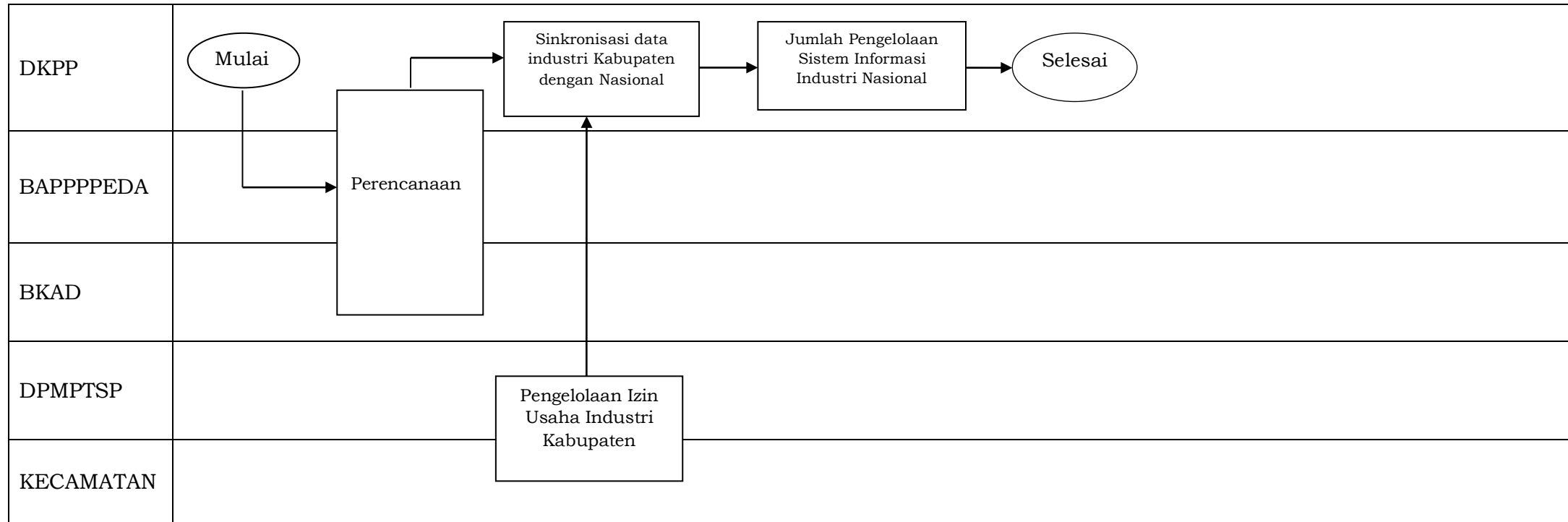
SMD – 06.02 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	DPPP	Data penduduk
6.	DPMPTSP	Penerbitan Perijinan
7.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.03 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

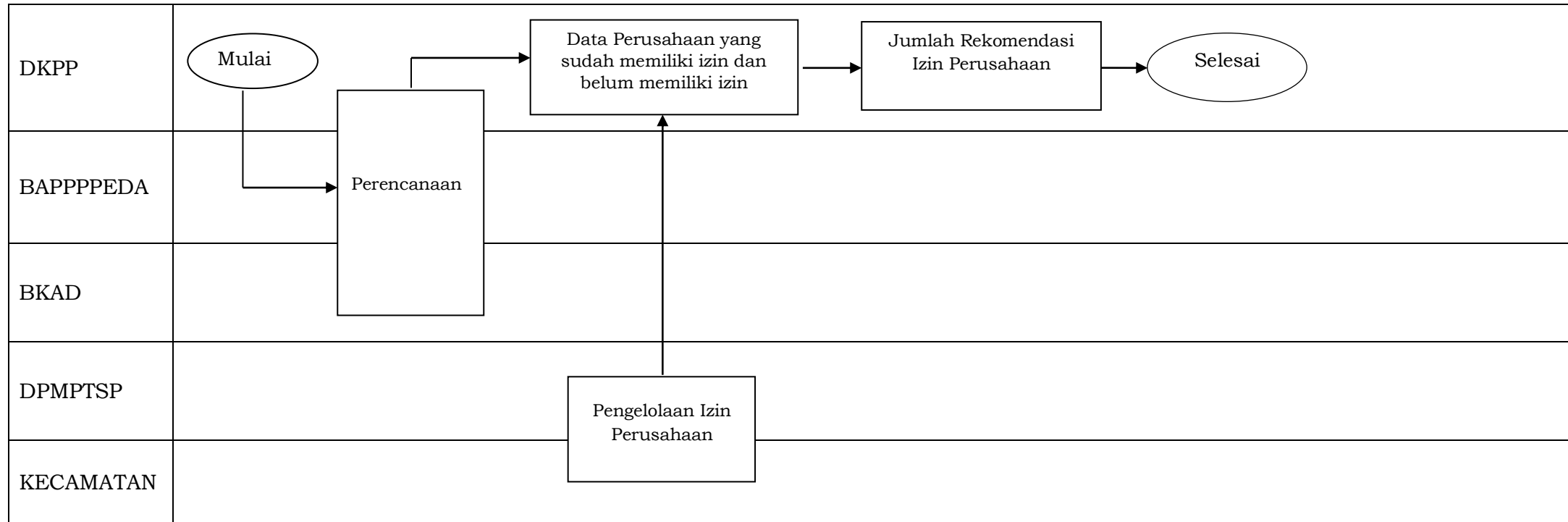
SMD – 06.03 Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DPMPTSP	Penerbitan Perizinan
5.	KECAMATAN	Rekomendasi Izin Usaha

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.04 Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.04 Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

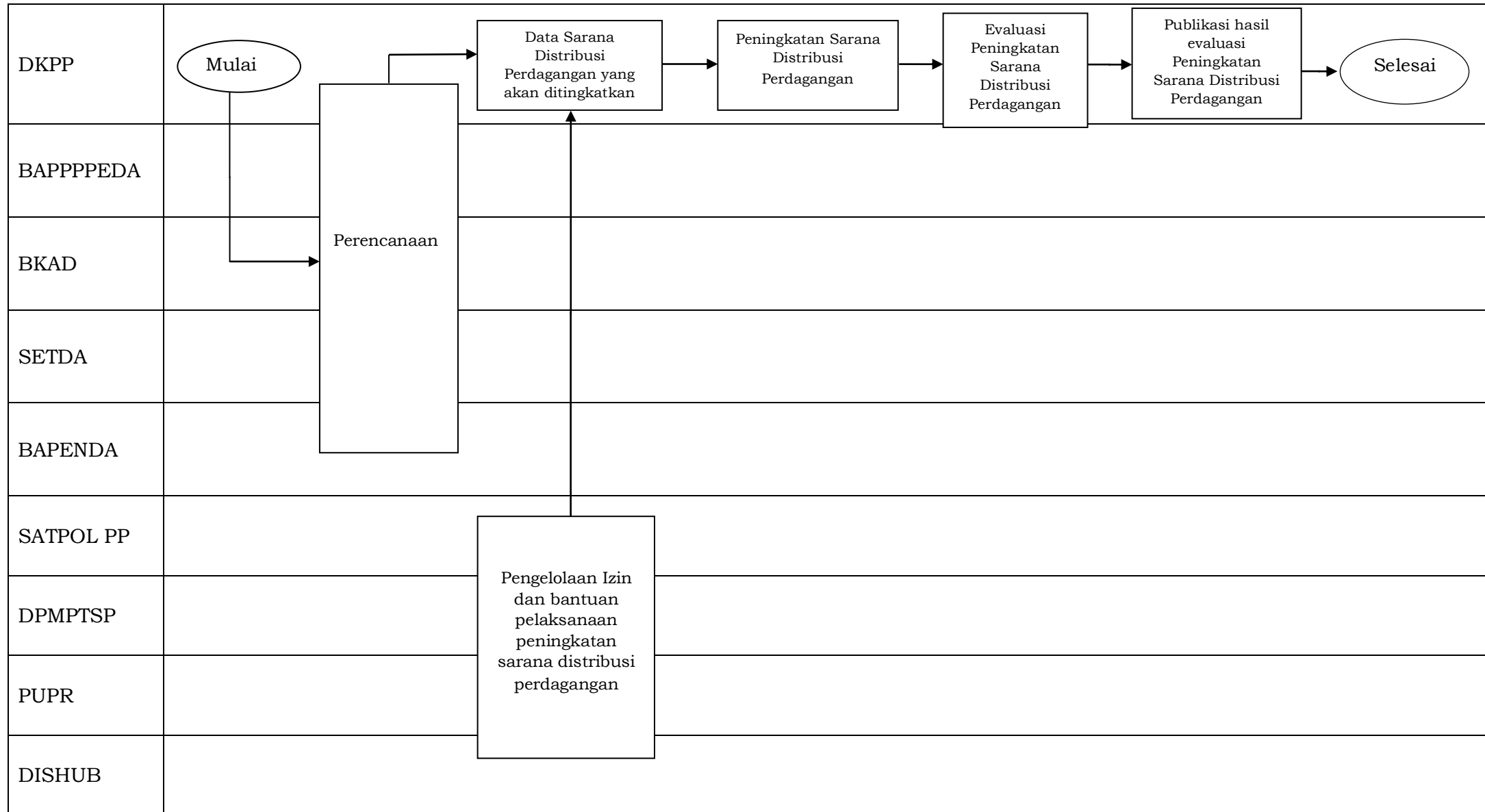
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DPMPTSP	Penerbitan Perizinan
5.	KECAMATAN	Rekomendasi Izin Usaha



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

**SMD – 06.05 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

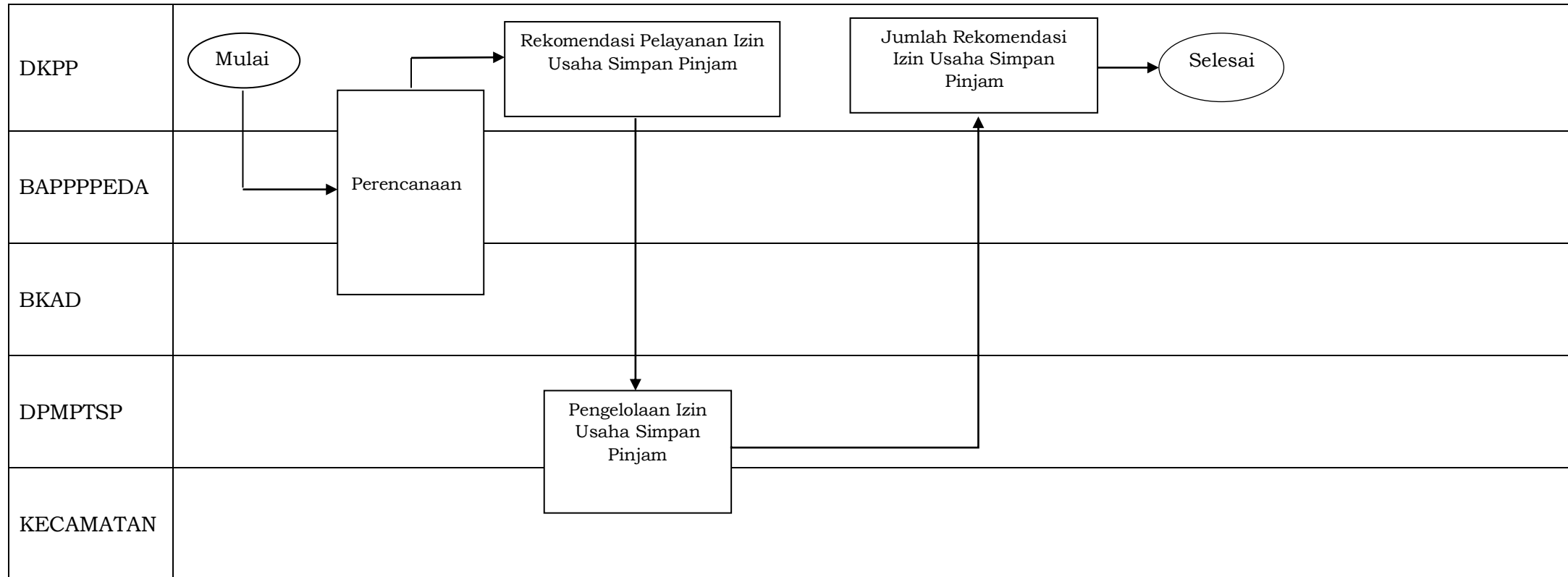
SMD – 06.05 Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran dan Pengelolaan BMD
4.	SETDA	Dukungan Pengelolaan BMD dan Dasar Hukum
5.	BAPENDA	Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah dari BMD
6.	SATPOL PP	Dukungan Pengamanan Massa
7.	DPMPTSP	Dukungan Perizinan
8.	PUPR	Dukungan Tata Bangunan
9.	Dishub	Dukungan Penertiban Jalan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.06 Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

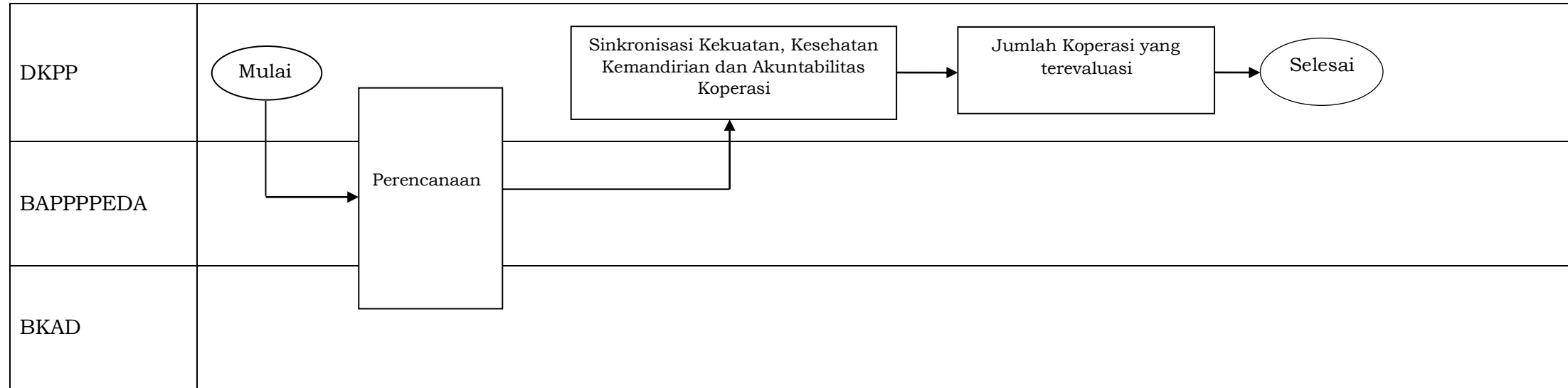
SMD – 06.06 Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DPMPTSP	Penerbitan Perizinan
5.	KECAMATAN	Rekomendasi Izin Usaha

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.07 Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



**Keterangan :**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

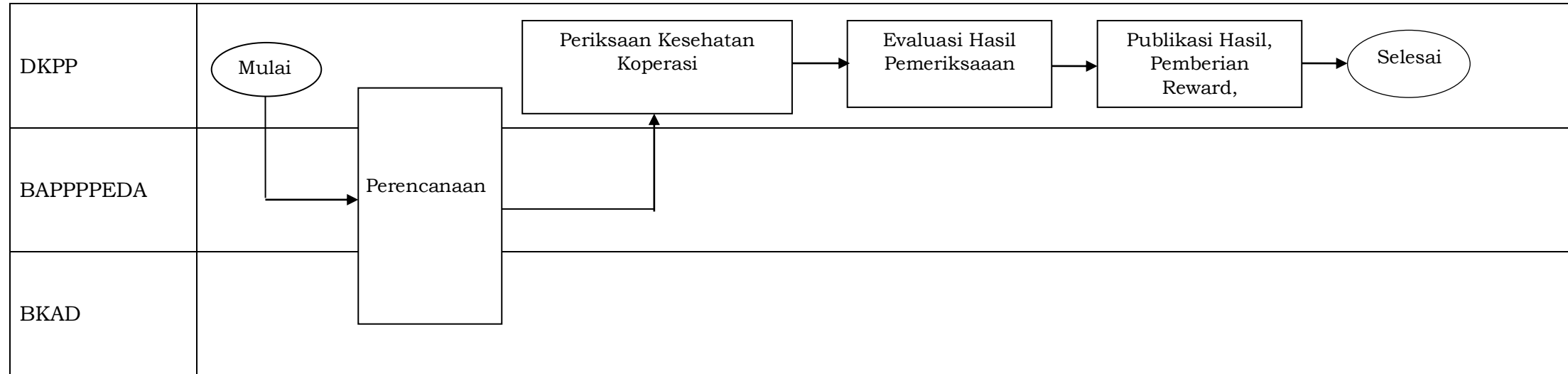
SMD – 06.07 Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.08 Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



**Keterangan :**

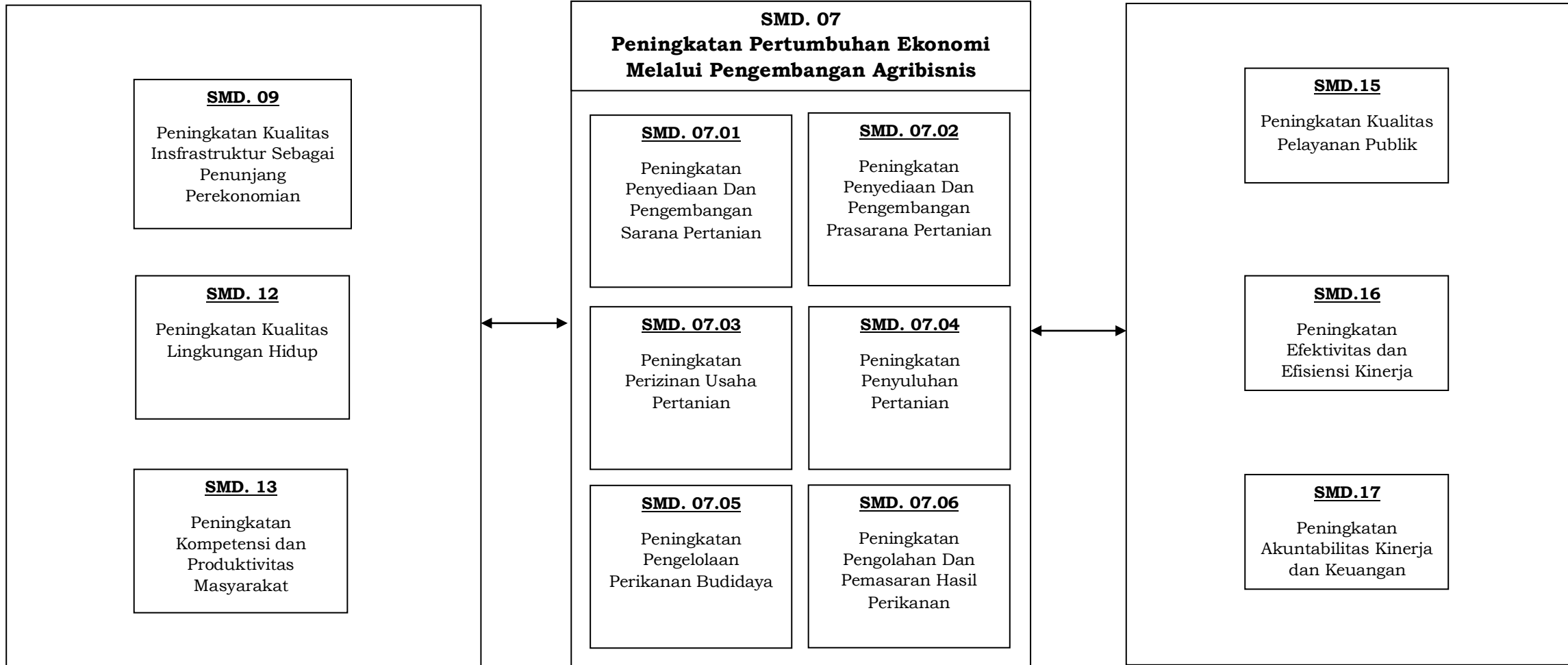
**CFM 06 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Kawasan Industri**

SMD – 06.08 Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran



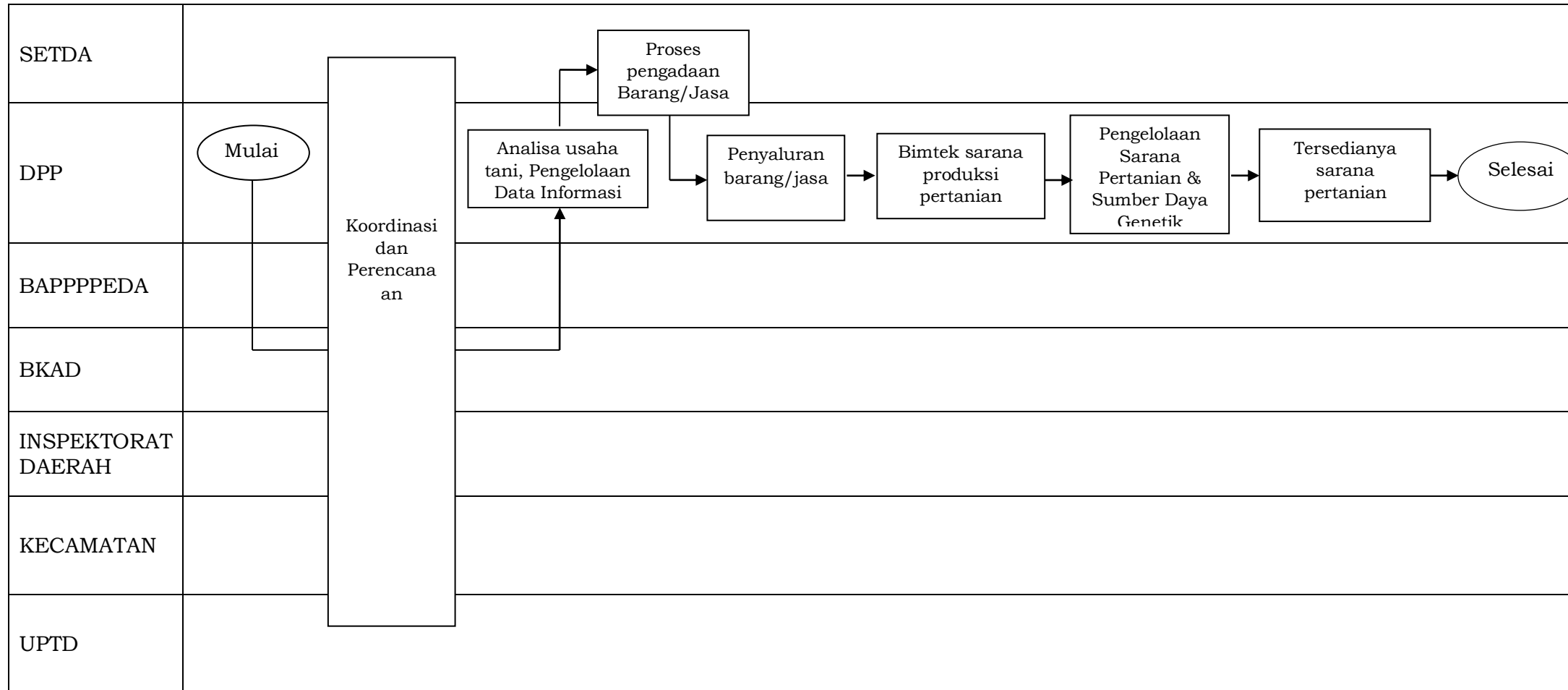
**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.01 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian



**Keterangan :**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

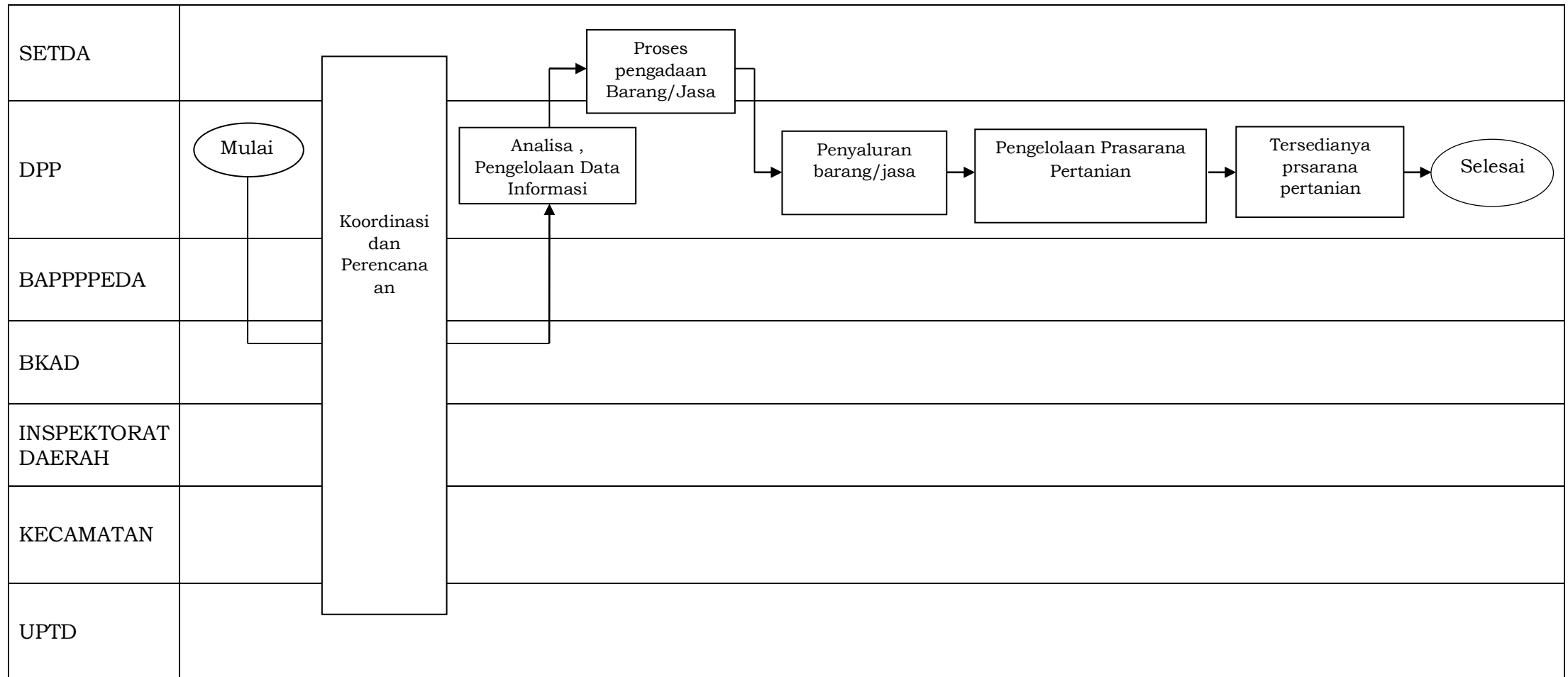
SMD – 07.01 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perencanaan, Verifikasi pengadaan barang jasa dan monitoring
2.	DPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
6.	KECAMATAN	Koordinator dan Fasilitator wilayah
7.	UPTD	Supervisi dan tenaga operasional

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.02 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian



**Keterangan :**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

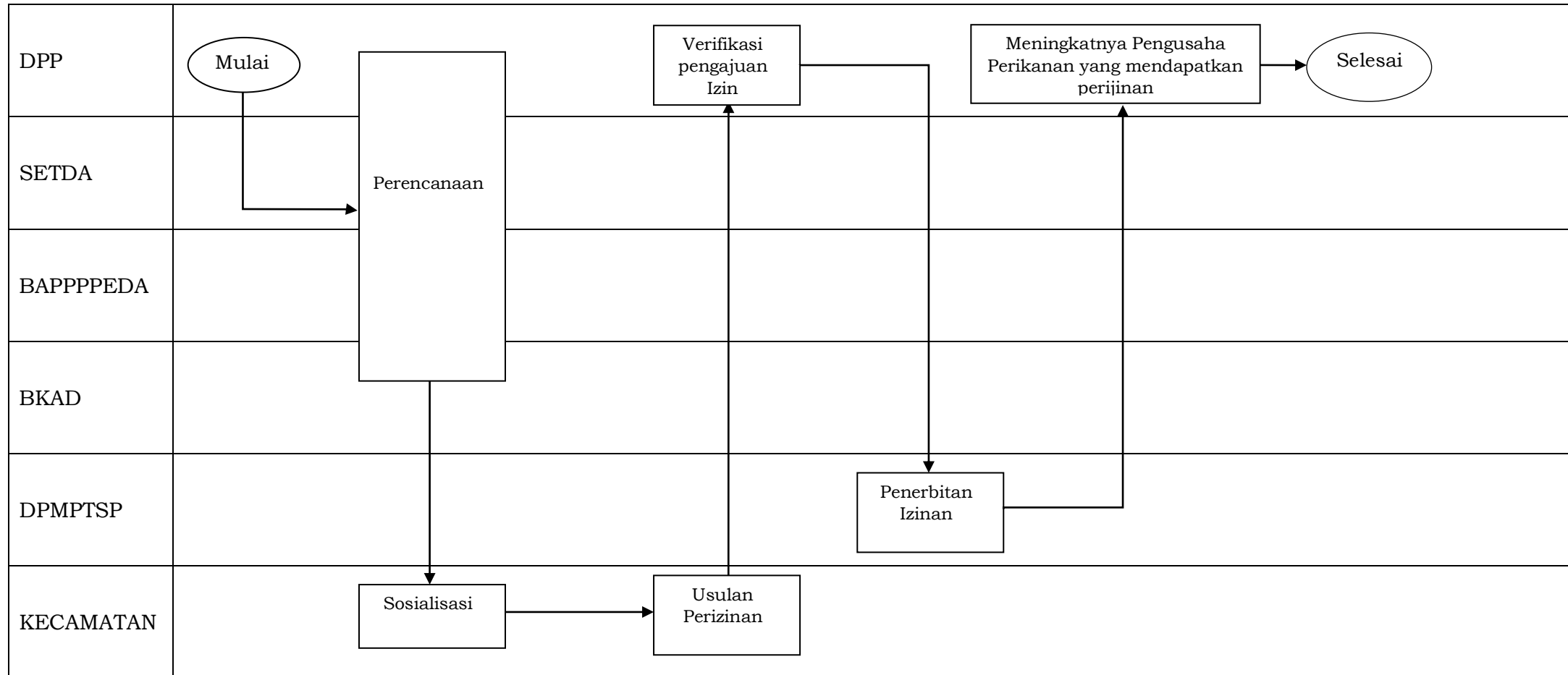
SMD – 07.02 Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perencanaan, Verifikasi pengadaan barang jasa dan monitoring
2.	DPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
6.	KECAMATAN	Koordinator dan Fasilitator wilayah
7.	UPTD	Supervisi dan tenaga operasional

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.03 Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian



**Keterangan :**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

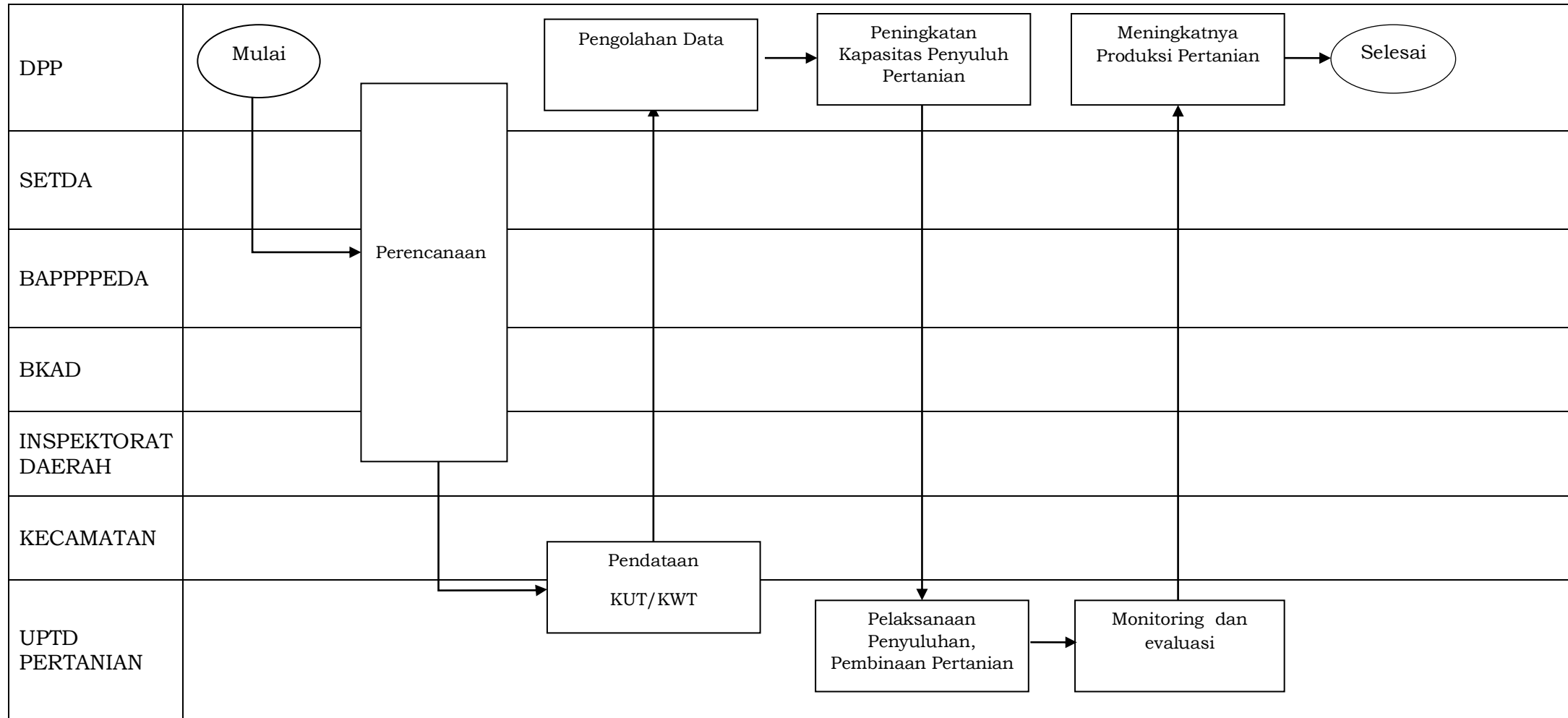
SMD – 07.03 Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggungjawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	DPMPTSP	Peneribitan Perizinan
6.	KECAMATAN	Fasilitasi Pengajuan Perizinan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.04 Peningkatan Penyuluhan Pertanian





**Keterangan :**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

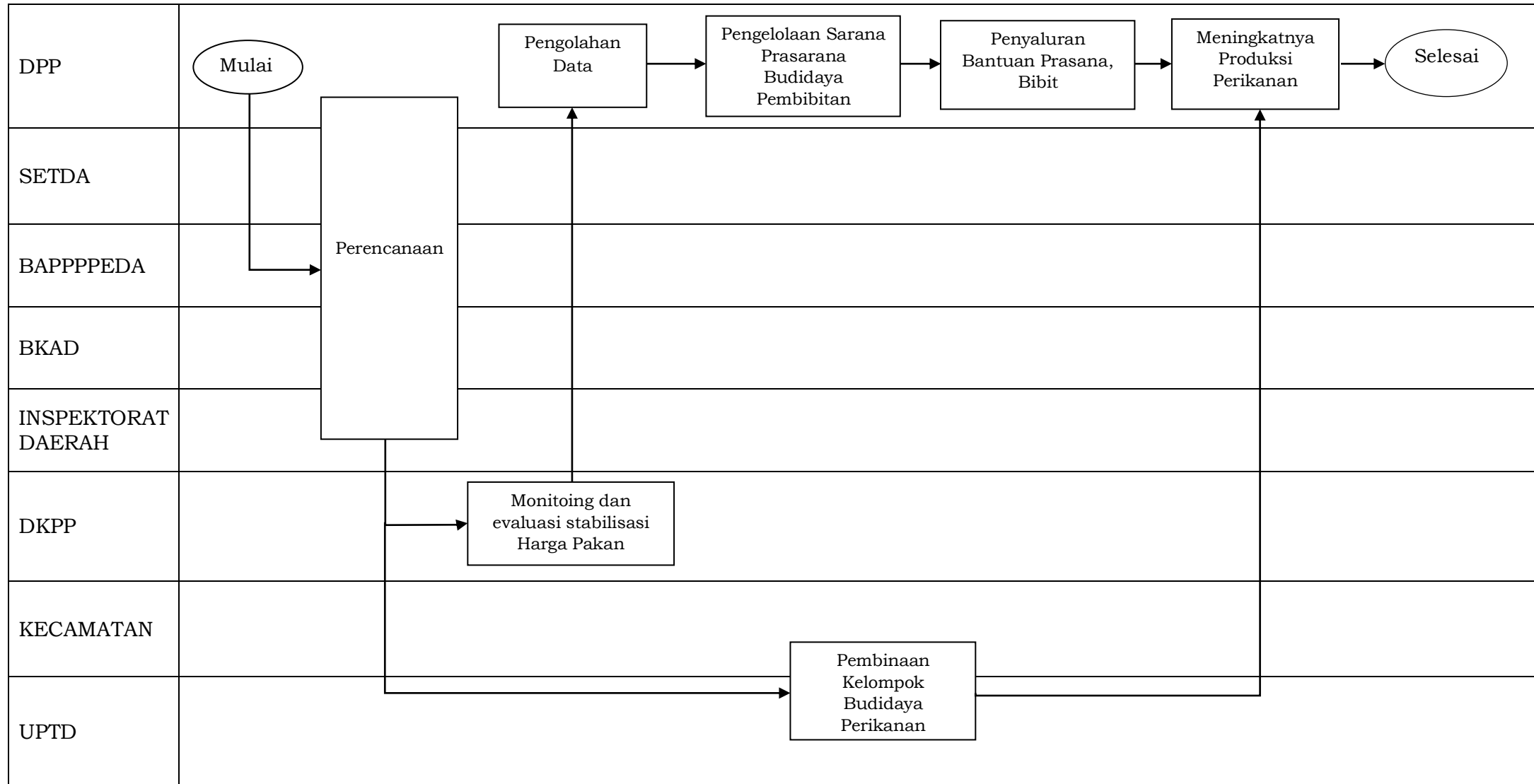
SMD – 07.04 Peningkatan Penyuluhan Pertanian

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah
7.	UPTD PERTANIAN	Koordinator Lapangan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.05 Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya



**Keterangan :**

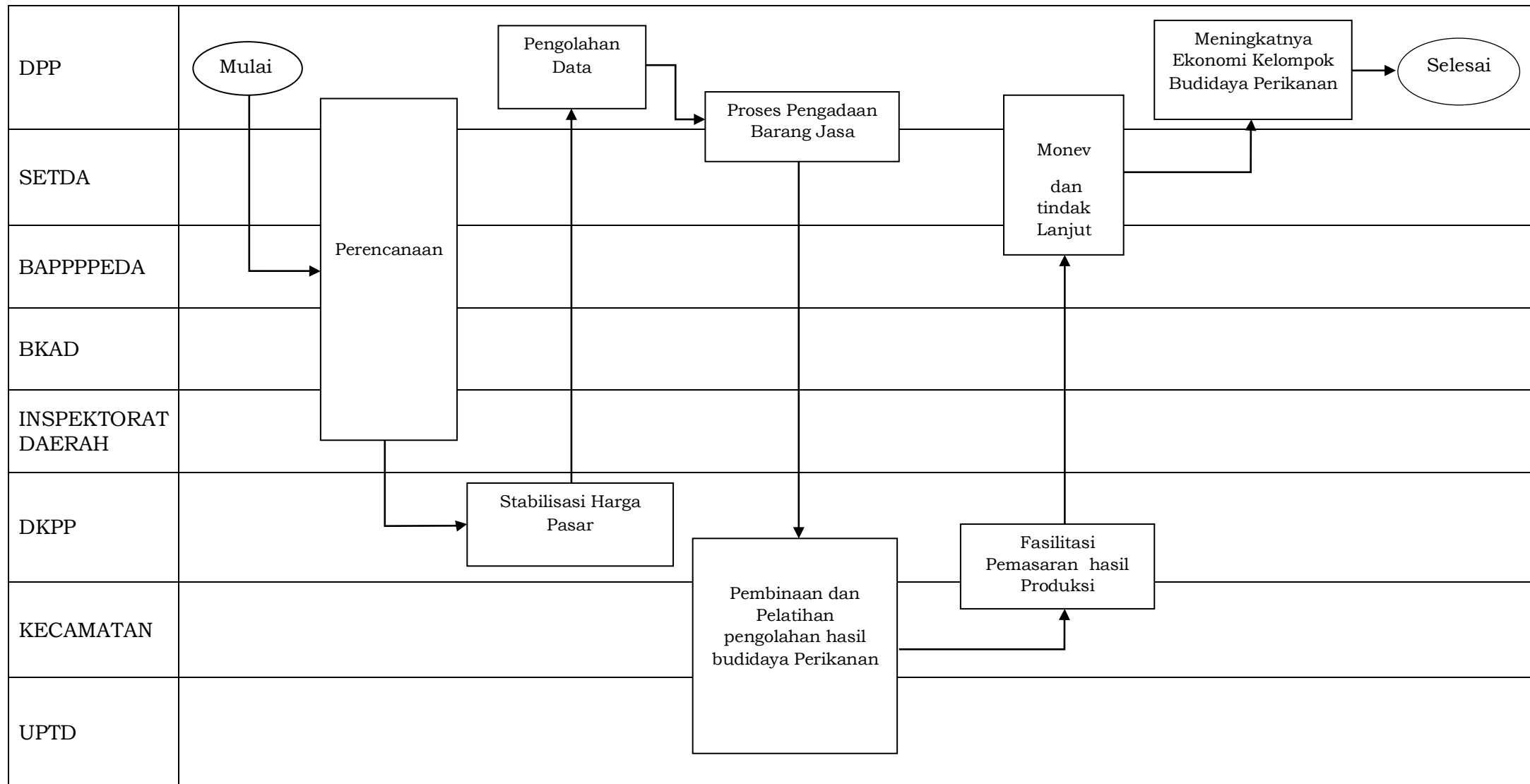
**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.05 Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DKPP	Dukungan Data Harga Pakan, dan Prasarana
7.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah
8.	UPTD	Koordinator Lapangan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**  
 SMD – 07.06 Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan



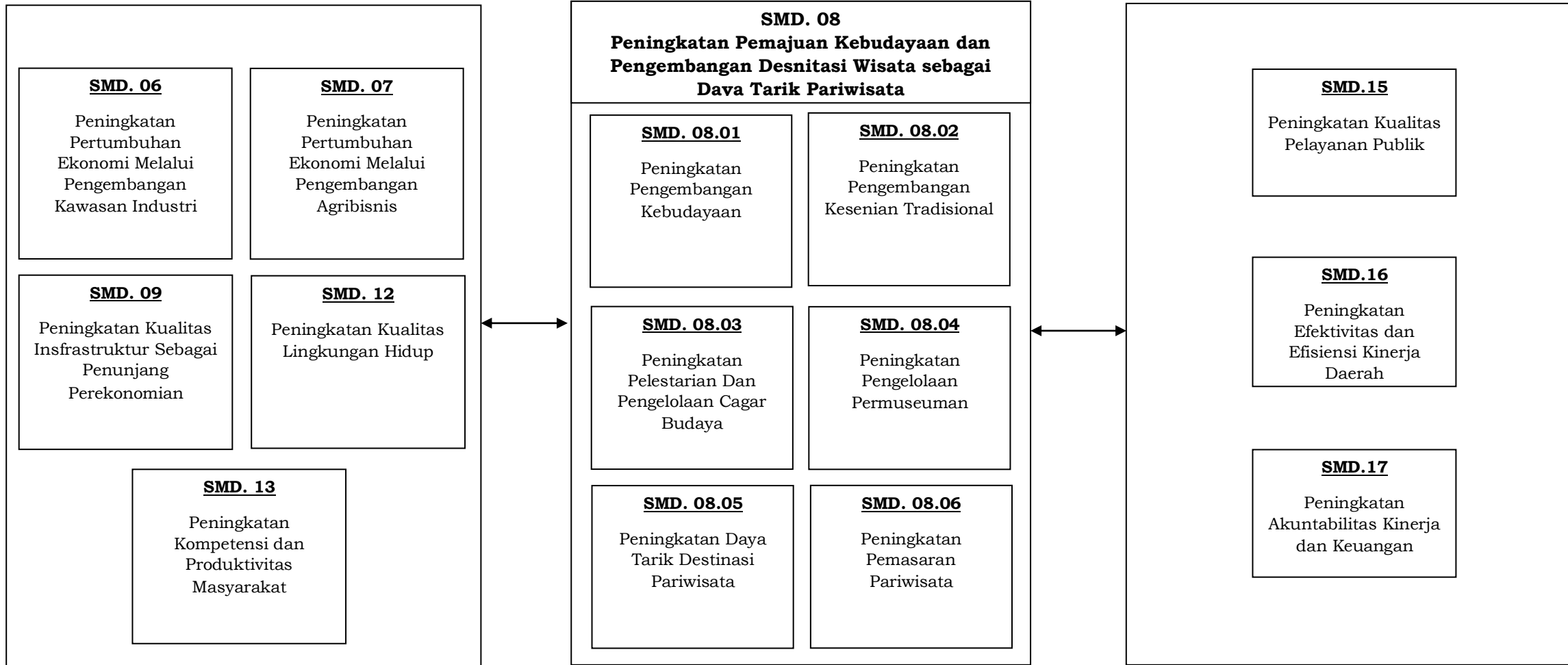
**Keterangan :**

**CFM 07 Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan Agribisnis**

SMD – 07.06 Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DKPP	FAasilitas Pemasaran dan Pembinaan Usaha
7.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah
8.	UPTD	Koordinator Lapangan

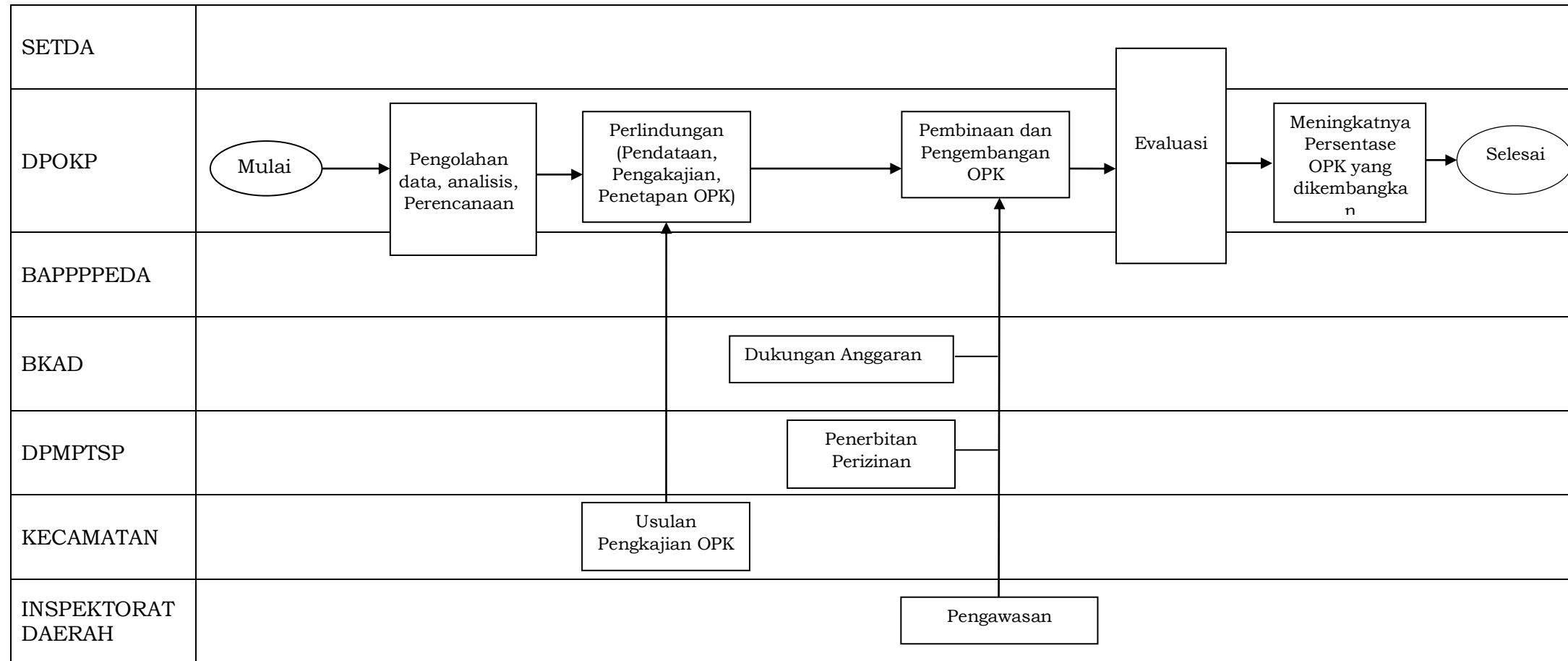
**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.01 Peningkatan Pengembangan Kebudayaan



**Keterangan :**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.01 Peningkatan Pengembangan Kebudayaan

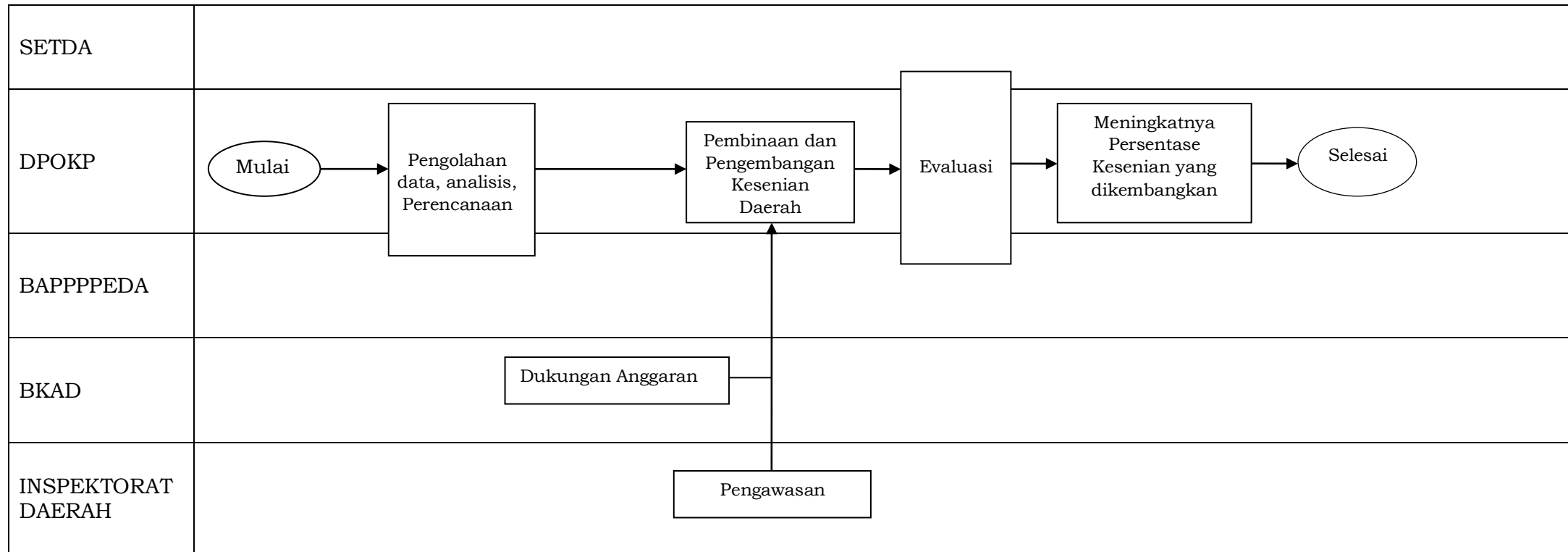
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DPOKP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Pendukung Anggaran
5.	DPMPTSP	Perijinan
6.	KECAMATAN	Pengusulan OPK
7.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.02 Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional



**Keterangan :**

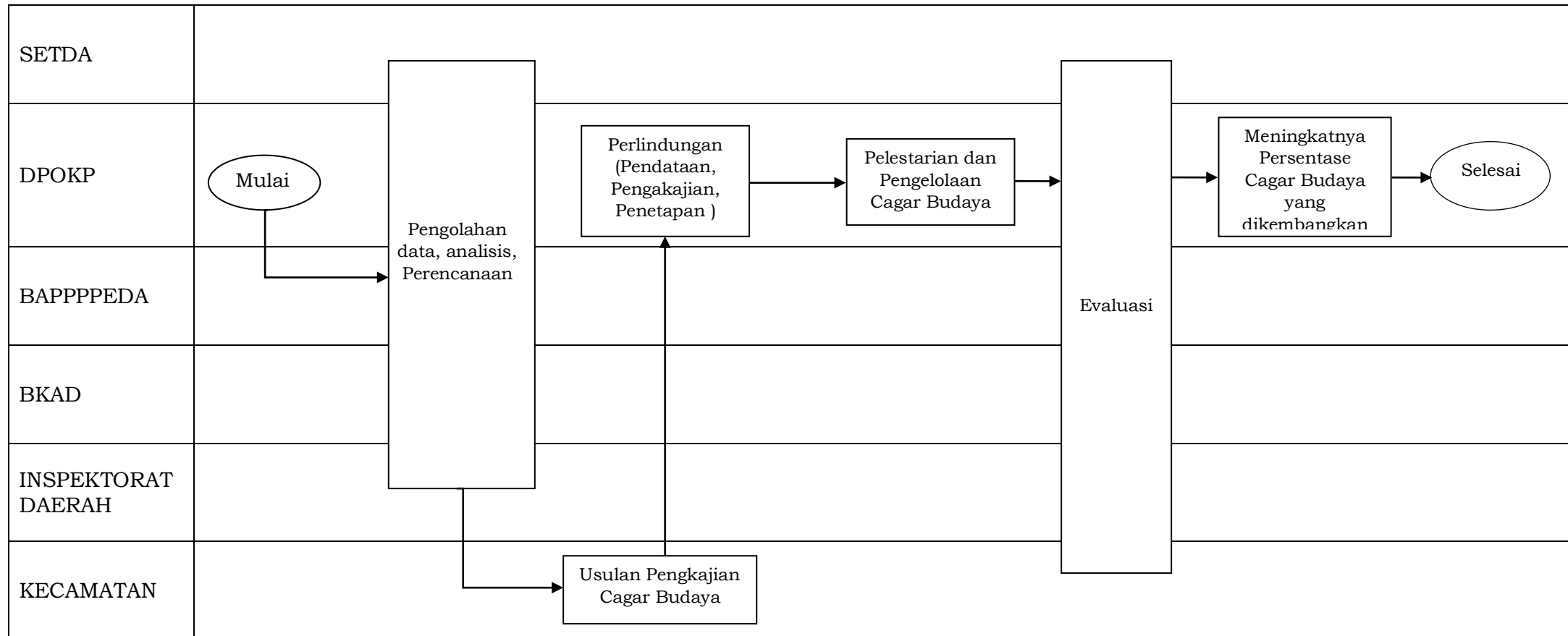
**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.02 Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi
2.	DPOKP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**  
 SMD – 08.03 Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya



**Keterangan :**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

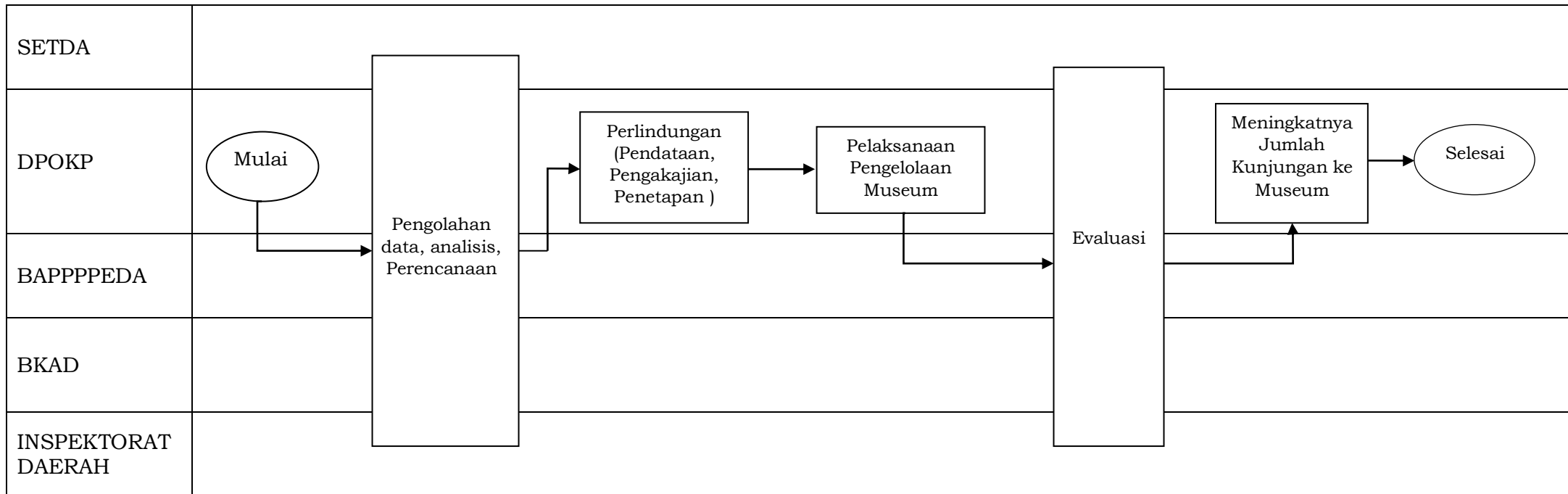
SMD – 08.03 Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi Kinerja
2.	DPOKP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	KECAMATAN	Pengusulan
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.04 Peningkatan Pengelolaan Permuseuman



**Keterangan :**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

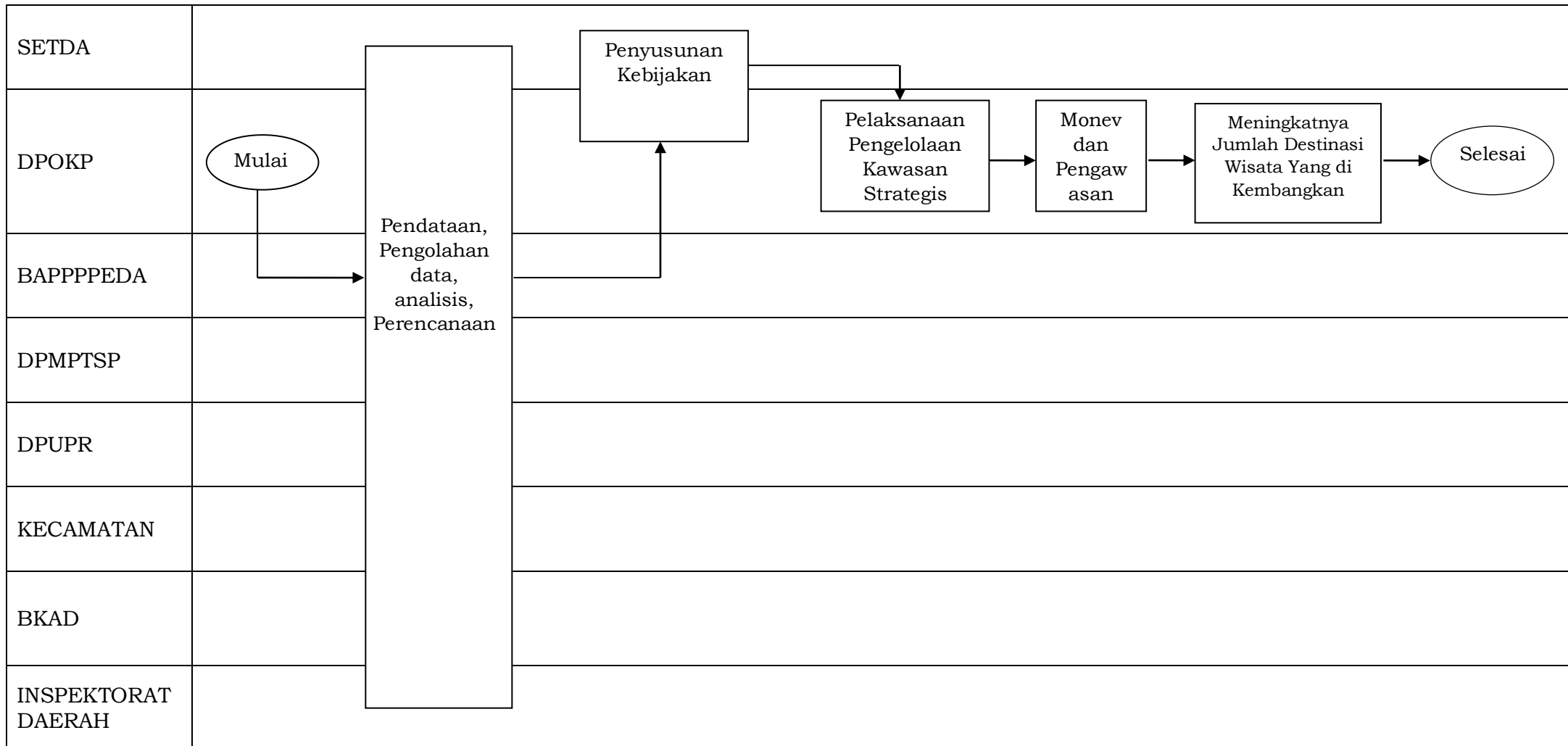
SMD – 08.04 Peningkatan Pengelolaan Permuseuman

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Evaluasi Kinerja
2.	DPOKP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.05 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



**Keterangan :**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

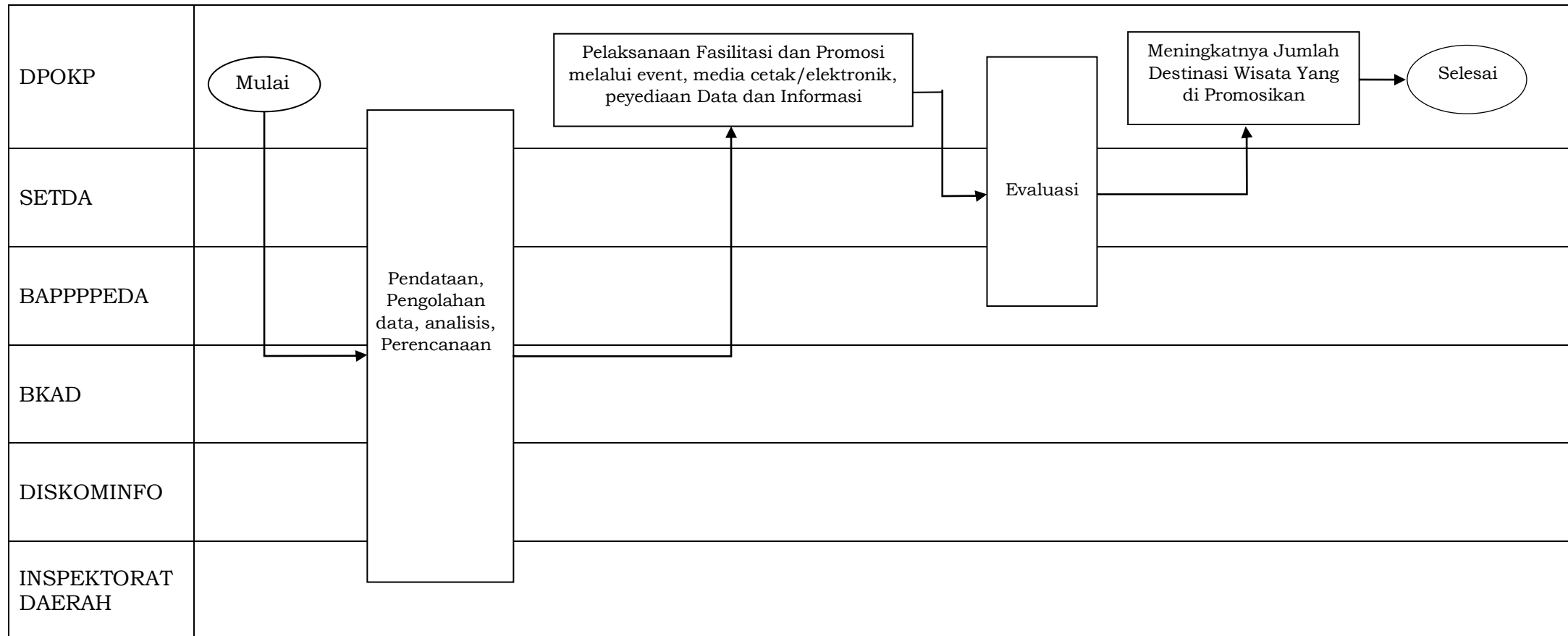
SMD – 08.05 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DPOKP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	DPMPTSP	Perizinan
5.	DPUPR	Perencanaan Insfrastruktur
6.	KECAMATAN	Fasilitasi Kewilayahan
7.	BKAD	Dukungan Anggaran
8.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**  
 SMD – 08.06 Peningkatan Pemasaran Pariwisata



**Keterangan :**

**CFM 08 Peningkatan Pemajuan Kebudayaan dan Pengembangan Destinasi Wisata sebagai Daya Tarik Pariwisata**

SMD – 08.06 Peningkatan Pemasaran Pariwisata

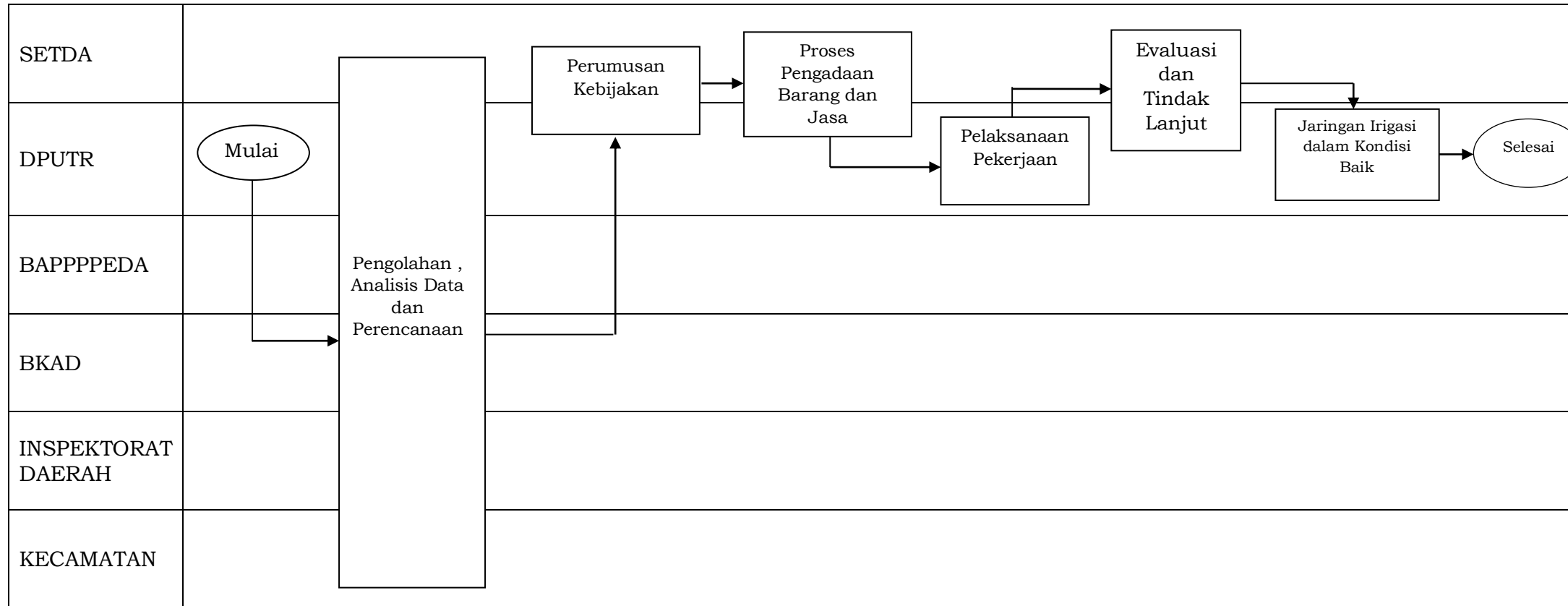
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPOKP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DISKOMINFO	Sistem Informasi
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**  
 SMD – 09.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

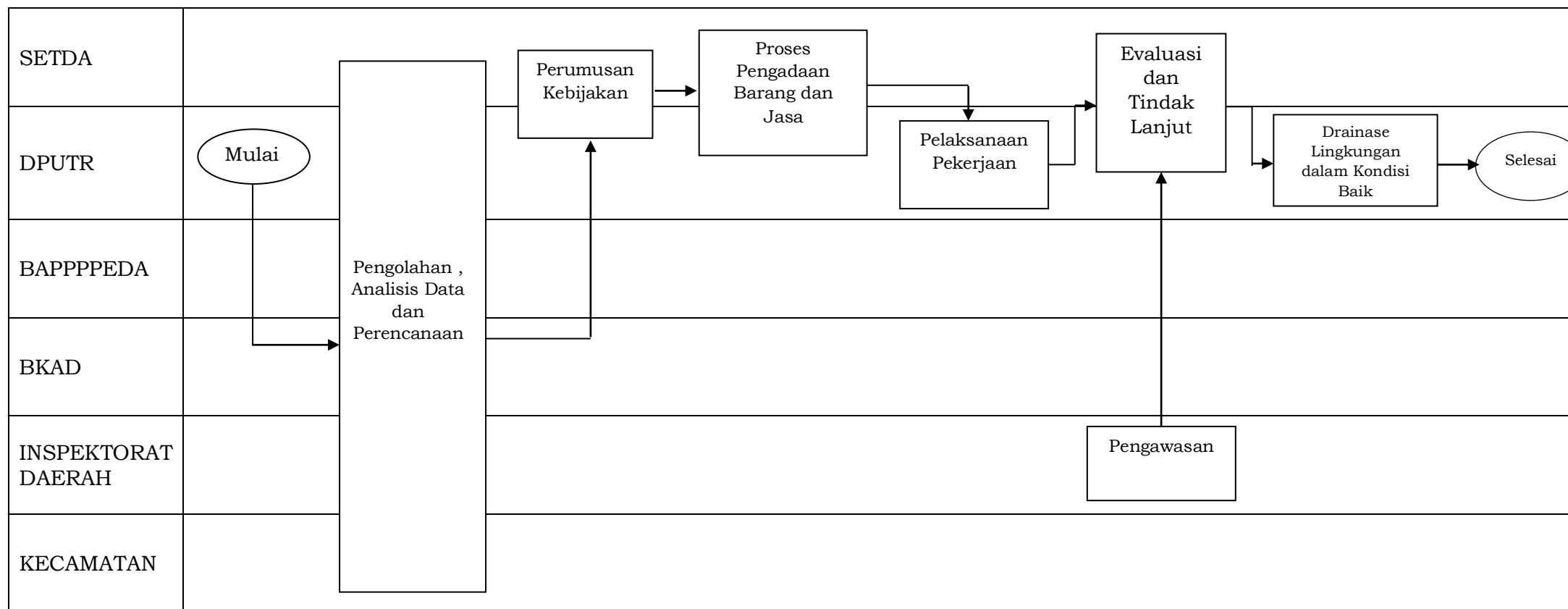
SMD – 09.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPUTR	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
6.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.02 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

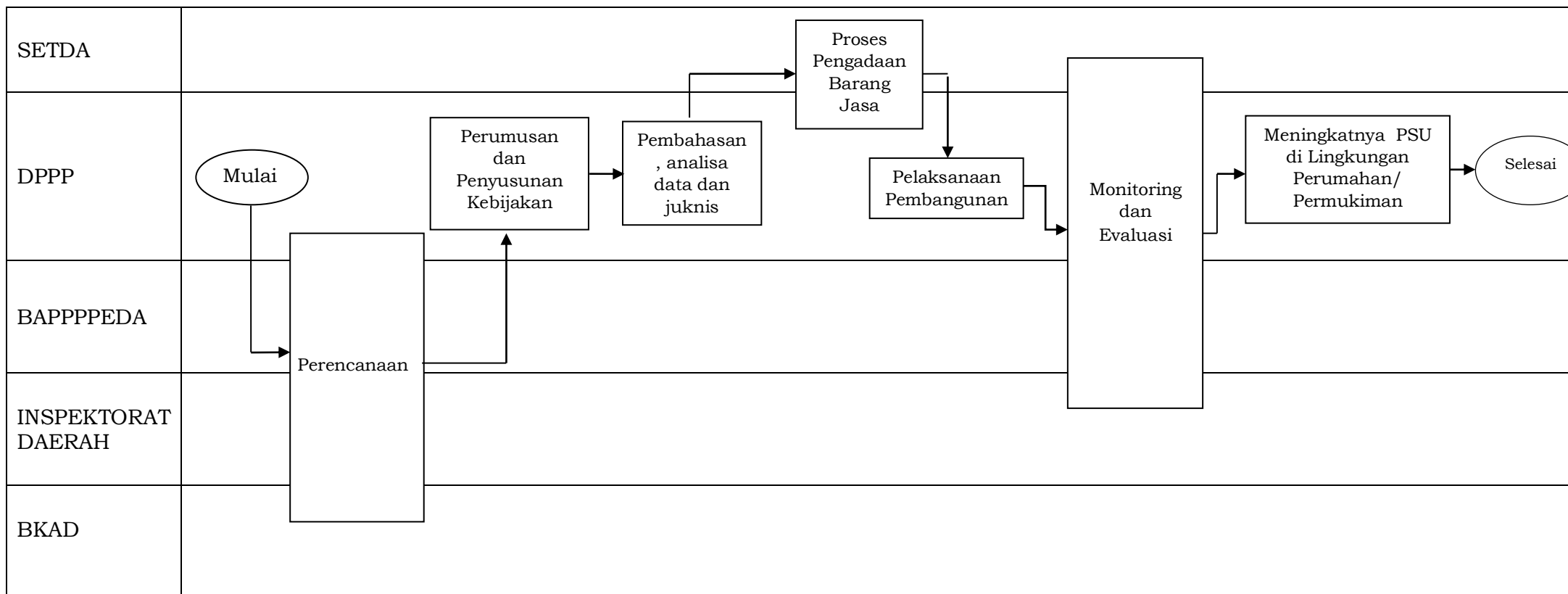
SMD – 09.02 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPUTR	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan, evaluasi
6.	KECAMATAN	Fasilitator Kewilayahan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.03 Peningkatan Pengembangan Permukiman





**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.03 Peningkatan Pengembangan Permukiman

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan evaluasi
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran



**Keterangan :**

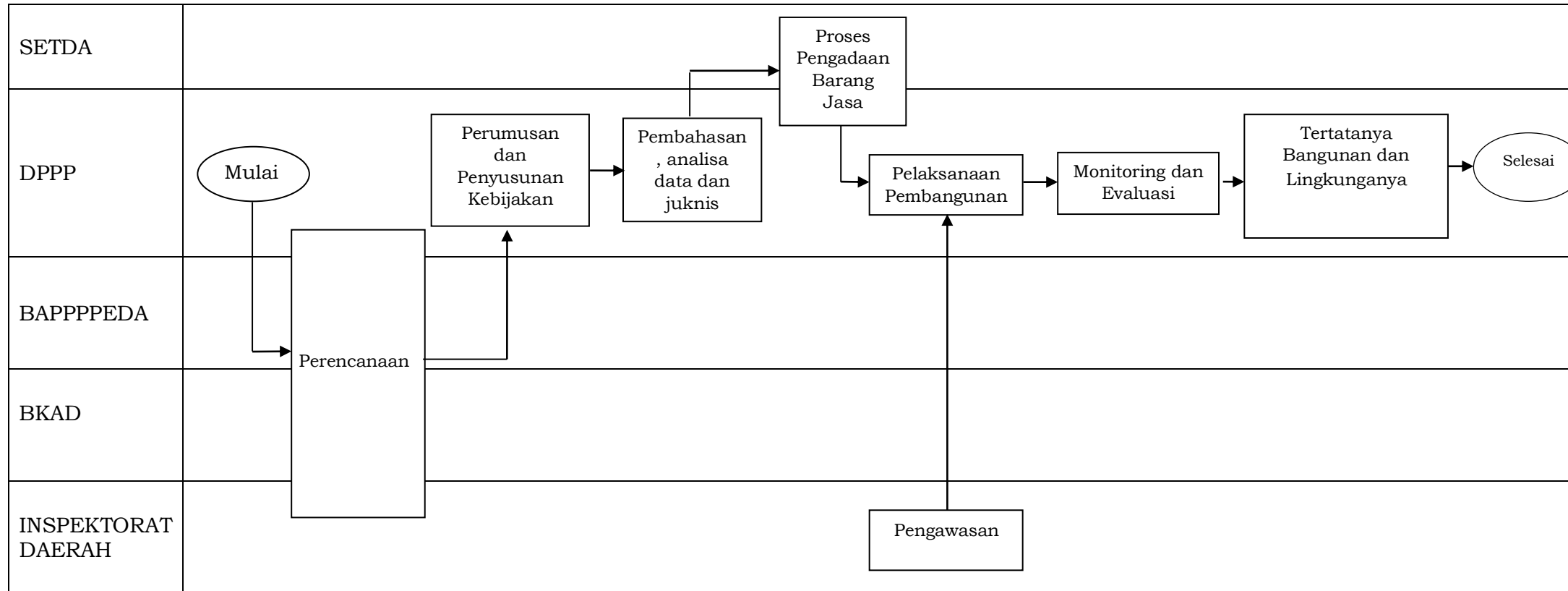
**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.04 Peningkatan Penataan Bangunan Gedung

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Fasilitasi Pengadaan Barang Jasa
2.	DPPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran dan Fasilitasi Pencairan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
6.	POLPP	Penelitian, Pembahasan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
7.	PUPR	Penelitian, Pembahasan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
8.	DISHUB	Penelitian, Pembahasan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
9.	DINKES	Penelitian, Pembahasan dan Rekomendasi Tim terkait Persetujuan Bangunan Gedung
10.	KECAMATAN	Rekomendasi Usulan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**  
SMD – 09.05 Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

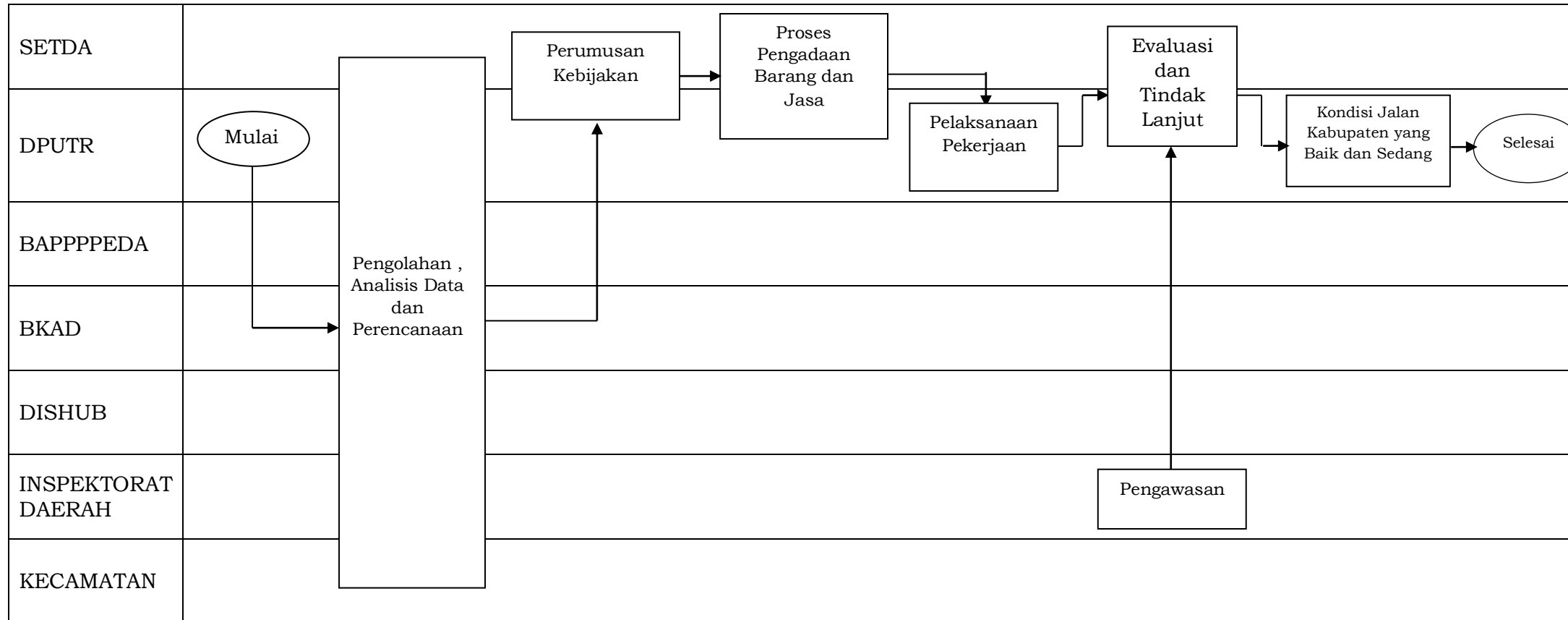
SMD – 09.05 Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Fasilitasi Pencairan Bantuan
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.06 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

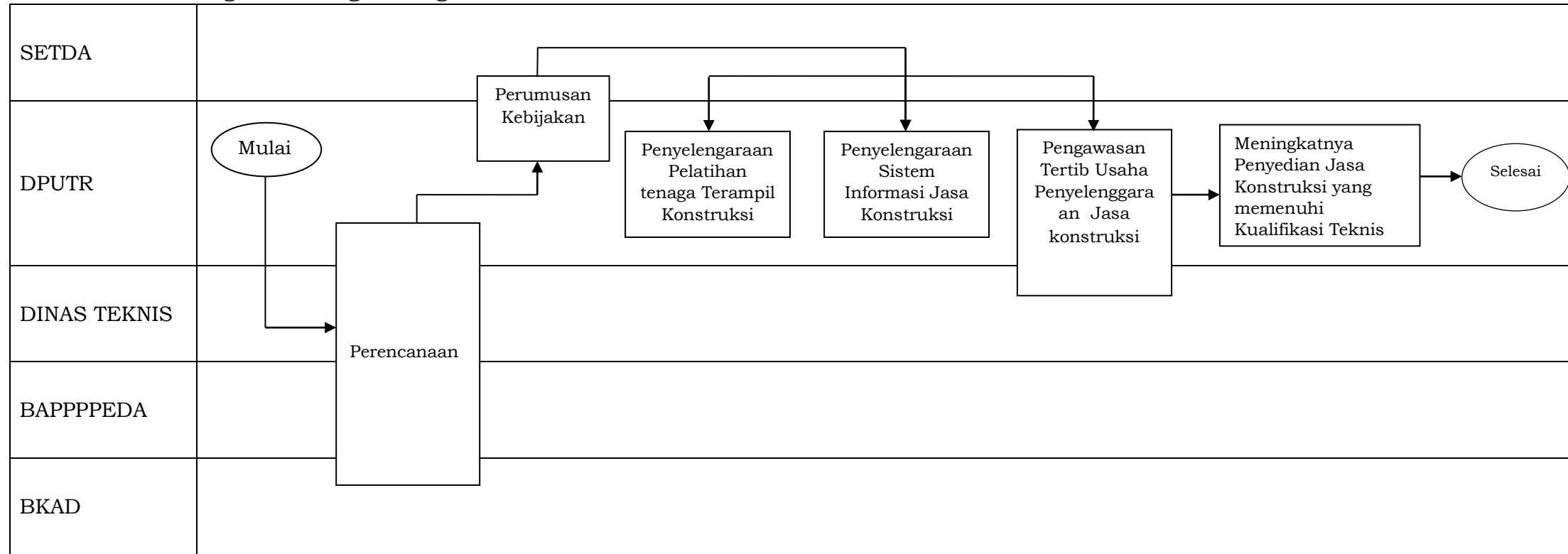
SMD – 09.06 Peningkatan Penyelenggaraan Jalan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPUTR	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	DISHUB	Data Jalan
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan, evaluasi
7.	KECAMATAN	Fasilitator Kewilayahan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.07 Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi





**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

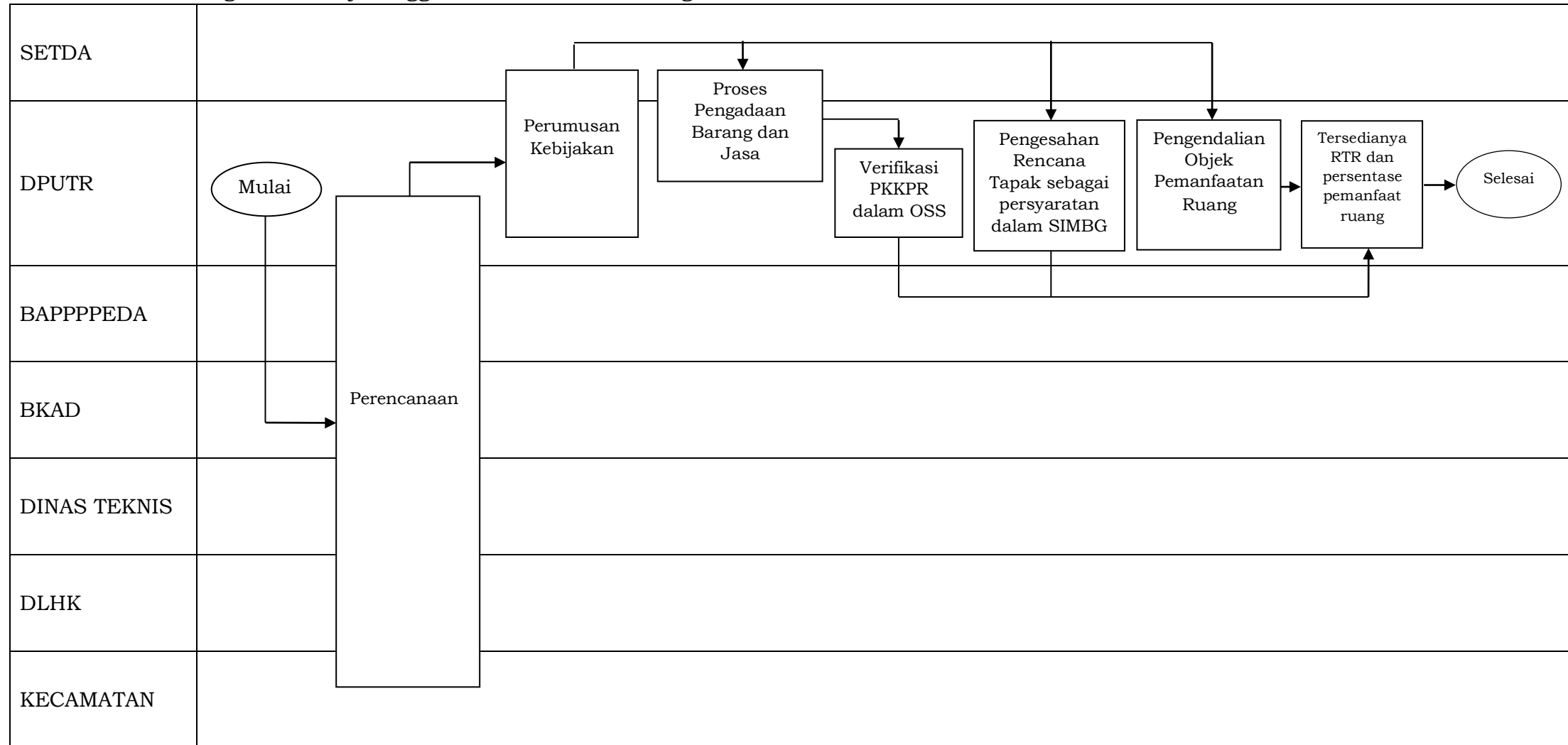
SMD – 09.07 Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	DPUTR	Penanggung Jawab
3.	DINAS TEKNIS	Perencanaan
4.	BAPPPEDA	Perencanaan
5.	BKAD	Dukungan Anggaran

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.08 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

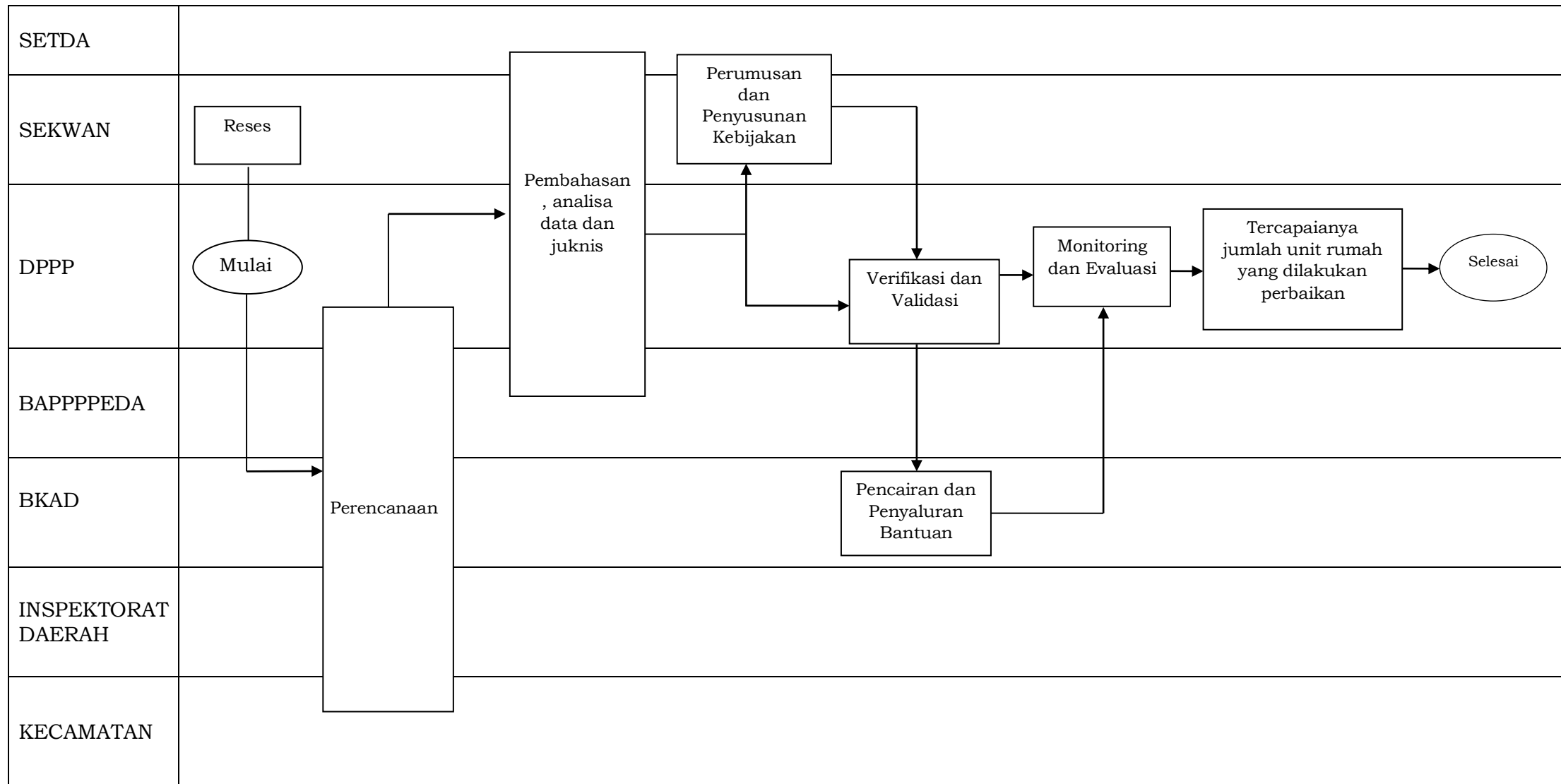
SMD – 09. 08 Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DPUTR	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	DINAS TEKNIS	Perencanaan
6.	DLHK	Data Lingkungan
7.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.09 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh



**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

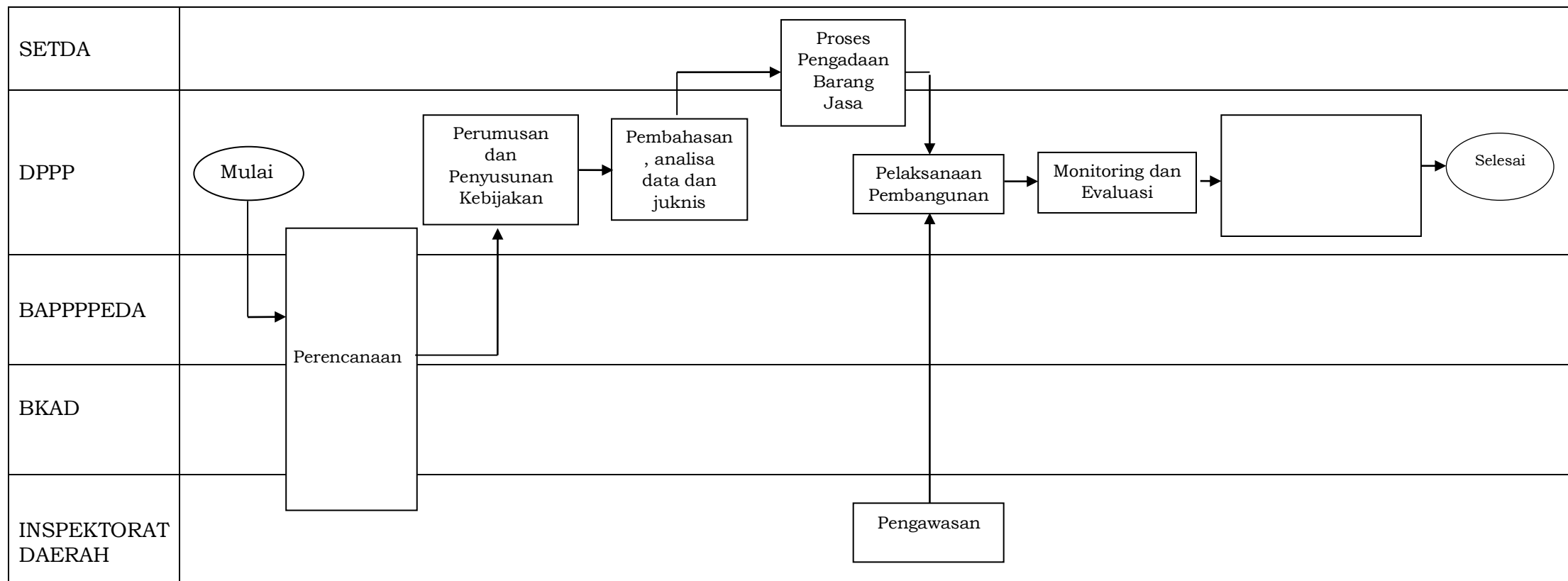
SMD – 09.09 Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan Kebijakan
2.	SETWAN	Penyelenggaraan Reses Dewan
3.	DPPP	Penanggung Jawab
4.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
6.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan evaluasi
7.	KECAMATAN	Koordinator wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.10 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



**Keterangan :**

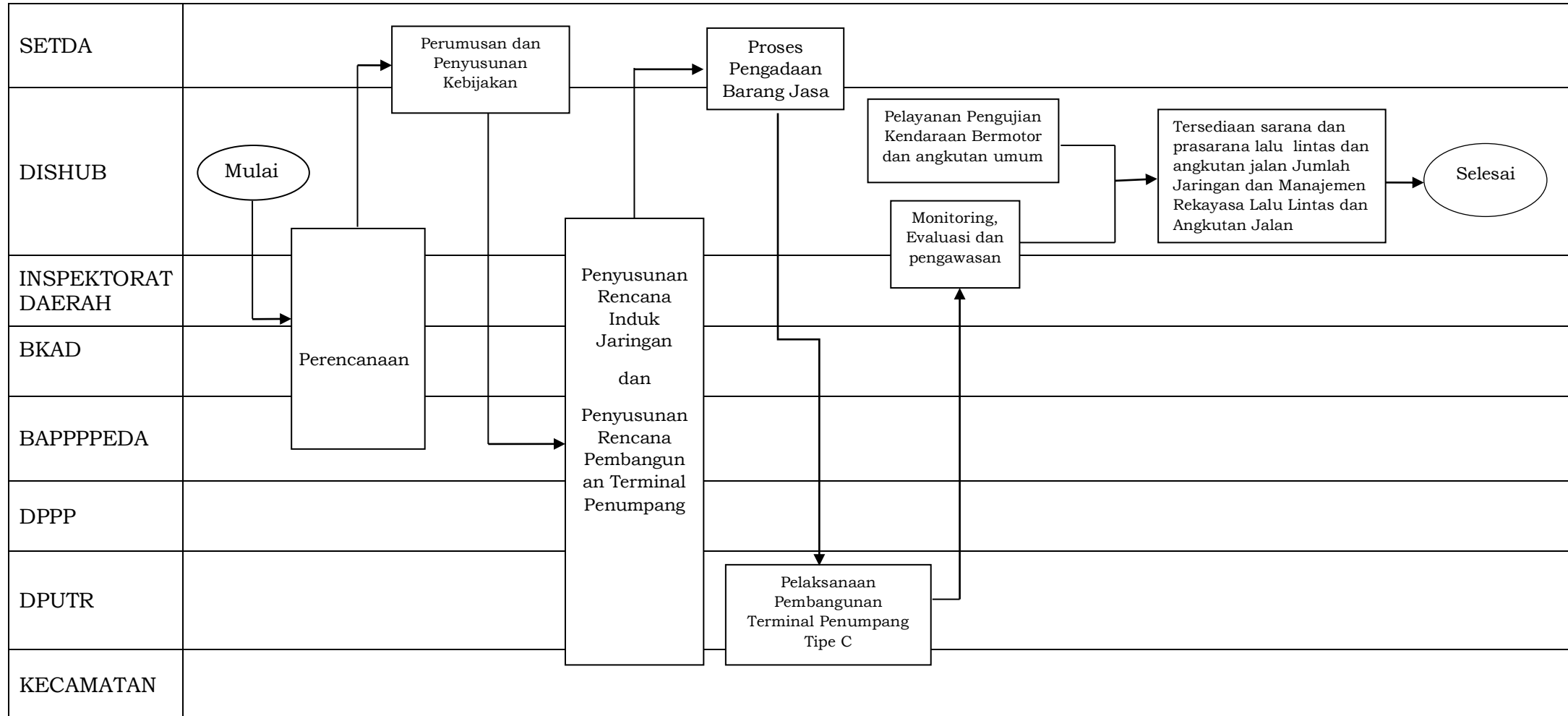
**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.10 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan Kebijakan
2.	DPPP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan evaluasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**  
 SMD – 09.11 Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)





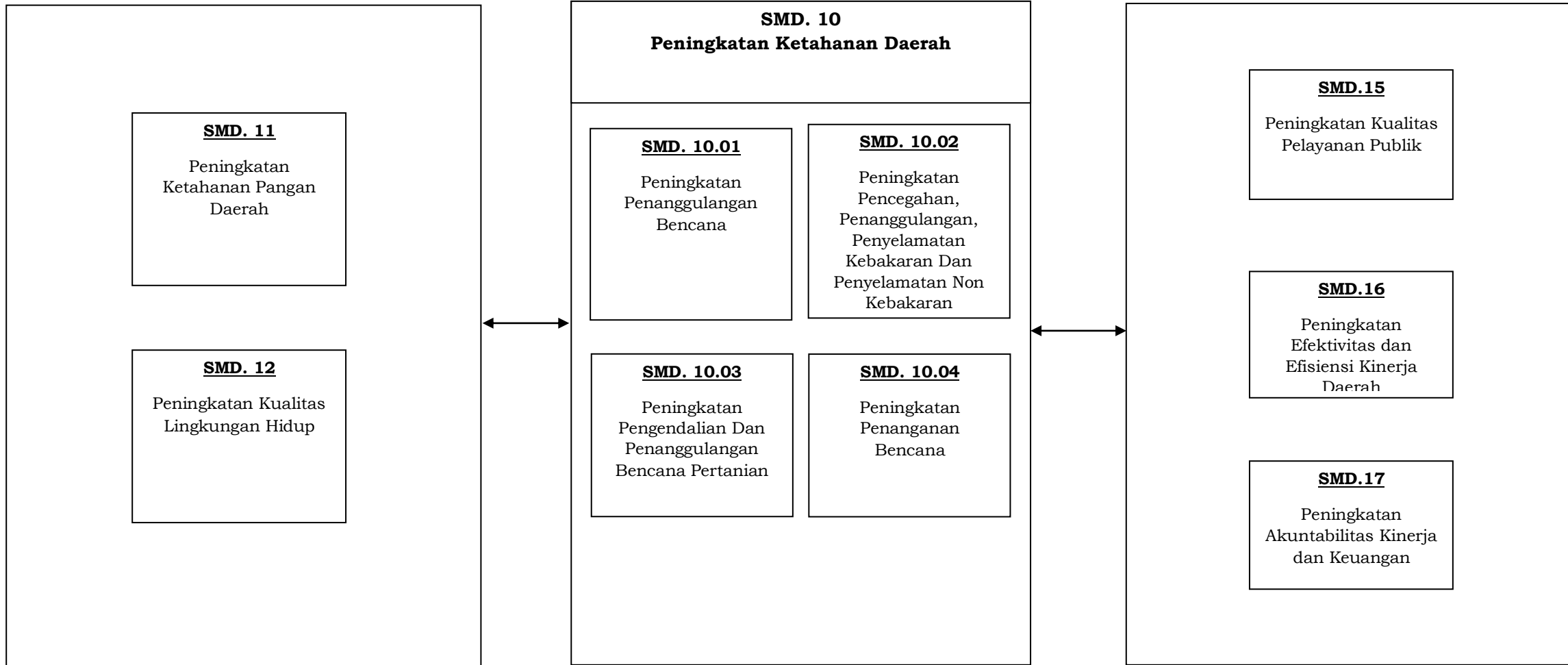
**Keterangan :**

**CFM 09 Peningkatan Kualitas Insfrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian**

SMD – 09.11 Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan kebijakan dan evaluasi
2.	DISHUB	Penanggung Jawab
3.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
4.	BKAD	Fasilitasi Anggaran
5.	BAPPPEDA	Perencanaan
6.	DPPP	Data Lingkungan Perumahan dan Pemukiman
7.	DPUTR	Pelaksana Pembangunan
8.	KECAMATAN	Fasilitator Wilayah

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**





**Keterangan :**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

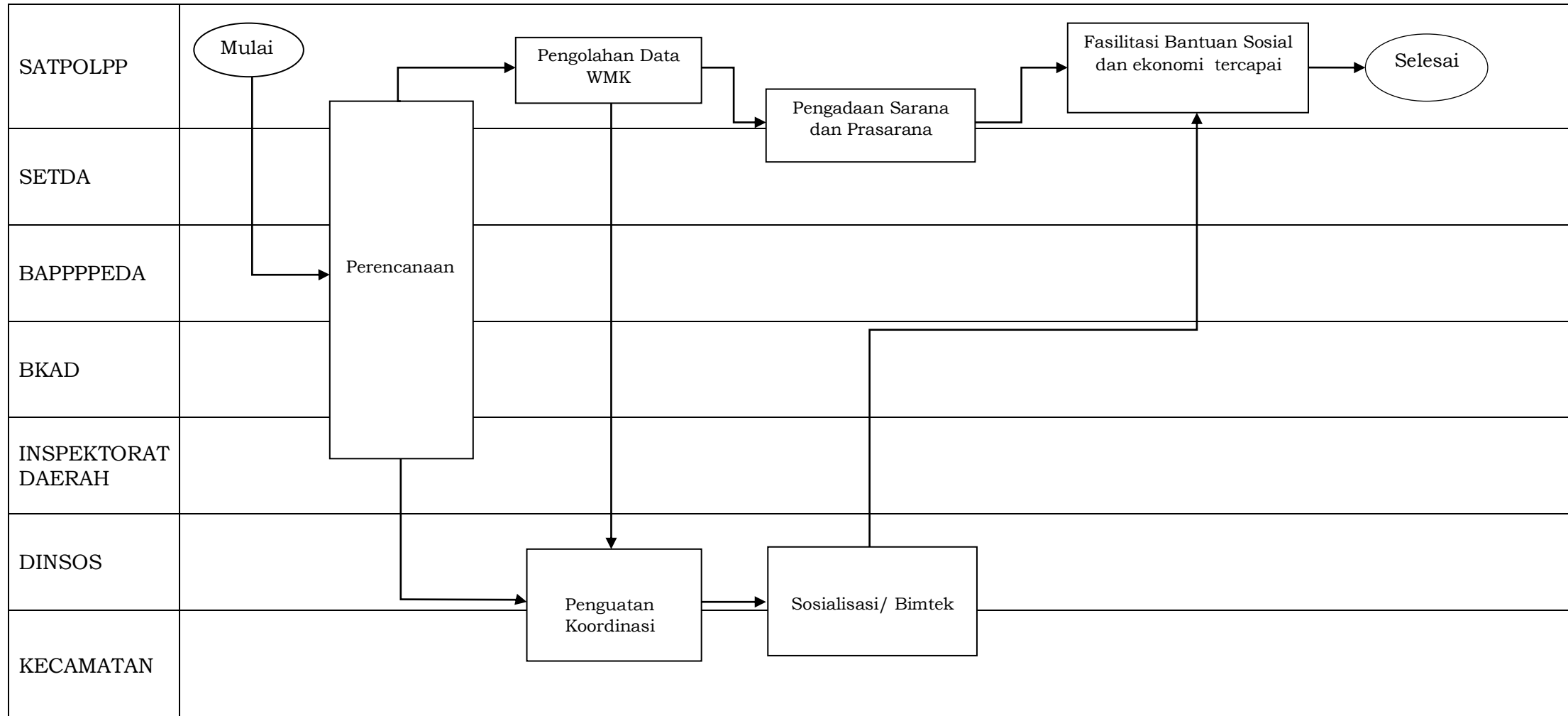
SMD – 10.01 Peningkatan Penanggulangan Bencana

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan
2.	BPBD	Penanggung Jawab
3.	SATPOLPP	Dukungan Pelaksana Lapangan
4.	DINSOS	Fasilitasi Bantuan Bencana
5.	DPPP	Data Perumahan dan Pemukiman
6.	BAPPPEDA	Perencanaan
7.	BKAD	Dukungan Anggaran
8.	DISHUB	Dukungan Data Akses Jalan
9.	DINKES	Dukungan Bidang Kesehatan
10.	DISDUKCAPIL	Data Kependudukan
11.	DISKOMINFO	Dukungan TI
12.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan
3.	KECAMATAN	Fasilitator Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

SMD – 10.02 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



**Keterangan :**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

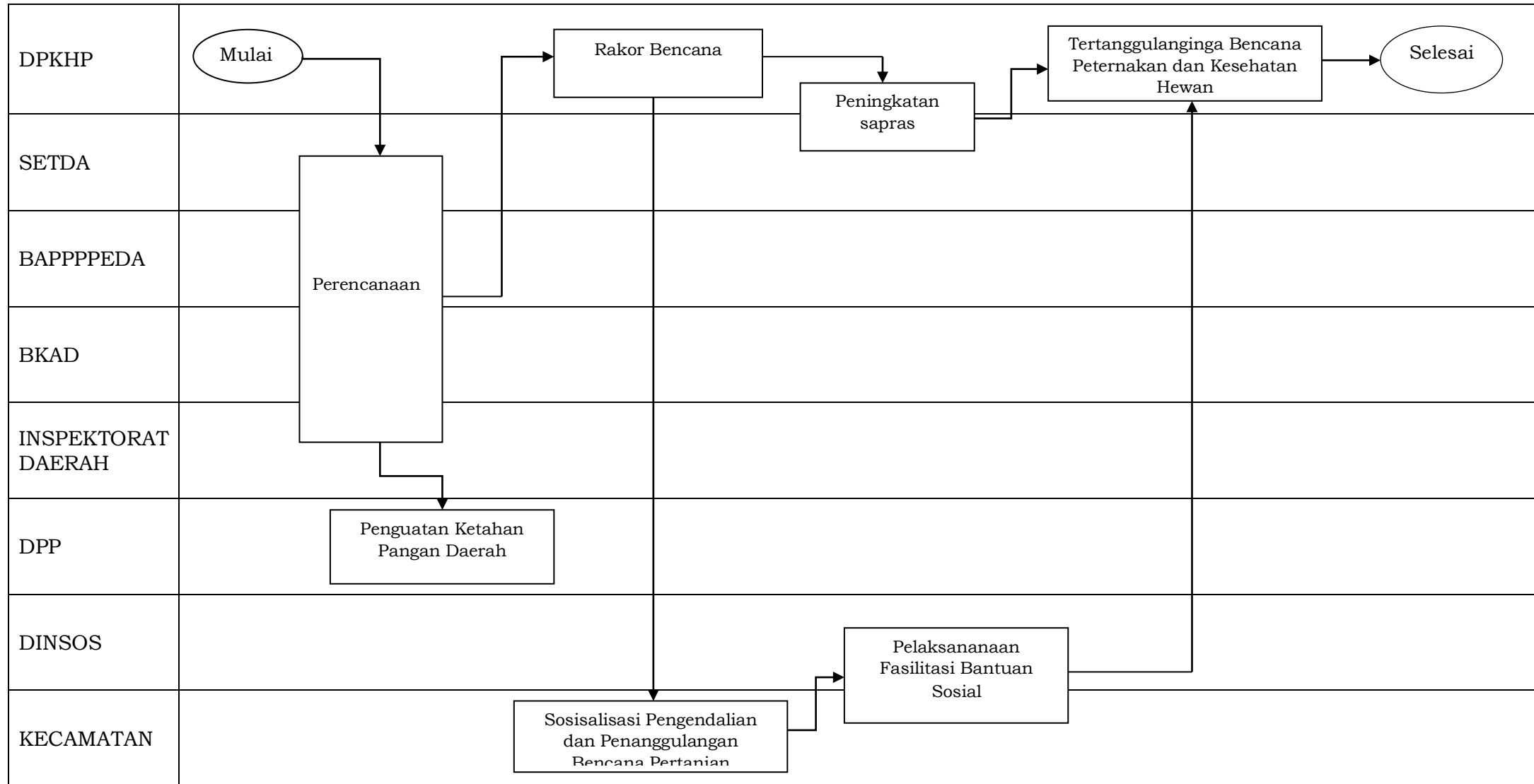
SMD – 10.02 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SATPOLPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan dan evaluasi kinerja
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DINSOS	Dukungan Fasilitas Banskos
7.	KECAMATAN	Fasilitator dan Koordinator Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

SMD – 10.03 Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian



**Keterangan :**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

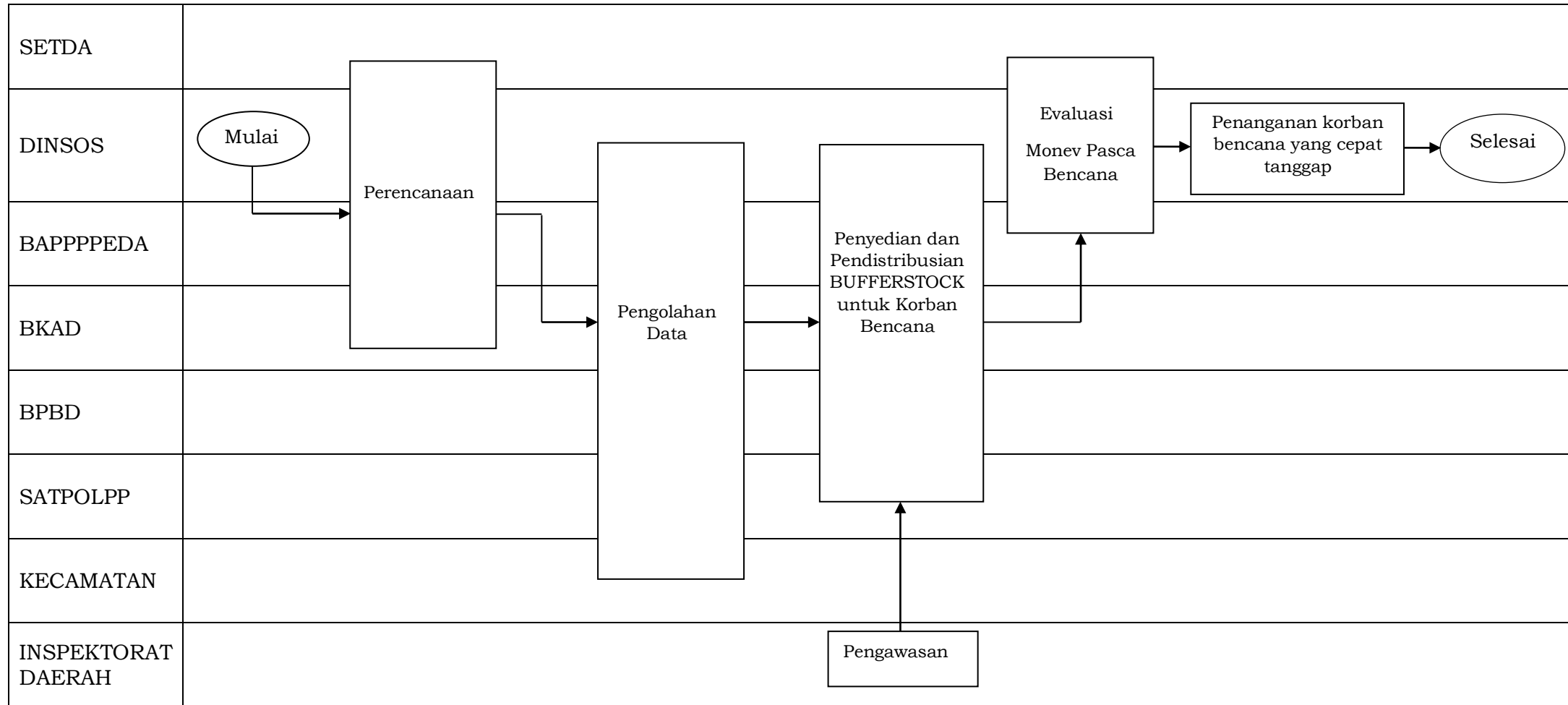
SMD – 10.03 Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPKHP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DPP	Tim Penanganan Bencana
7.	DINSOS	Fasilitasi Bantuan Sosial
8.	KECAMATAN	Fasilitator dan Koordinator Wilayah



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**  
SMD – 10.04 Peningkatan Penanganan Bencana



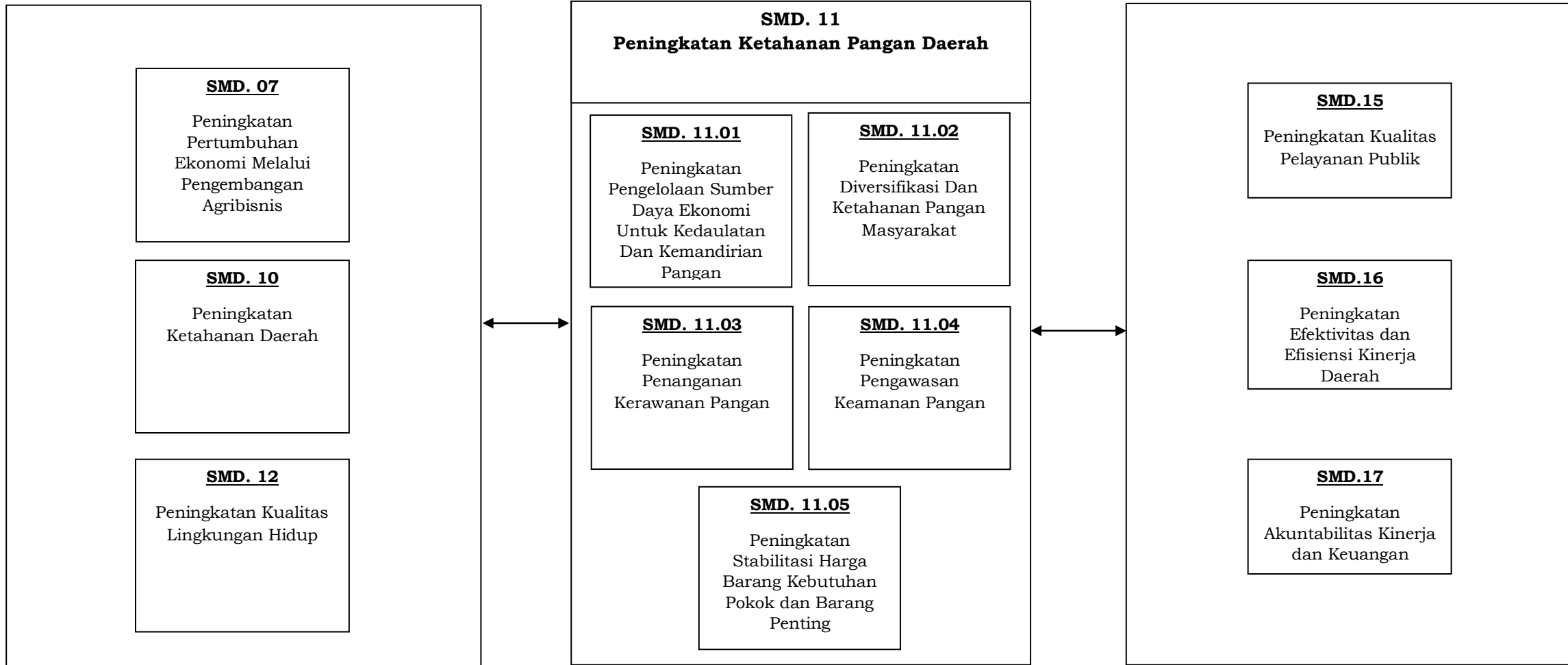
**Keterangan :**

**CFM 10 Peningkatan Ketahanan Daerah**

SMD – 10.04 Peningkatan Penanganan Bencana

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan Kebijakan dan evaluasi
2.	DINSOS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan
4.	BKAD	Dukungan Anggaran
5.	BPBD	Data Korban Bencana dan Pelaksana Lapangan
6.	SATPOLPP	Data Korban Bencana dan Pelaksana Lapangan
7.	KECAMATAN	Fasilitator tk. Wilayah
8.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

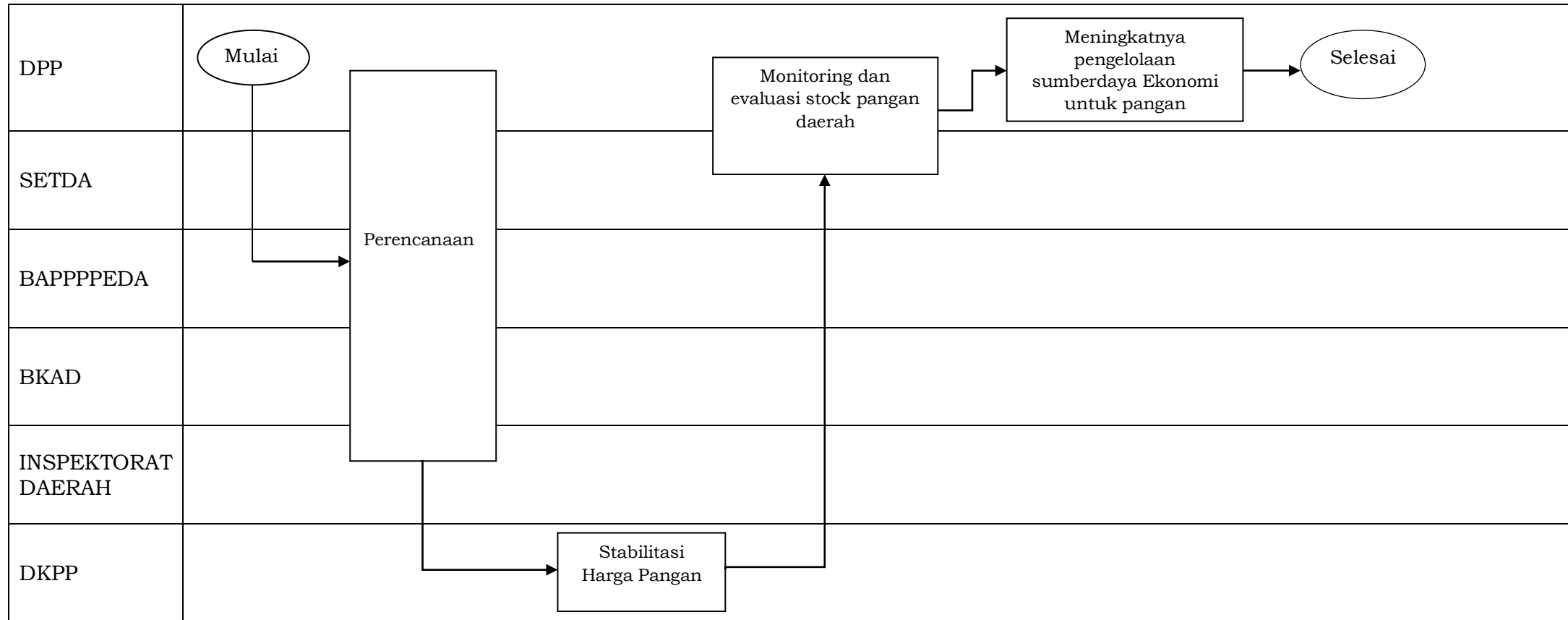
**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan



**Keterangan :**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.01 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DKPP	Penggerakan Stabilisasi Harga



**Keterangan :**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.02 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DKPP	Penggerakan Stabilisasi Harga
7.	KECAMATAN	Mobilisasi Masyarakat





**Keterangan :**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

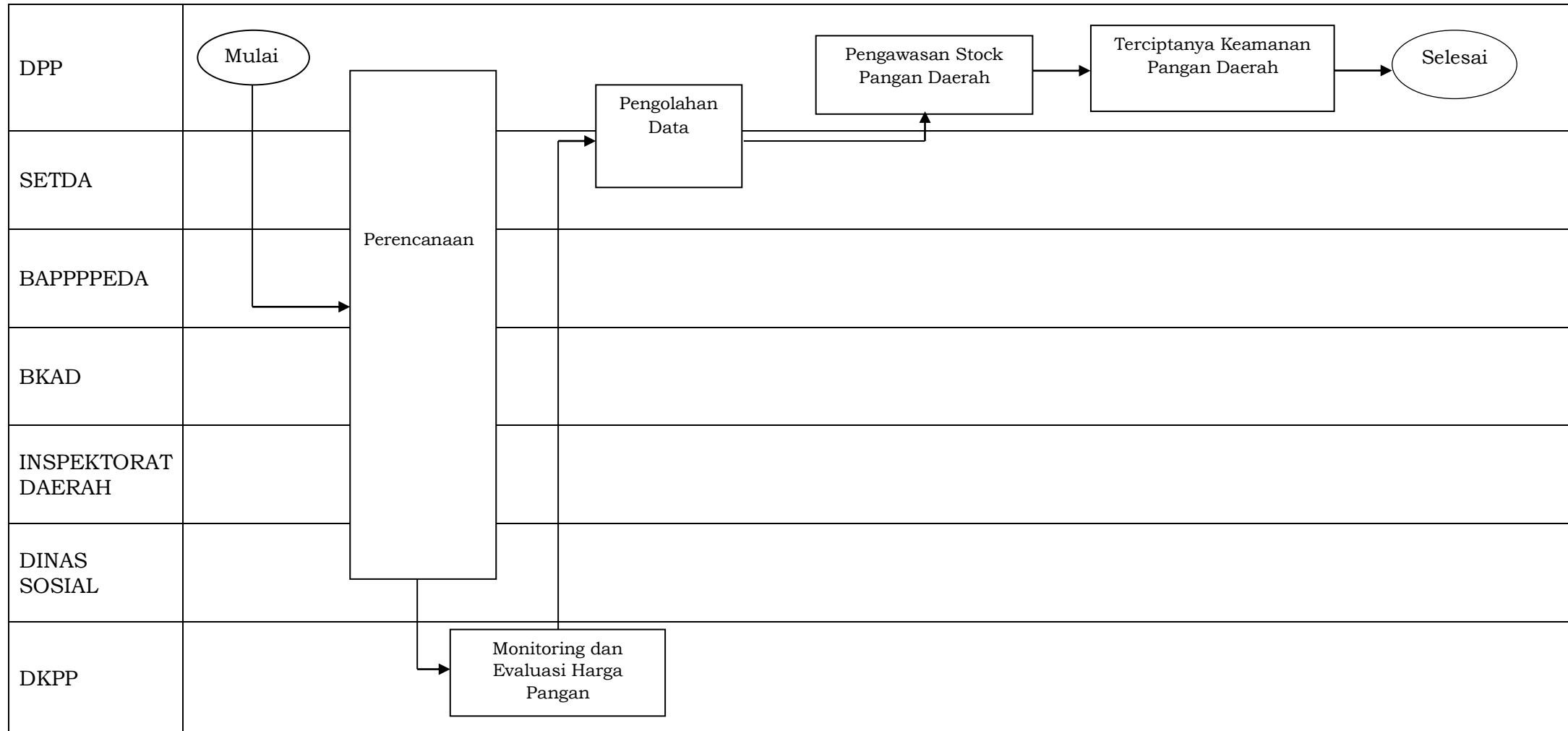
SMD – 11.03 Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial
7.	KECAMATAN	Fasilitator dan Koordinator

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.04 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan



**Keterangan :**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

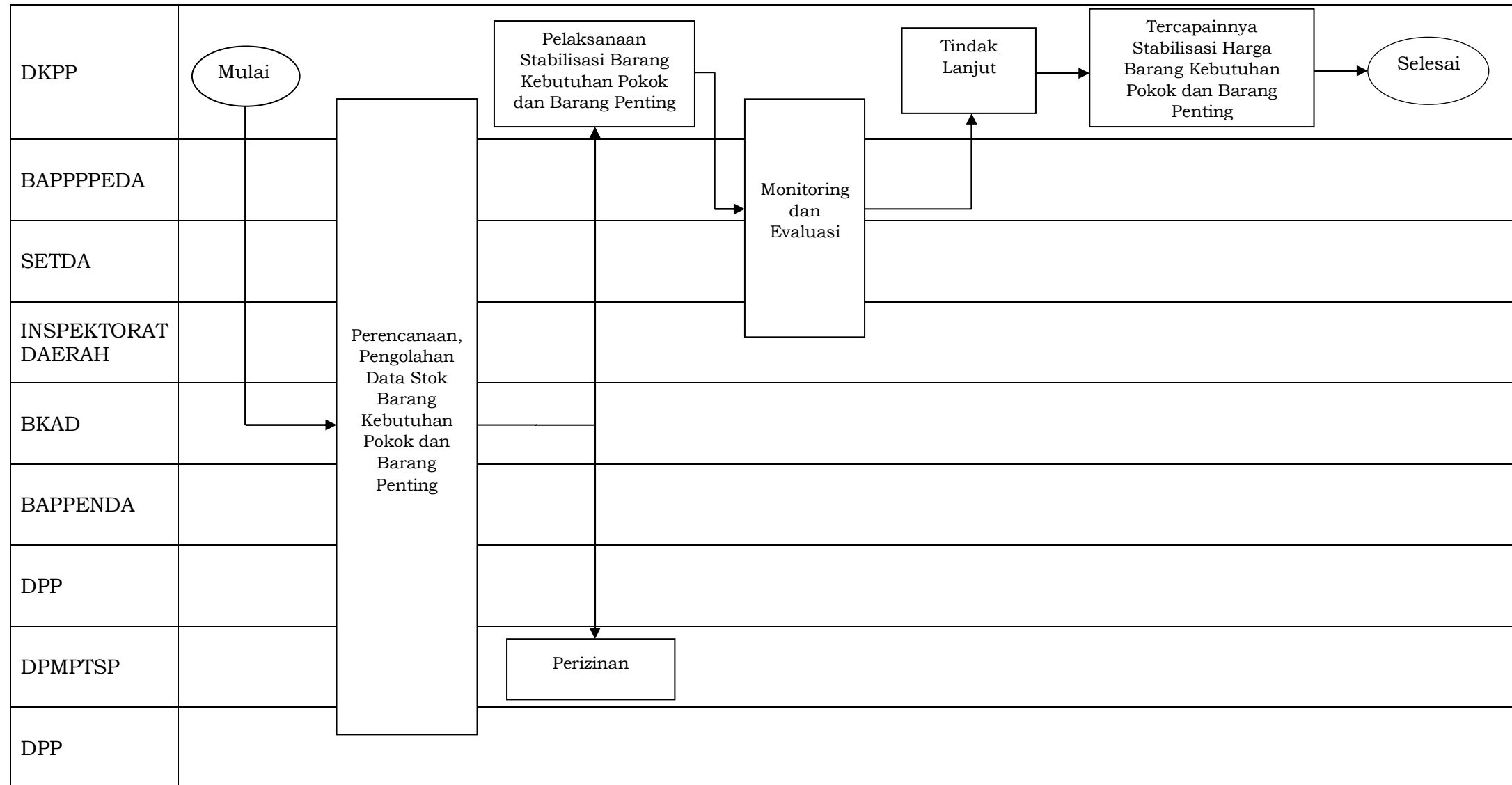
SMD – 11.04 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPP	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DINAS SOSIAL	Perencanaan Bantuan Sosial
7.	DKPP	Stabilitas harga

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.05 Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting



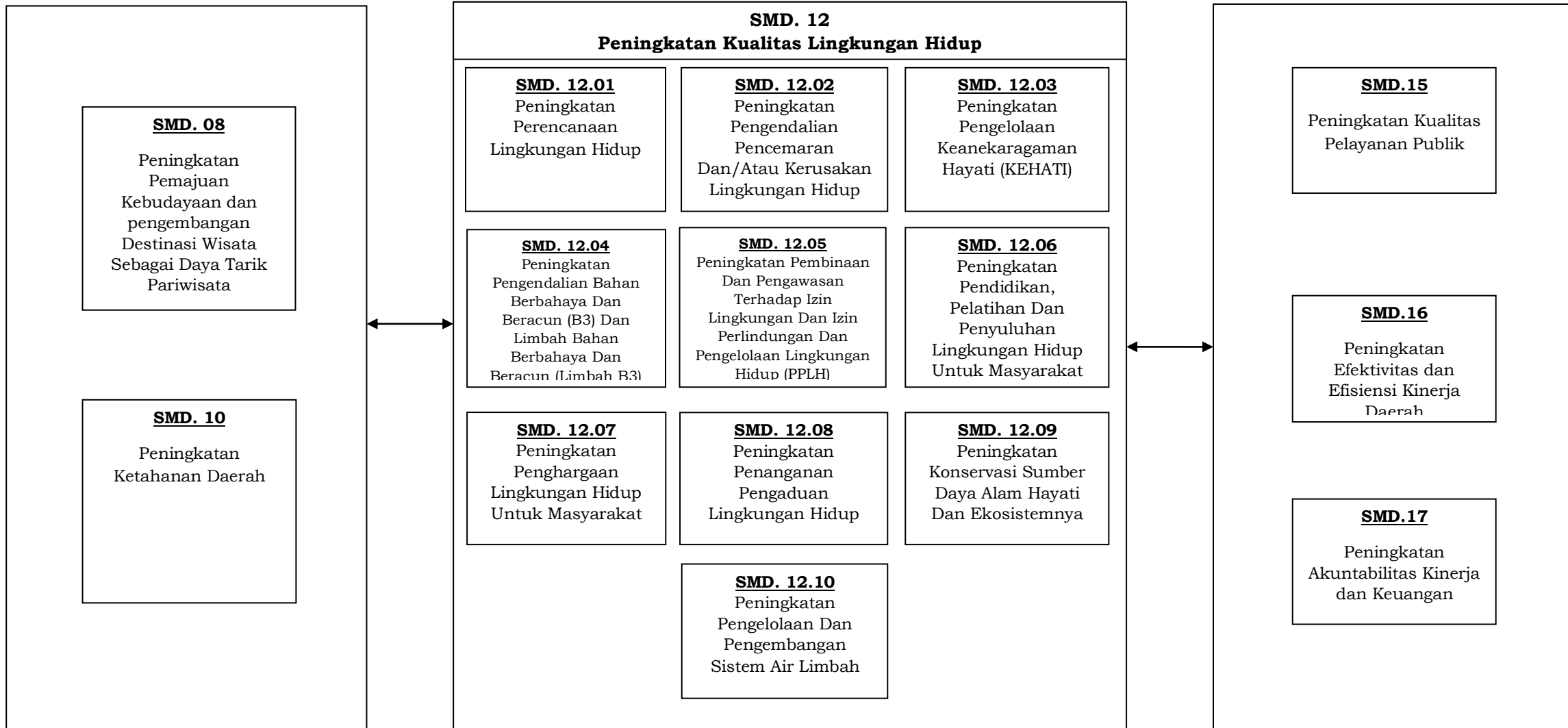
**Keterangan :**

**CFM 11 Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah**

SMD – 11.05 Peningkatan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	BAPENDA	Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.	SETDA	Dukungan Dasar Hukum dan Kebijakan
6.	DPP	Dukungan Data Stok di Lapangan
7.	DPP	Dukungan Data Stok di Lapangan
8.	DPMPSTP	Dukungan Perizinan
9.	INSPEKTORAT DAERAH	Dukungan Pengawasan

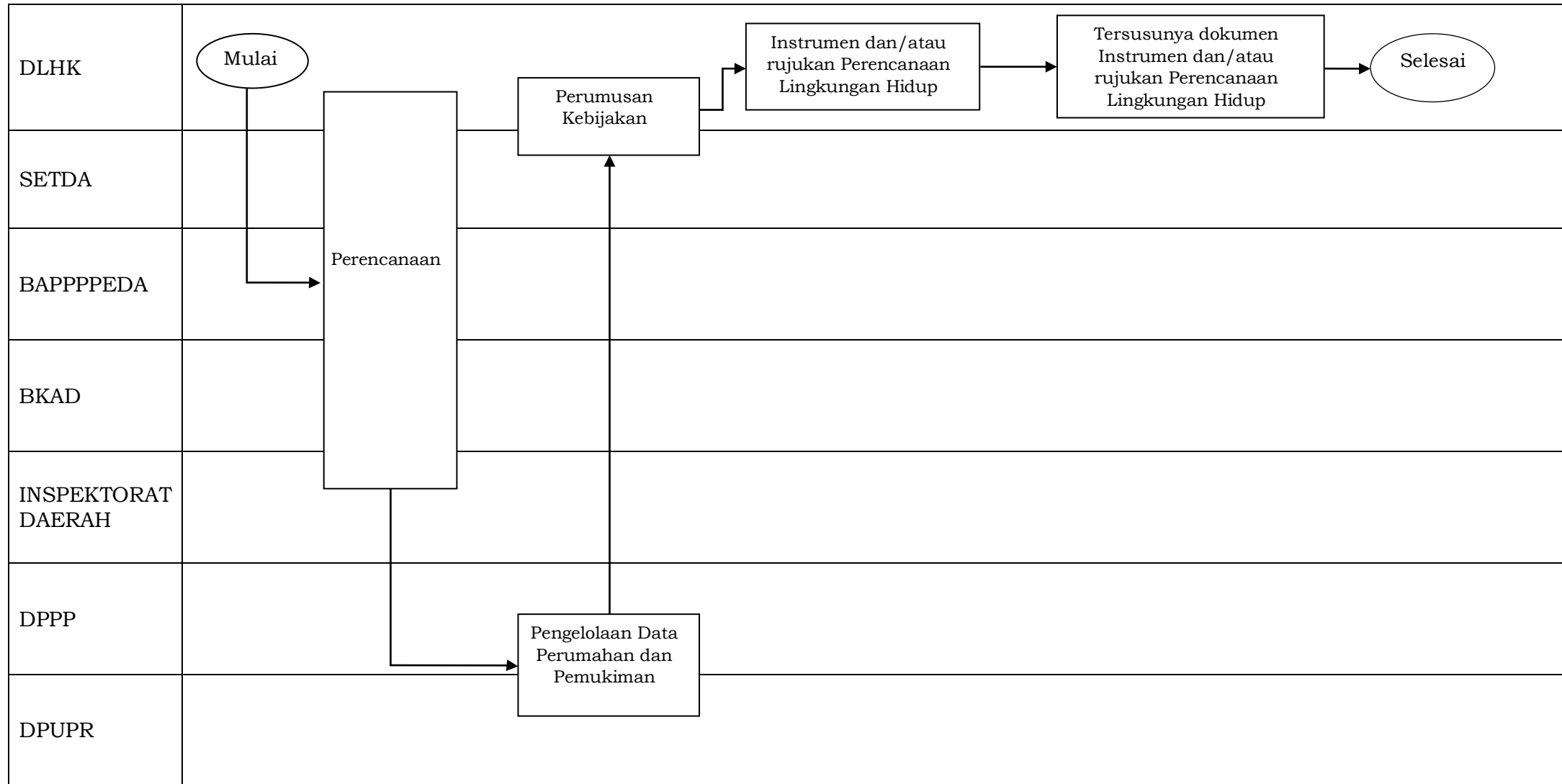
**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.01 Peningkatan Perencanaan Lingkungan Hidup



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.01 Peningkatan Perencanaan Lingkungan Hidup

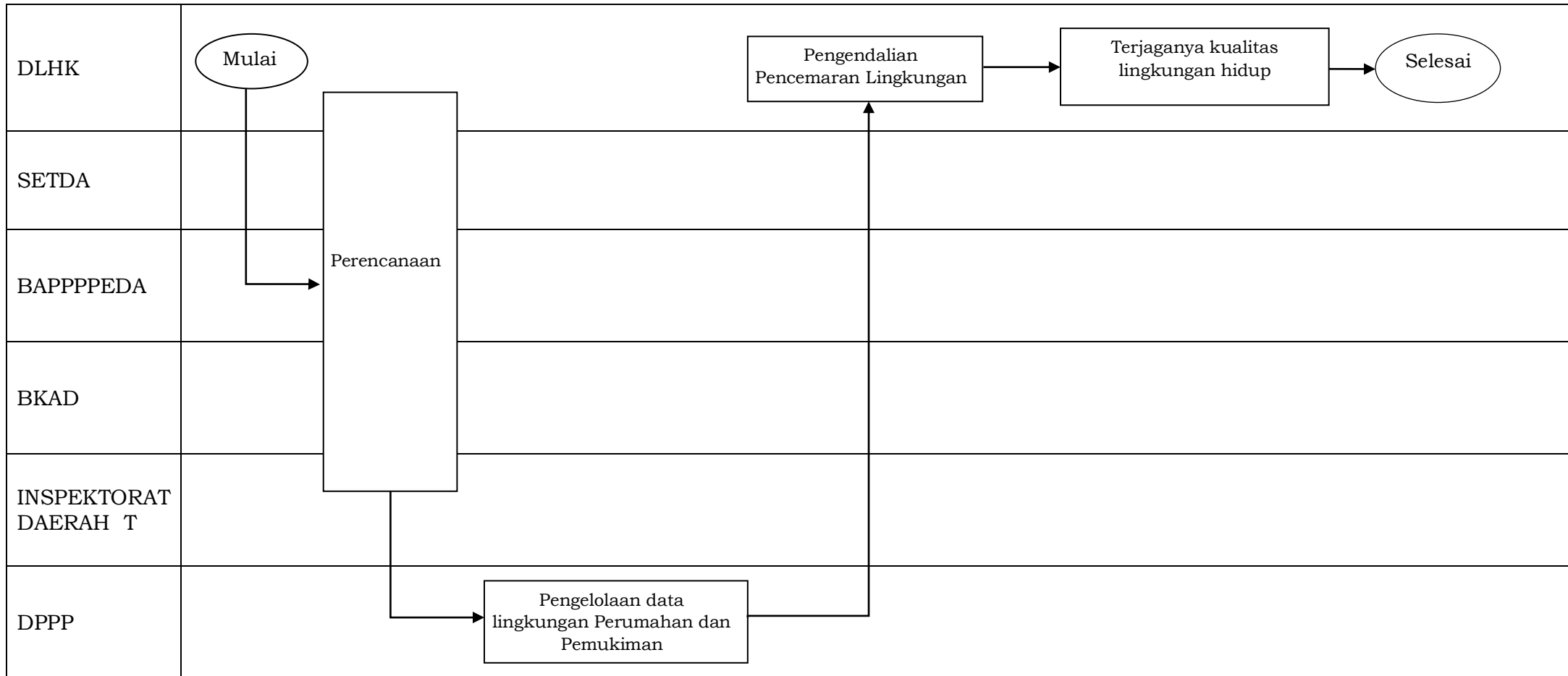
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DPPP	Pengelolaan Data Perumahan dan Permukiman Penduduk
7.	DPUPR	Dukungan Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Pembangunan



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.02 Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

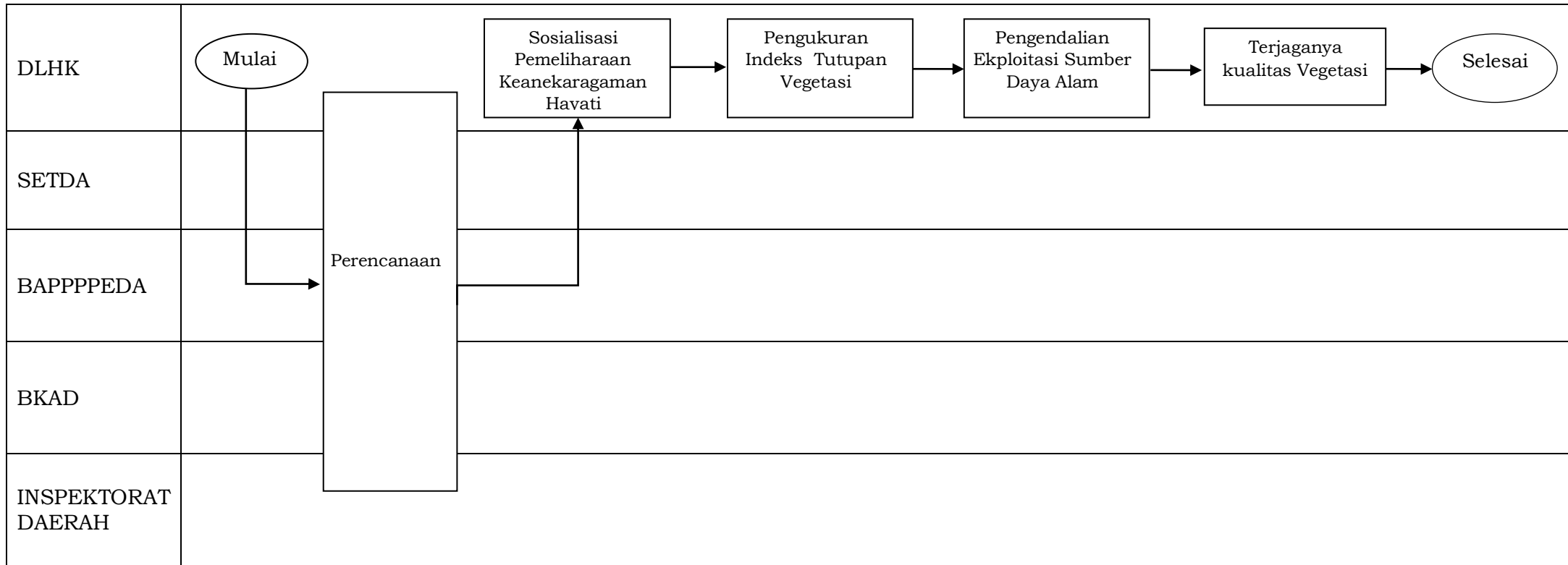
SMD – 12.02 Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DPPP	Pengelolaan Data Lingkungan Perumahan dan Permukiman Penduduk

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.03 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

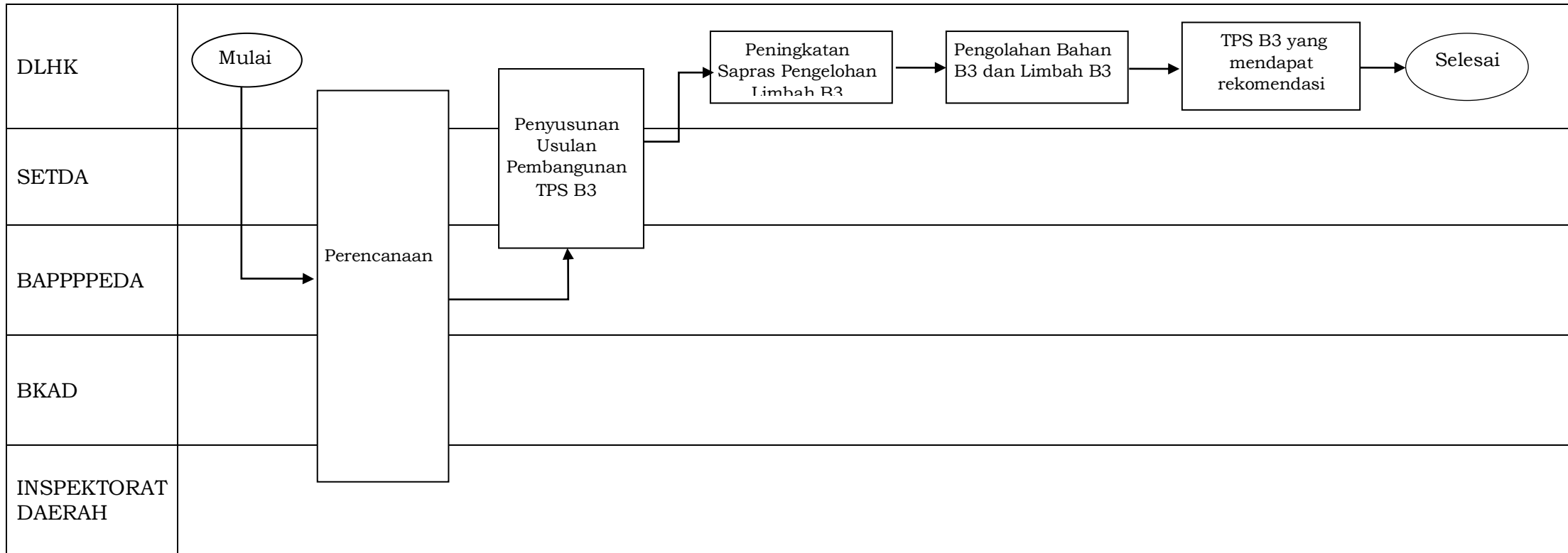
SMD – 12.03 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.04 Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

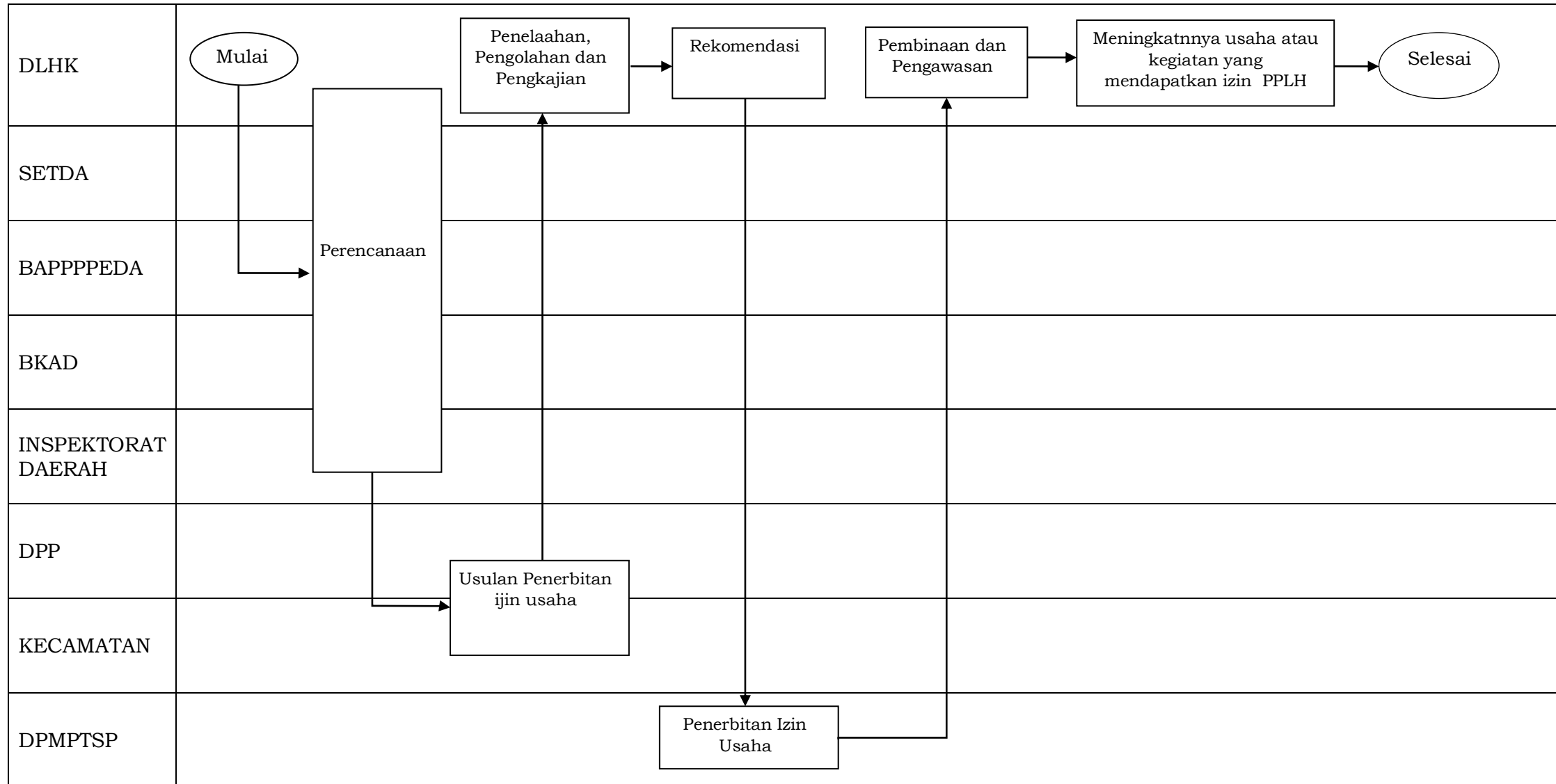
SMD – 12.04 Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	IINSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.05 Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.05 Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

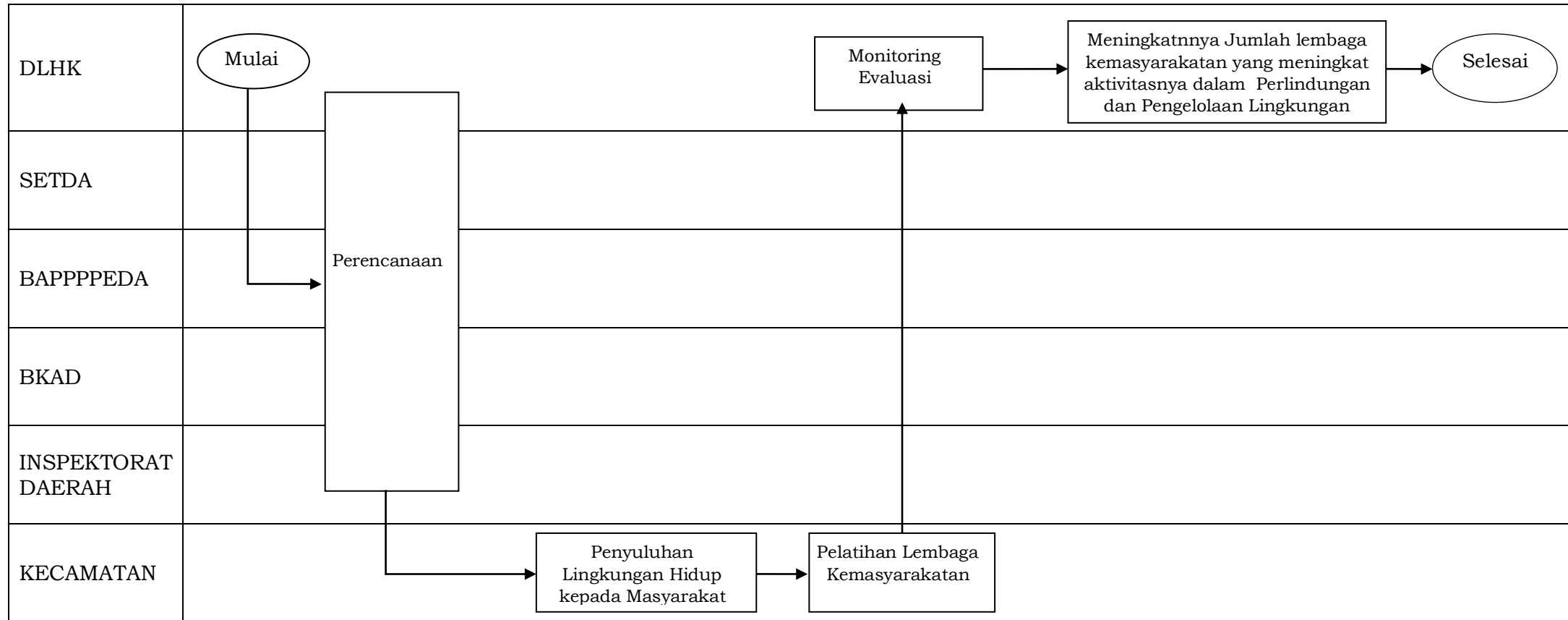
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	DPP	Rekomendasi Usulan Perijinan
7.	KECAMATAN	Rekomendasi Usulan Perijinan
8.	DPMPTSP	Penerbitan Ijin



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

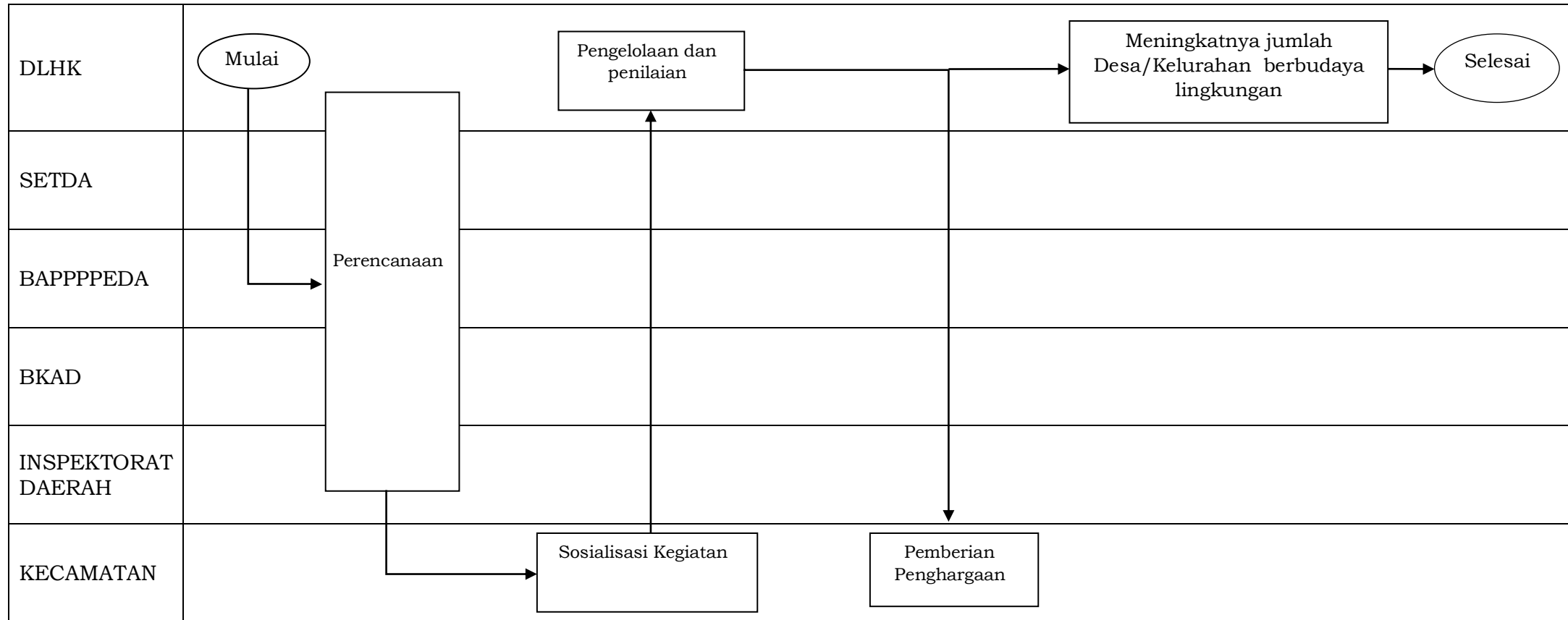
SMD – 12.06 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	KECAMATAN	Fasilitator Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.07 Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

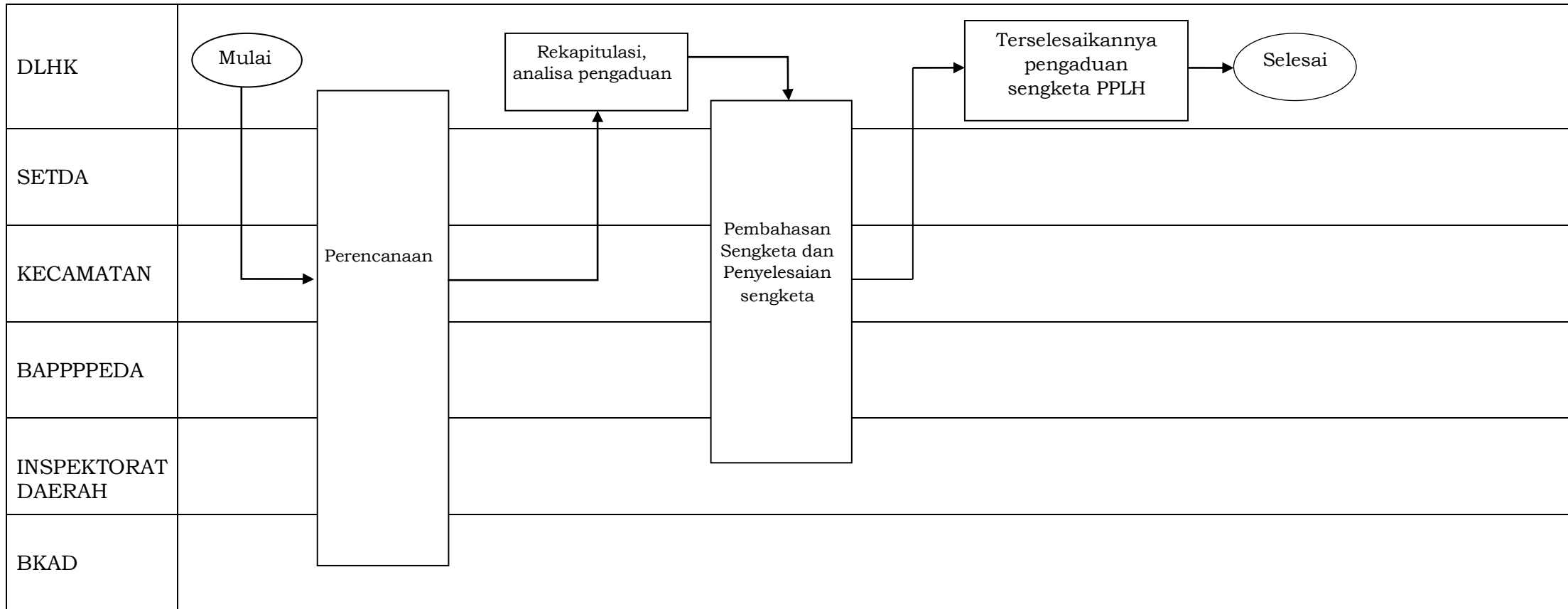
SMD – 12.07 Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Perencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	KECAMATAN	Fasilitator Wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.08 Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

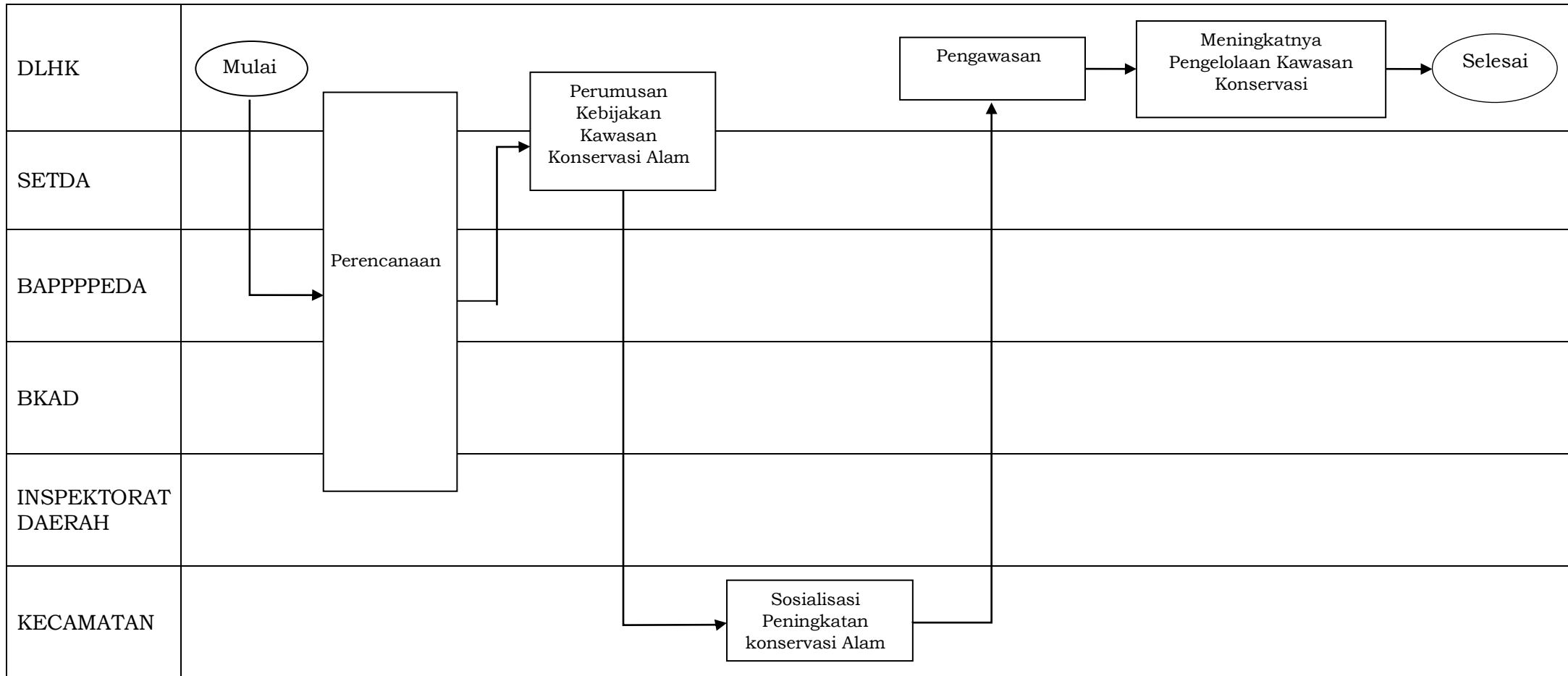
SMD – 12.08 Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	KECAMATAN	Fasilitator dan koordinator
4.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	BKAD	Perencanaan Anggaran

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.09 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya



**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.09 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

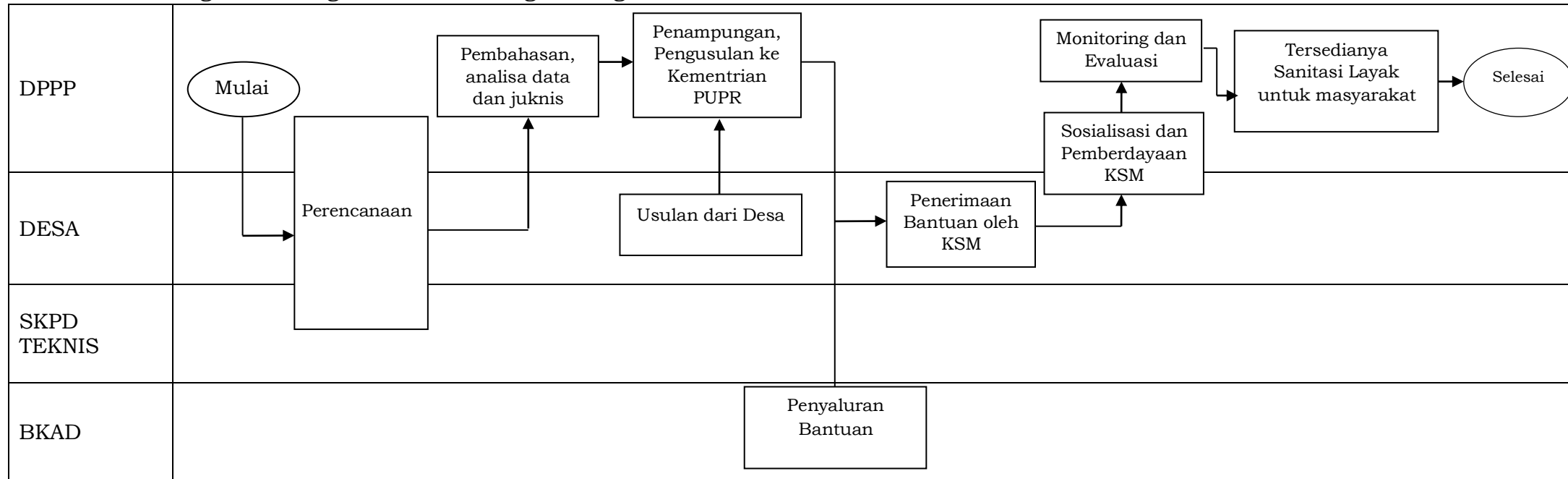
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DLHK	Penanggung Jawab
2.	SETDA	Perumusan Kebijakan
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	BKAD	Penrencanaan Anggaran
5.	INSPEKTORAT DAERAH	Verifikasi dan Evaluasi
6.	KECAMATAN	Fasilitator dan koordinator



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.10 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



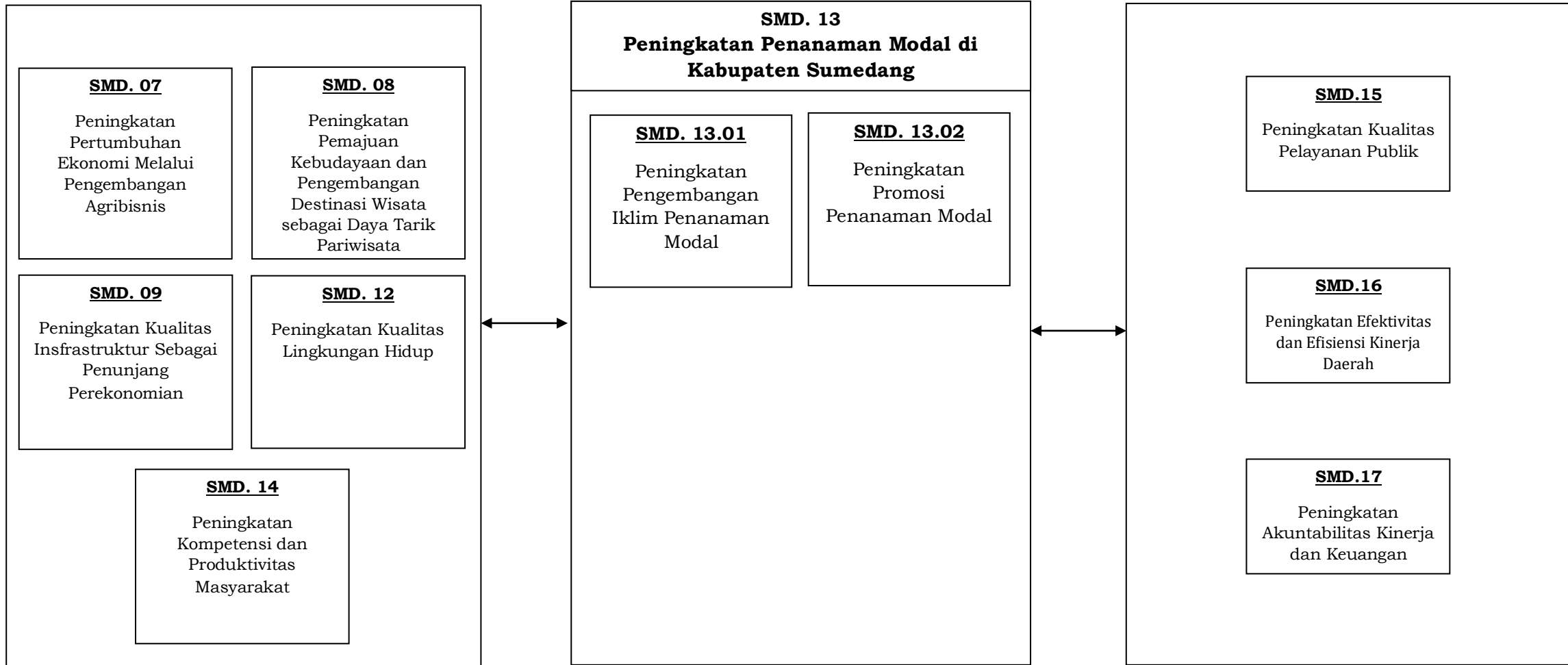
**Keterangan :**

**CFM 12 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

SMD – 12.10 Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DPPP	Penanggung Jawab
2.	DESA	Pengusulan dan Penerima Hasil
3.	SKPD TEKNIS	Pokja AMPL
4.	BKAD	Fasilitasi Pencairan Bantuan

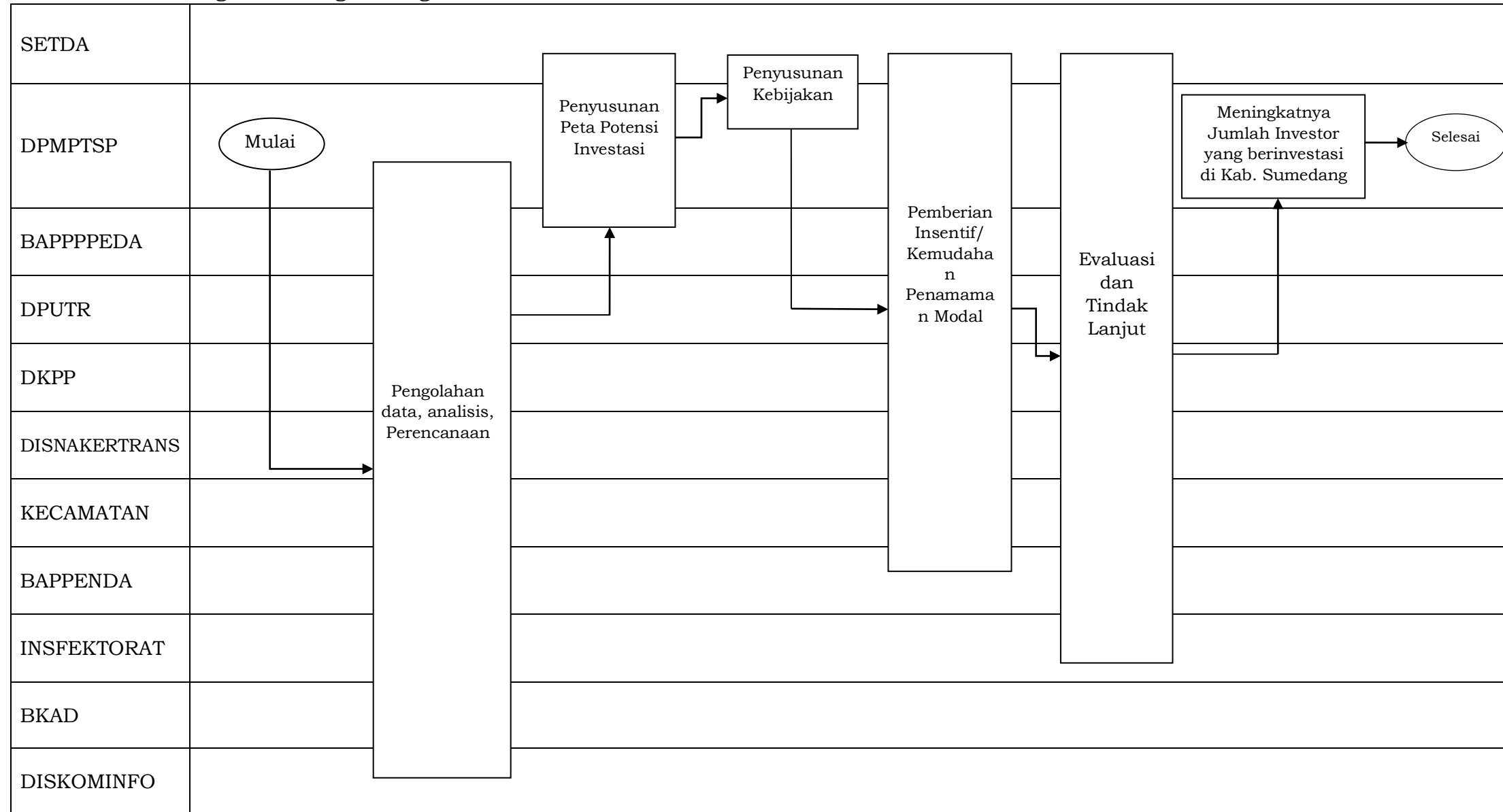
**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang**

SMD – 13.01 Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal



**Keterangan :**

**CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang**

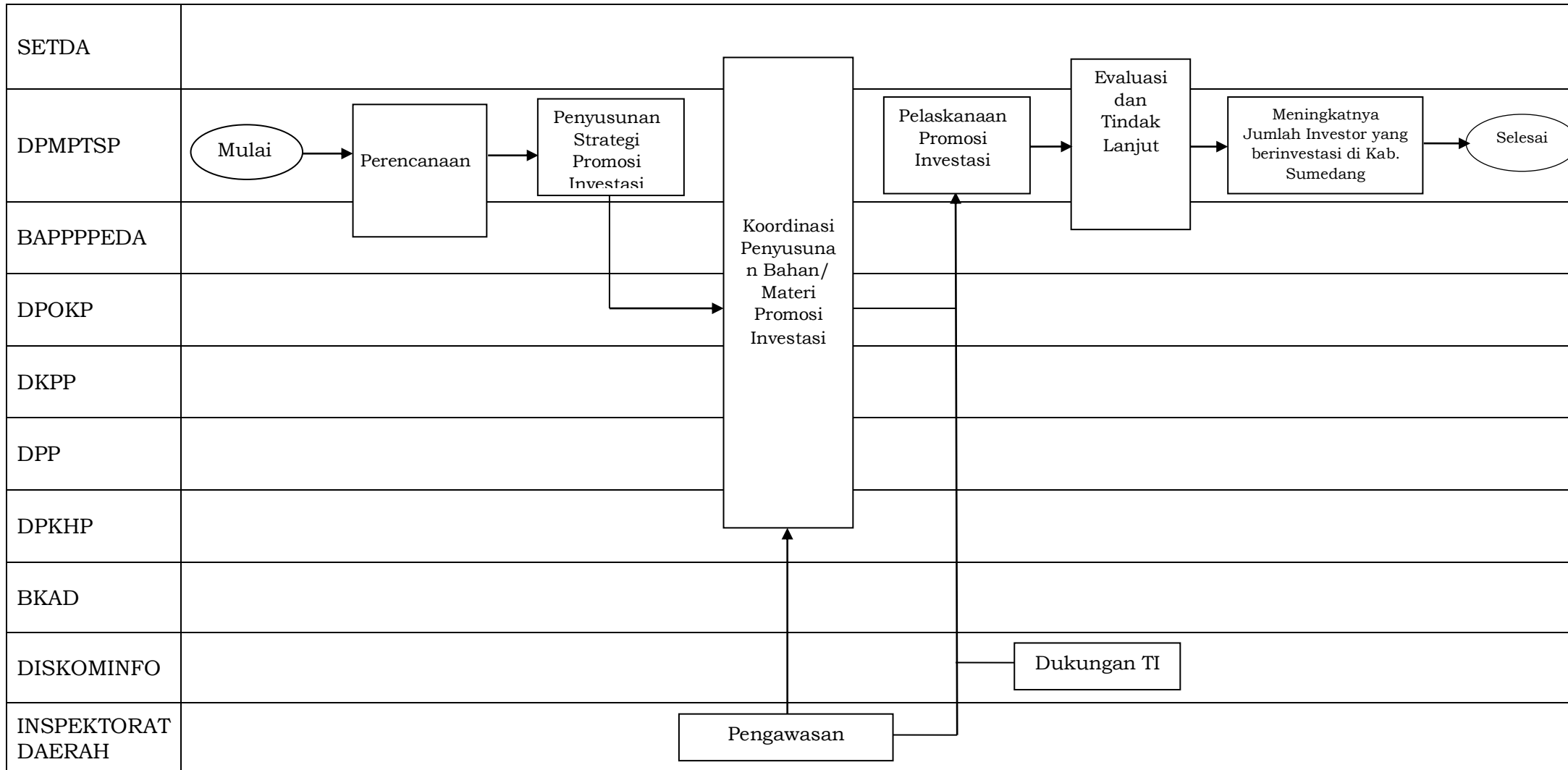
SMD – 13.01 Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DPMPTSP	Penanggungjawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	DPUR	Perencanaan Tataruang
5.	DKUKMPP	Perencanaan Kawasan Industri
6.	DISNAKERTRANS	Penyediaan Tenaga Kerja dan UMK
7.	KECAMATAN	Fasilitator Kewilayahan
8.	BAPPENDA	Perencanaan Pendapatan Daerah dan Analisis Kebijakan tentang Pendapatan Daerah
9.	BKAD	Dukungan Anggaran
10.	DISKOMINFO	Dukungan TI
11.	I INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan , Pembinaan dan Pendampingan

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang**

SMD – 13.02 Peningkatan Promosi Penanaman Modal



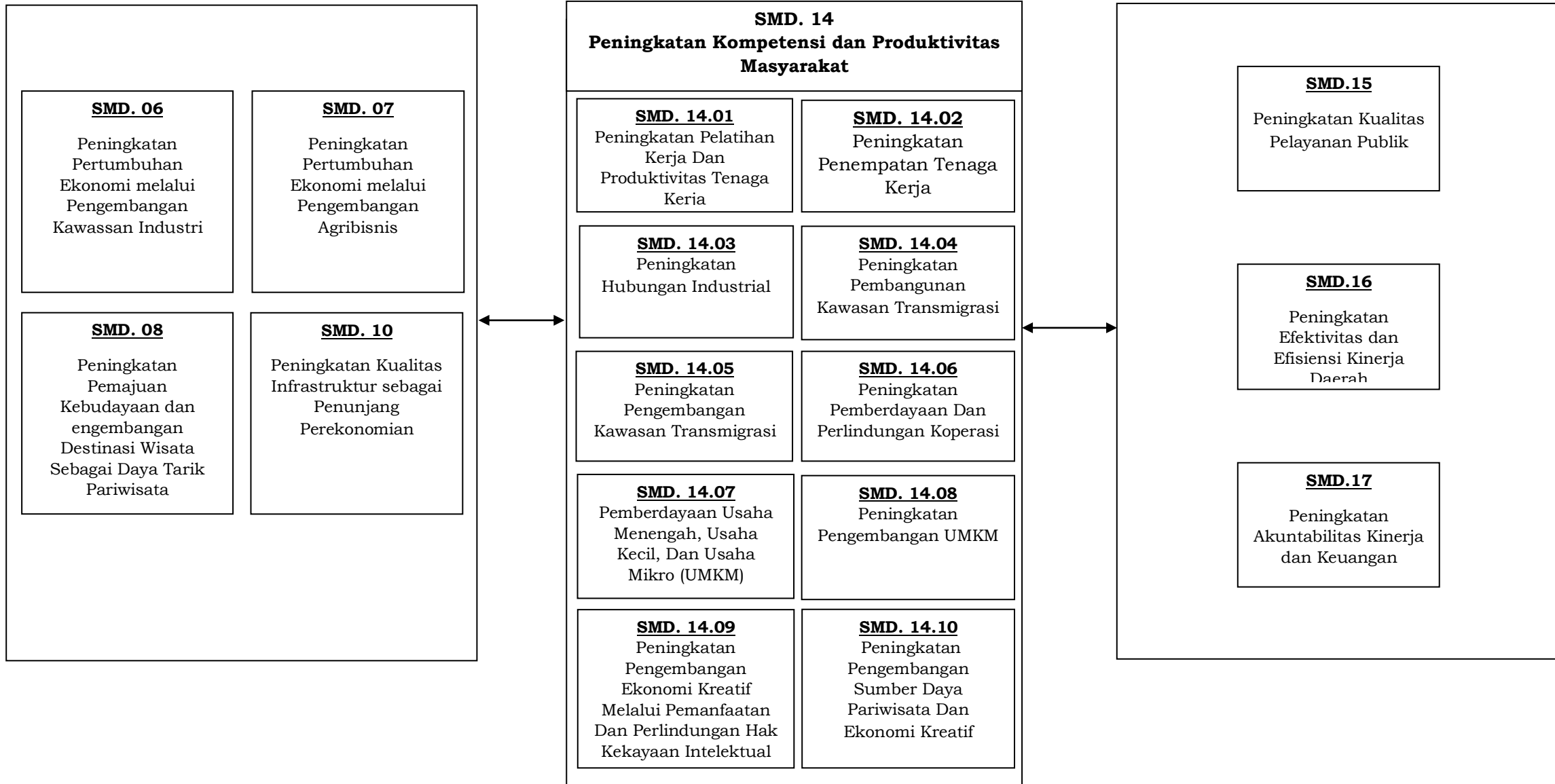
**Keterangan :**

**CFM 13 Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang**

SMD – 13.02 Peningkatan Promosi Penanaman Modal

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Penyusunan Kebijakan
2.	DPMPTSP	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan Pembangunan
4.	DISBUDPORA	Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan
5.	DKUKMPP	Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Industri, Perdagangan
6.	DPP	Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Pertanian
7.	DPP	Penyusunan Bahan Materi Promosi Investasi Sektor Perikanan dan Peternakan
8.	BKAD	Dukungan Anggaran
9.	DISKOMINFO	Sistem Informasi
10.	INSPEKTORAT DAERAH	Pengawasan dan Pembinaan

**PETA SUB PROSES (LEVEL 1)**

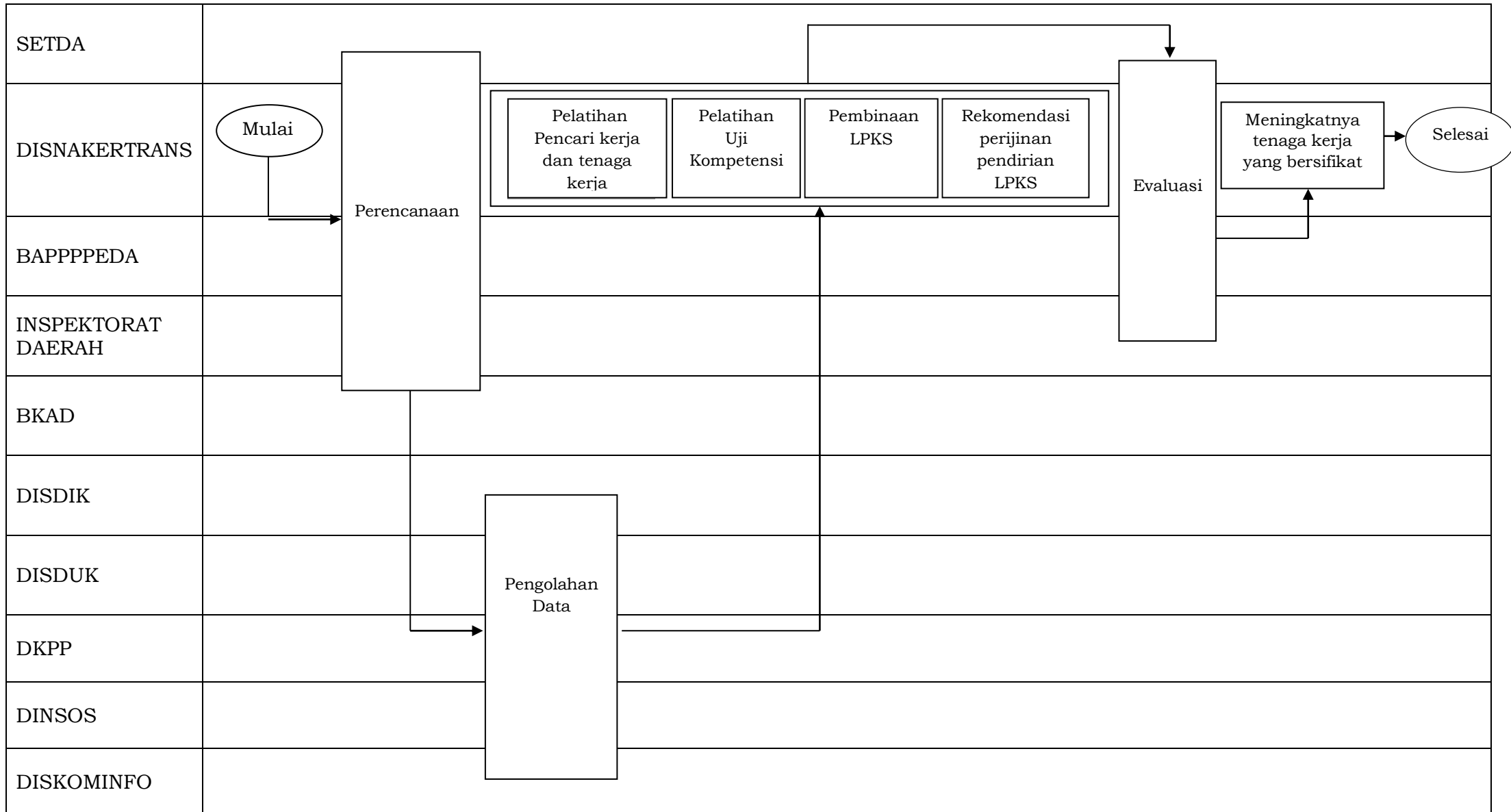




**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.01 Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.01 Peningkatan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2.	DISNAKERTRANS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan dan evaluasi
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan pengawasan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
6.	DISDIK	Data lulus sekolah
7.	DISDUK	Data Kependudukan
8.	DKPP	Data usaha kecil dan industri
9.	DINSOS	Data Sosial
10.	DISKOMINFO	Sistem Informasi



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

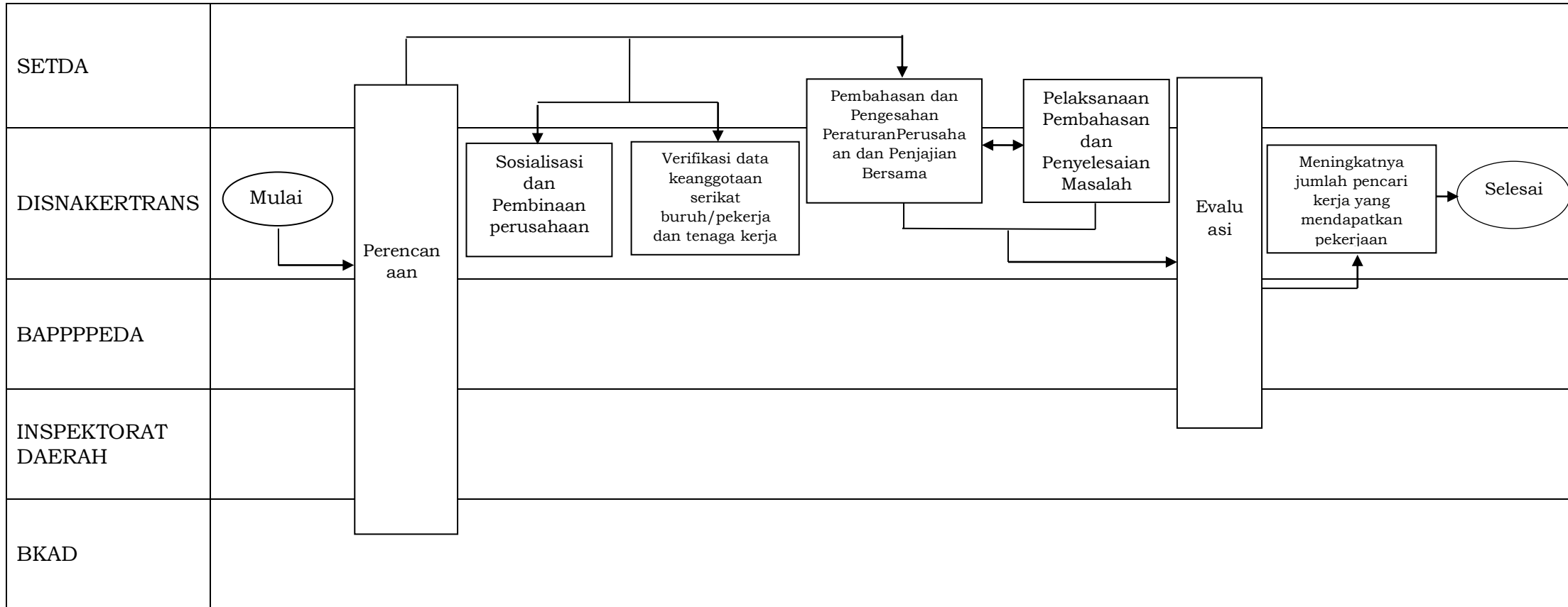
SMD – 14.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2.	DISNAKERTRANS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan dan evaluasi
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan pengawasan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
6.	DISDIK	Data lulus sekolah
7.	DISDUK	Data Kependudukan
8.	DKPP	Data usaha kecil dan industri
9.	DINSOS	Data Sosial
10.	DISKOMINFO	Sistem Informasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.03 Peningkatan Hubungan Industrial



**Keterangan :**  
**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**  
SMD – 14.03 Peningkatan Hubungan Industrial

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2.	DISNAKERTRANS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan dan evaluasi
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan pengawasan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.04 Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

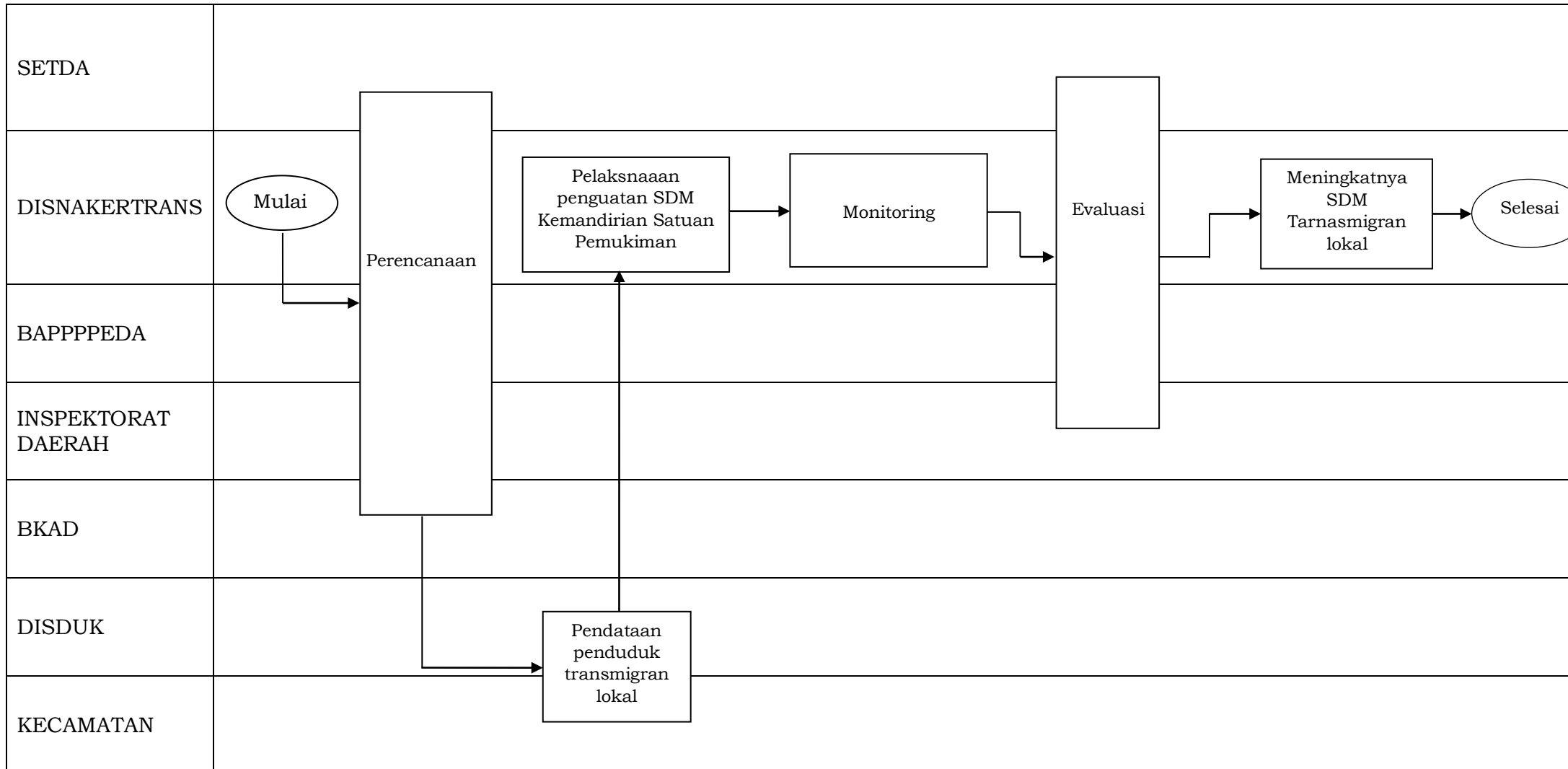
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2.	DISNAKERTRANS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan dan evaluasi
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan pengawasan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.05 Peningkatan Pengembangan Kawasan Transmigrasi



**Keterangan :**

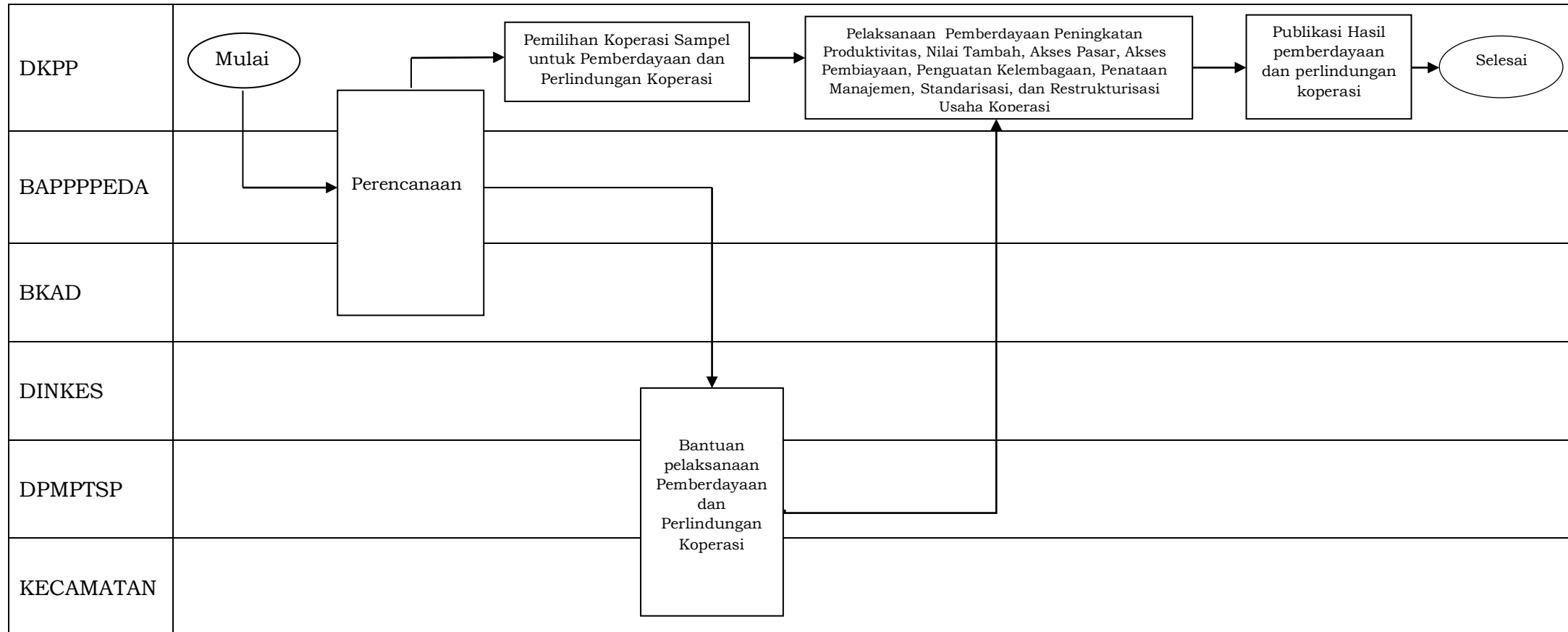
**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.05 Peningkatan Pengembang Kawasan Transmigrasi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	SETDA	Perumusan danPenyusunan Kebijakan
2.	DISNAKERTRANS	Penanggung Jawab
3.	BAPPPEDA	Perencanaan dan evaluasi
4.	INSPEKTORAT DAERAH	Perencanaan dan pengawasan
5.	BKAD	Perencanaan Penganggaran
6.	DISDUK	Data Penduduk
7.	KECAMATAN	Fasilitator wilayah

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**  
**SMD – 14.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

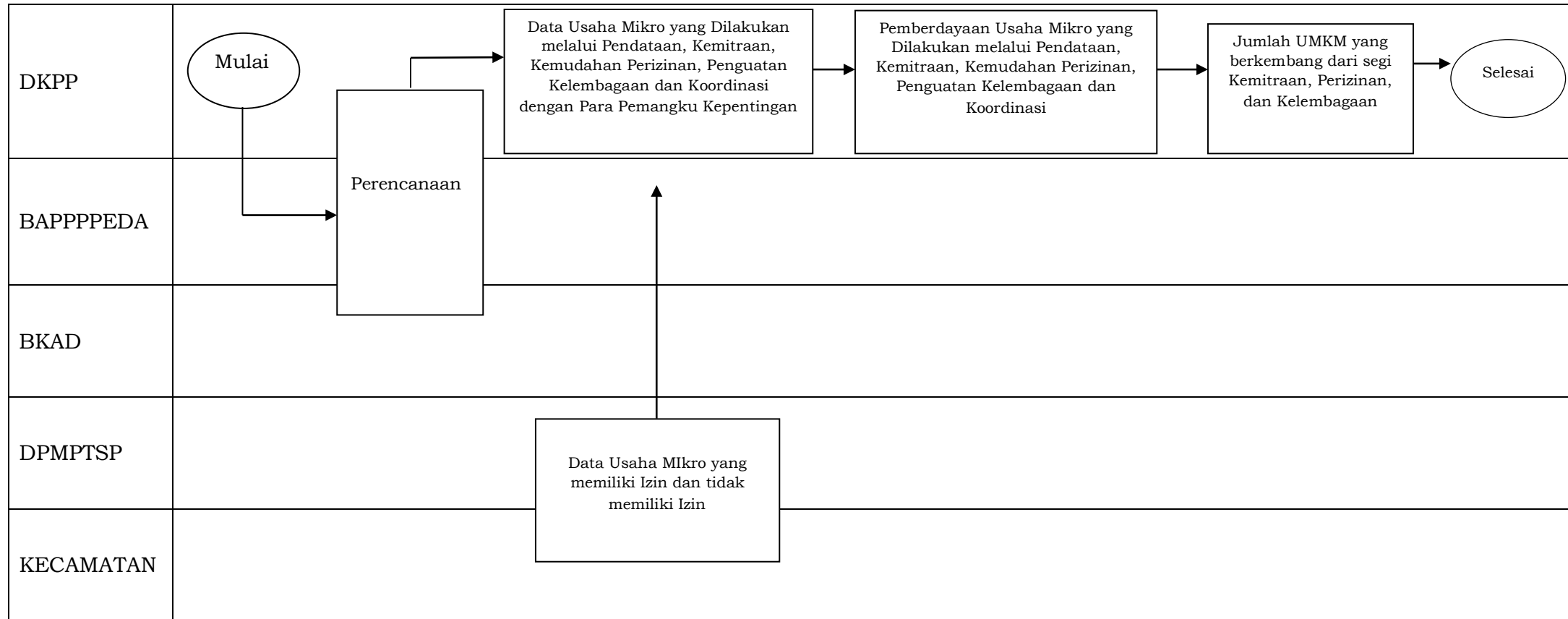
SMD – 14.06 Peningkatan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DINKES	Narasumber pemberdayaan
5.	DPMPTSP	Dukungan Perizinan
7.	KECAMATAN	Dukungan Pemberdayaan Koperasi

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.07 Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

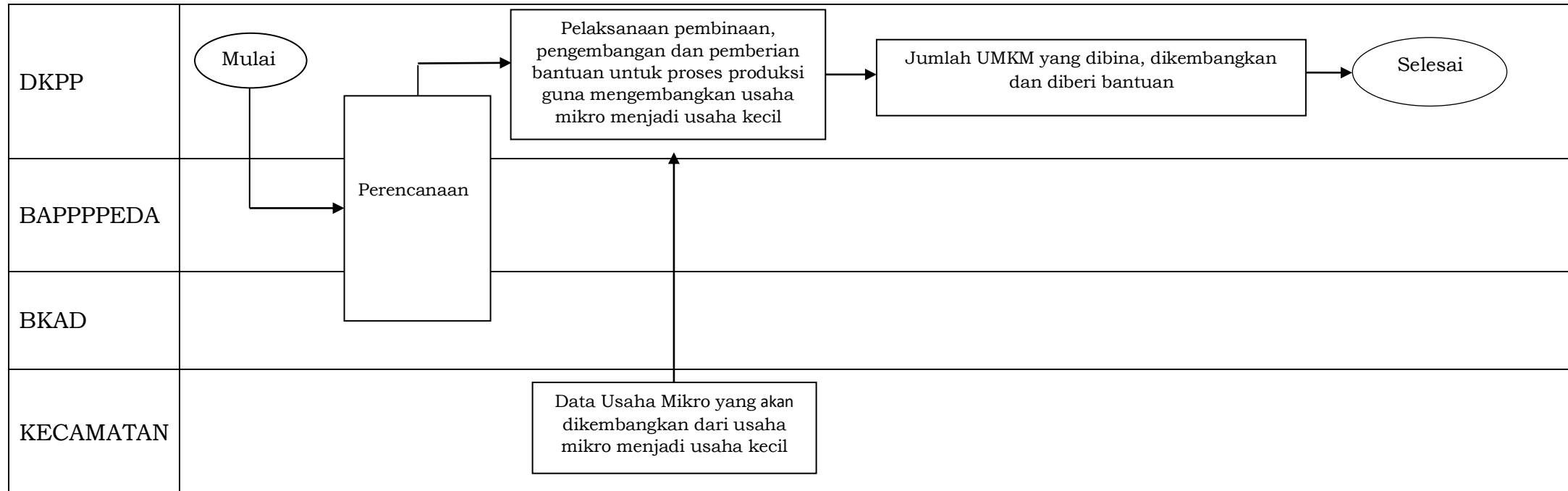
SMD – 14.07 Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	DPMPTSP	Dukungan Perizinan
5.	KECAMATAN	Dukungan Pemberdayaan UMKM

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.08 Peningkatan Pengembangan UMKM



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.08 Peningkatan Pengembangan UMKM

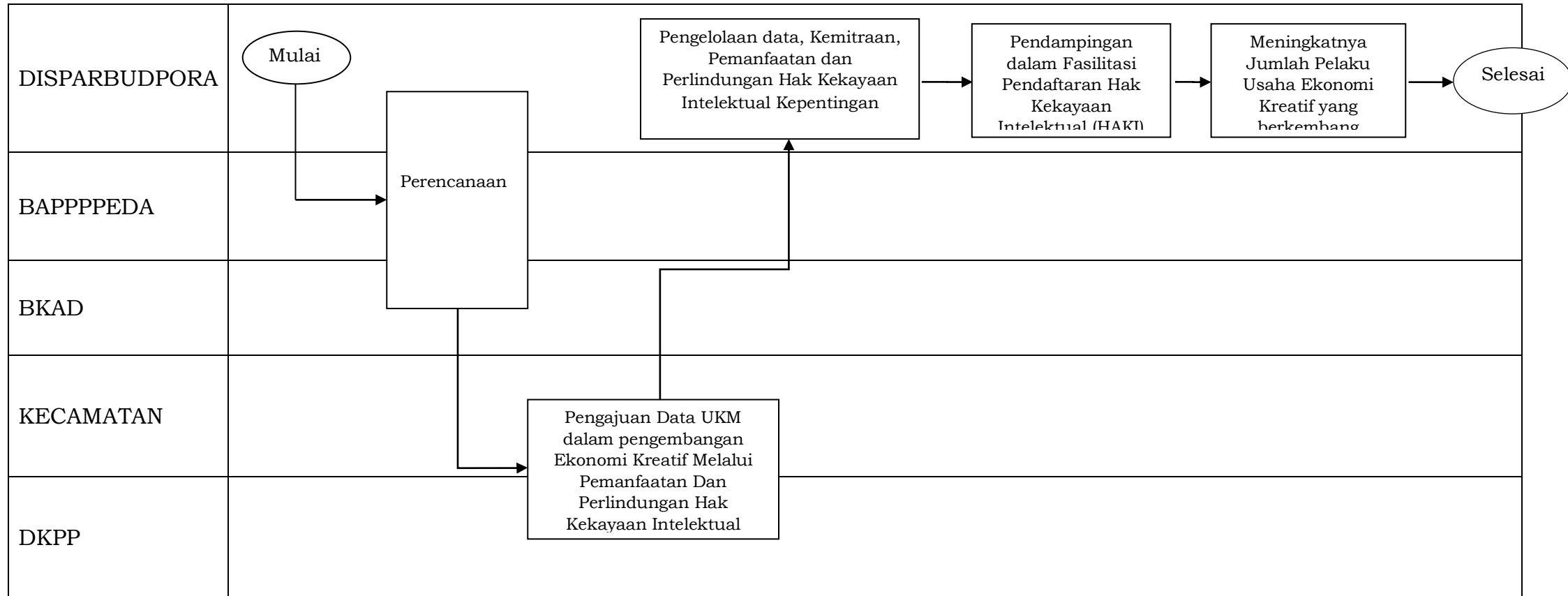
<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DKPP	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	Kecamatan	Dukungan Pelaksanaan Pemberdayaan UMKM



**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.09 Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

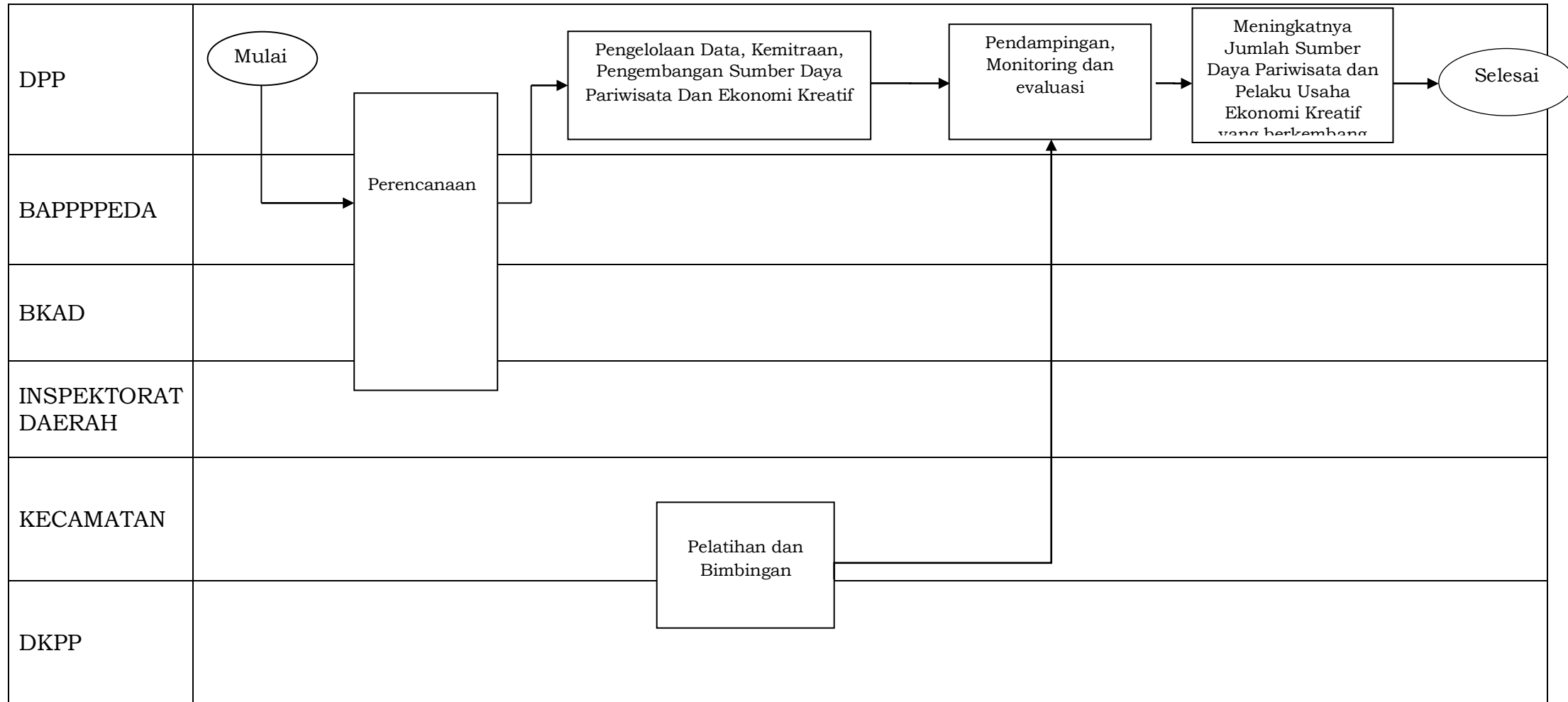
SMD – 14.09 Peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DISPARBUDPORA	Penanggung Jawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	KECAMATAN	Legalitas Tempat
5.	DKPP	Fasilitator

**PETA LINTAS FUNGSI**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.10 Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif



**Keterangan :**

**CFM 14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Masyarakat**

SMD – 14.10 Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>AKTIVITAS</b>
1.	DISPARBUDPORA	Penanggungjawab
2.	BAPPPEDA	Perencanaan
3.	BKAD	Dukungan Anggaran
4.	KECAMATAN	Fasilitator pelaku UMKM
5.	DKPP	Dukungan Promosi

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG.

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NI.19650129199831001

